



EKONOMI PEMBANGUNAN

**Zul Fadli
Fitri S. Kasim
Suharno
Sri Nawatmi
Izzah Dienillah
Anita Latuheru
Khusaini
Misbahul Munir
Agung Nusantara
Luluk Fadliyanti
Kurnia Dwi Sari Utami
Baginda Parsaulian
Tri Widayati**



ISBN 978-623-198-237-7



9 786231 982377



EKONOMI PEMBANGUNAN

**Zul Fadli
Fitri S. Kasim
Suharno
Sri Nawatmi
Izzah Dienillah
Anita Latuheru
Khusaini
Misbahul Munir
Agung Nusantara
Luluk Fadliyanti
Kurnia Dwi Sari Utami
Baginda Parsaulian
Tri Widayati**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

EKONOMI PEMBANGUNAN

Penulis :

Zul Fadli
Fitri S. Kasim
Suharno
Sri Nawatmi
Izzah Dienillah
Anita Latuheru
Khusaini
Misbahul Munir
Agung Nusantara
Luluk Fadliyanti
Kurnia Dwi Sari Utami
Baginda Parsaulian
Tri Widayati

ISBN : 978-623-198-237-7

Editor : Diana Purnama Sari, M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Manajemen Pemasaran ini.

Buku ini membahas Ruang lingkup ekonomi pembangunan, Tujuan dan manfaat ekonomi pembangunan, Hakikat dan makna pembangunan ekonomi, Kerugian pembangunan ekonomi, Indikator pembangunan ekonomi, Ciri-ciri negara sedang berkembang, Faktor-faktor pembangunan ekonomi, Tahapan pembangunan ekonomi, Tipe-tipe pembangunan ekonomi, Teori pembangunan ekonomi, Pembangunan ekonomi berkelanjutan, Pembangunan ekonomi dan globalisasi, Peran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 RUANG LINGKUP EKONOMI PEMBANGUNAN	1
1.1 Definisi Ekonomi Menurut Para Ahli.....	1
1.2 Definisi Pembangunan Menurut Para Ahli	1
1.3 Definisi Ekonomi Pembangunan Menurut Para Ahli	2
1.4 Sejarah Ekonomi Pembangunan Di Dunia	3
1.5 Sejarah Ekonomi Pembangunan Di Indonesia	4
1.6 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Pembangunan di Indonesia	5
1.7 Konsep Ekonomi Pembangunan di Dunia dan di Indonesia	6
1.8 Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan	8
DAFTAR PUSTAKA.....	13
BAB 2 TUJUAN DAN MANFAAT EKONOMI PEMBANGUNAN	15
2.1 Pendahuluan.....	15
2.2 Paradigma Pembangunan Ekonomi	16
2.2.1 Paradigma Tradisional	16
2.2.2 Paradigma Baru.....	17
2.2.3 Pembangunan dengan Pendekatan Kapabilitas (kemampuan)	19
2.3 Ekonomi Pembangunan, Pembangunan Ekonomi, dan Pertumbuhan Ekonomi	20
2.4 Tujuan Pembangunan Ekonomi.....	22
2.5 Manfaat Pembangunan Ekonomi	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25

BAB 3 HAKIKAT DAN MAKNA PEMBANGUNAN	
EKONOMI	27
3.1 Pendahuluan.....	27
3.2 Riwayat Ekonomi Pembangunan	29
3.3 Perdebatan dan Hakikat Pembangunan Ekonomi	33
DAFTAR PUSTAKA.....	41
BAB 4 KERUGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI	45
4.1 Pendahuluan.....	45
4.2 Masalah-Masalah Pembangunan Ekonomi	47
4.3 Tujuan dan Manfaat Pembangunan Ekonomi	49
4.4 Kerugian Pembangunan Ekonomi.....	50
4.5 Penutup	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
BAB 5 INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI	59
5.1 Pendahuluan.....	59
5.2 Indikator Pembangunan Ekonomi	60
5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	60
5.2.2 Pemerataan Distribusi Pendapatan (Rasio Gini)	61
5.2.3 Indeks Kualitas Hidup Secara Fisik.....	62
5.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	63
5.2.5 Struktur Ekonomi	64
5.2.6 Pembangunan Berkelanjutan.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
BAB 6 CIRI CIRI NEGARA SEDANG BERKEMBANG	67
6.1 Pendahuluan.....	67
6.2 Pengelompokan Negara Sedang Berkembang	68
6.3 Karakteristik Negara Sedang Berkembang	70
DAFTAR PUSTAKA.....	75
BAB 7 FAKTOR-FAKTOR PEMBANGUNAN EKONOMI	77
7.1 Pendahuluan.....	77
7.2 Faktor Ekonomi	78
7.2.1 Penduduk.....	78
7.2.2 Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya.....	79

7.2.3 Teknologi.....	80
7.2.4 Perluasan Pasar	81
7.2.5 Struktur Pekerjaan	81
7.2.6 Perencanaan Pembangunan	82
7.2.7 Perdagangan dan Kerjasama Internasional.....	82
7.2.8 Investasi dan Akumulasi Modal.....	83
7.2.9 Infrastruktur	84
7.3 Faktor Non Ekonomi.....	85
7.3.1 Modal Sosial.....	85
7.3.2 Pendidikan	85
7.3.3 Budaya	86
7.3.4 Kesehatan	86
7.3.5 Lingkungan	86
7.3.6 Efisiensi Administrasi	87
7.4 Rangkuman	88
7.5 Pertanyaan Diskusi	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
BAB 8 TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI	99
8.1 Definisi Ekonomi Pembangunan	99
8.2 Tujuan Pembangunan Ekonomi.....	101
8.3 Teori-teori dalam Pembangunan Ekonomi.....	102
8.3.1 Teori Pertumbuhan Aliran Klasik.....	102
8.3.2 Teori Pertumbuhan Aliran Neo Klasik.....	102
8.4 Indikator-indikator dalam Pembangunan Ekonomi.....	103
8.4.1 Indikator Struktur Ekonomi	103
8.4.2 Indikator Pendapatan Perkapita	103
8.5 Tahapan-tahapan dalam pembangunan Ekonomi.....	104
8.5.1 Tahap Masyarakat Tradisional.....	104
8.5.2 Masyarakat Prasyarat Lepas Landas	105
8.5.3 Masyarakat Lepas Landas	105

8.5.4 Masyarakat Menuju Kedewasaan atau Kematanan	105
8.5.5 Masyarakat Konsumsi Berlebihan (Tinggi)	106
8.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi	106
8.6.1 Sumber Daya Alam (SDA)	106
8.6.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	107
8.6.3 Akumulasi Modal.....	107
8.6.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
BAB 9 PERKEMBANGAN PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI.....	111
9.1 Negara dan Kesejahteraan	111
9.2 Spontaneous Development.....	112
9.3 Induced Development.....	117
9.4 Command Development.....	121
9.5 Beberapa Praktek Penerapan Kebijakan Pembangunan.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	126
BAB 10 TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI	127
10.1 Pendahuluan.....	127
10.2 Mazhab Historisme.....	127
10.2.1 Ahli Ekonomi Mazhab Historisme.....	128
10.3 Teori Klasik.....	130
10.3.1 Ahli Ekonomi Teori Klasik.....	131
10.4 Teori Keynesian	133
10.4.1 Ahli Ekonomi Keynesian	134
10.5 Teori Neo Klasik	135
10.5.1 Ahli Ekonomi Neo-Klasik.....	136
10.6 Teori Pertumbuhan Endogen	138
10.6.1 Ahli Ekonomi Teori Pertumbuhan Endogen.....	139
10.7 Teori Schumpeter	141
DAFTAR PUSTAKA.....	142

BAB 11 PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN ..	145
11.1 Definisi dan Konsep	145
11.2 Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	147
11.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	153
DAFTAR PUSTAKA.....	156
BAB 12 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN GLOBALISASI.	157
12.1 Konsep Globalisasi	157
12.2 Pengukuran Dampak Globalisasi.....	161
12.3 Globalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	170
BAB 13 PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI.....	173
13.1 Pendahuluan.....	173
13.2 Peran Alokatif.....	174
13.3 Peran Distributif.....	177
13.4 Peran Stabilisasi.....	179
13.5 Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter.....	181
13.6 Peran Dinamisatif	182
13.7 Kegagalan Pemerintah.....	182
DAFTAR PUSTAKA.....	183
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 10.1. Kurva Fungsi Produksi Harrod-Domar	135
Gambar 10.2. Kurva Fungsi Produksi Neo Klasik.....	137
Gambar 13.1. Alokasi Barang Swasta dan Barang Publik	176
Gambar 13.2. Kebijakan Makro Ekonomi	181

BAB 1

RUANG LINGKUP EKONOMI PEMBANGUNAN

Oleh Zul Fadli

1.1 Definisi Ekonomi Menurut Para Ahli

Berikut beberapa definisi tentang Ekonomi menurut para ahli:

- a. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah tentang bagaimana memproduksi dan membagikan barang dan jasa.
- b. Menurut Lionel Robbins, ekonomi adalah studi aktivitas manusia dalam memilih bagaimana memanfaatkan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.
- c. Menurut John Maynard Keynes, ekonomi merupakan studi tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya produktif untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat mereka.
- d. Menurut Milton Friedman, ekonomi adalah bagaimana individu dan bisnis membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa dan bagaimana mereka membelanjakan pendapatan yang diperoleh (Machfudz, 2016).

1.2 Definisi Pembangunan Menurut Para Ahli

Berikut beberapa definisi tentang Pembangunan menurut para ahli:

- a. Menurut W. W. Rostow, pembangunan merupakan proses perkembangan yang membawa suatu negara dari tingkat ekonomi yang rendah dan tidak modern ke tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan modern.

- b. Menurut Mahbub ul Haq, pembangunan adalah proses meningkatkan kualitas hidup manusia secara holistik, termasuk kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Menurut Amartya Sen, pembangunan adalah proses memperluas pilihan individu untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memperbaiki kondisi hidup mereka.
- d. Menurut *The Brundtland Commission*, pembangunan merupakan proses yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka sekarang dan dimasa depan tanpa mengurangi kapasitas generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka (Suryono, 2010).

1.3 Definisi Ekonomi Pembangunan Menurut Para Ahli

Berikut beberapa definisi tentang Ekonomi Pembangunan menurut para ahli:

- a. Menurut Gunnar Myrdal, ekonomi pembangunan merupakan studi tentang proses pembangunan ekonomi dan upaya untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pembangunan.
- b. Menurut Paul Rosenstein-Rodan, ekonomi pembangunan merupakan studi tentang bagaimana suatu negara dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas pembangunan sosial dan ekonomi.
- c. Menurut Albert O. Hirschman, ekonomi pembangunan merupakan studi tentang proses transformasi ekonomi yang membawa suatu negara dari tingkat ekonomi yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih maju.
- d. Menurut Simon Kuznets, ekonomi pembangunan merupakan studi tentang perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial yang memungkinkan negara untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat (Hasan *et al.*, 2020).

1.4 Sejarah Ekonomi Pembangunan Di Dunia

Sejarah ekonomi pembangunan dimulai pada tahun 1940-an dan 1950-an, saat pemerintah di berbagai negara memulai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pembangunan ekonomi. Pada saat itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi dengan meningkatkan investasi, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 1950-an, pemerintah diberbagai negara mulai mengimplementasikan kebijakan ekonom yang dikenal sebagai "pembangunan import-substitusi" untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Kebijakan ini meliputi peningkatan tarif, subsidi, dan pembatasan impor produksi domestik.

Pada tahun 1960-an, pemerintah diberbagai negara mulai mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai "pembangunan ekspor". Kebijakan ini meliputi peningkatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan ekspor.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pemerintah diberbagai negara mulai mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai "pembangunan berkelanjutan" untuk menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

Pada tahun 1990-an dan 2000-an, pemerintah diberbagai negara mulai mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai "pembangunan kompetitif" untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Pangestuty & Prasetyia, 2021).

Sejarah ekonomi pembangunan berlangsung terus hingga saat ini, di mana pemerintah di berbagai negara terus mencari cara

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inovatif dan berkeadilan sosial.

1.5 Sejarah Ekonomi Pembangunan Di Indonesia

Sejarah ekonomi pembangunan di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Orde Lama (1945-1965), saat pemerintah memulai usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai "pembangunan import-substitusi". Kebijakan ini meliputi peningkatan tarif, subsidi, dan pembatasan impor untuk meningkatkan produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintah Indonesia juga memperkenalkan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai "pembangunan ekspor", yang meliputi peningkatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan ekspor.

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1965-1998), pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan ekonomi "pembangunan import-substitusi" dan "pembangunan ekspor", tetapi juga mulai mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai "pembangunan berkelanjutan" untuk menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

Setelah Reformasi 1998, pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai "pembangunan kompetitif" untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia juga mulai meningkatkan kebijakan privatisasi dan liberalisasi ekonomi, serta meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi (Pangestuty & Prasetyia, 2021).

Sejarah ekonomi pembangunan di Indonesia terus berlangsung hingga saat ini, dengan pemerintah terus mencari cara

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan sosial.

Selanjutnya, keadaan ekonomi pembangunan di Indonesia saat ini cukup stabil, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat inflasi yang terkendali. Pemerintah saat ini mengejar target pertumbuhan ekonomi sekitar 5-5,5% per tahun.

Indonesia juga memiliki tingkat pengangguran yang rendah dan tingkat pendapatan per kapita yang meningkat. Selain itu, pemerintah saat ini juga sedang berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan kualitas akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih dan transportasi untuk masyarakat.

Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, seperti masalah ketimpangan ekonomi, korupsi, dan masalah lingkungan. Pemerintah saat ini sedang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut melalui berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan.

1.6 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Pembangunan di Indonesia

Pandemia COVID-19 telah memiliki dampak yang cukup besar pada keadaan ekonomi pembangunan di Indonesia. Pertama, pandemi ini menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup besar karena pembatasan sosial dan perintah *lock down* yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi penyebaran virus. Ini menyebabkan banyak perusahaan dan industri yang mengalami kebangkrutan dan pekerja yang menganggur.

Kedua, pandemi ini juga menyebabkan defisit anggaran yang cukup besar karena pemerintah harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengatasi pandemi dan menyokong sektor-sektor yang terdampak.

Ketiga, pandemi ini juga menyebabkan kesulitan dalam hal perdagangan dan investasi internasional karena pembatasan perjalanan dan penghentian aktivitas ekonomi diberbagai negara.

Namun, Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak pandemi ini, seperti program pemulihan ekonomi, stimulus fiskal dan moneter, dan dukungan untuk sektor-sektor yang terdampak. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan negara-negara lain dalam upaya untuk mengatasi dampak pandemi.

1.7 Konsep Ekonomi Pembangunan di Dunia dan di Indonesia

Konsep ekonomi pembangunan dunia merujuk pada proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan negara-negara di dunia. Konsep ini mencakup berbagai aspek ekonomi, seperti peningkatan produktivitas, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam konsep ekonomi pembangunan dunia, diantaranya:

- a. Pembangunan Klasik, pendekatan ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- b. Pembangunan Humanis, pendekatan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- c. Pembangunan Sustain, pendekatan ini menitikberatkan pada pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mengutamakan peningkatan kualitas hidup masyarakat

tanpa merusak lingkungan dan sumber daya alam (Rapanna & Sukarno, 2017).

Secara umum, konsep ekonomi pembangunan dunia berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan negara-negara di dunia dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selanjutnya, konsep ekonomi pembangunan di Indonesia memiliki beberapa komponen utama, diantaranya:

- a. Pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi dengan meningkatkan investasi, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Pemerataan pembangunan, di mana pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah tertinggal.
- c. Pembangunan berkelanjutan, di mana pemerintah berusaha untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya alam, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- d. Pembangunan kekuatan ekonomi, di mana pemerintah berusaha untuk meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global (Rapanna & Sukarno, 2017).

Secara umum, konsep ekonomi pembangunan di Indonesia berfokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi, pemerataan pembangunan, stabilitas makroekonomi,

pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kekuatan ekonomi.

1.8 Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan

Ruang lingkup ekonomi pembangunan meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan negara. Beberapa aspek tersebut diantaranya:

- a. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya.
- b. Pembangunan sektor industri, termasuk pembangunan industri manufaktur, pertambangan dan pariwisata.
- c. Pembangunan sektor pertanian dan perikanan, termasuk peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan.
- d. Pembangunan sektor keuangan dan perbankan, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
- e. Pembangunan sektor pariwisata dan jasa-jasa lainnya, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pariwisata dan jasa-jasa lainnya.
- f. Pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
- g. Pembangunan sektor energi dan sumber daya alam, termasuk peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan energi.
- h. Pembangunan sektor perumahan dan pemukiman, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan berkualitas.
- i. Pembangunan sektor lingkungan hidup, termasuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan lingkungan (Pangestuty & Prasetyia, 2021).

Secara umum ruang lingkup ekonomi pembangunan meliputi berbagai sektor yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan negara.

Tujuan ekonomi pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan nasional. Beberapa tujuan ekonomi pembangunan yang umum dikembangkan meliputi:

- a. Peningkatan produktivitas, berfokus pada perbaikan kualitas dan efisiensi dalam produksi barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas produksi.
- b. Peningkatan pendapatan nasional, berfokus pada peningkatan pendapatan nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pemerataan pendapatan, berfokus pada pemerataan pendapatan antara segmen masyarakat yang berbeda, seperti antara kota dan desa, atau antara golongan masyarakat yang berbeda.
- d. Pengurangan kemiskinan, berfokus pada pengurangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- e. Peningkatan kualitas hidup, berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan umum lainnya.
- f. Pengembangan lingkungan hidup dan pengurangan emisi CO₂.
- g. Pengembangan ekonomi digital dan inovasi.
- h. Sosial ekonomi inklusif dengan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat termasuk golongan marginal (Rapanna & Sukarno, 2017).

Terdapat beberapa masalah ekonomi pembangunan di Indonesia, diantaranya:

- a. Infrastruktur di Indonesia masih kurang baik seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara yang kurang memadai,

yang membuat biaya transportasi tinggi dan menghambat arus barang dan jasa.

- b. Kualitas SDM di Indonesia masih kurang baik, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, yang menghambat produktivitas dan kompetitifitas.
- c. Indonesia sangat tergantung pada sektor pertambangan dan migas sebagai sumber devisa utama. Hal ini menyebabkan perekonomian sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
- d. Inflasi di Indonesia cenderung tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, yang menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan pribadi.
- e. Masih ada kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang cukup besar dalam masyarakat Indonesia.

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi pembangunan di Indonesia, meliputi:

- a. Pemerintah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara untuk menurunkan biaya transportasi dan meningkatkan arus barang dan jasa.
- b. Pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
- c. Pemerintah harus meningkatkan diversifikasi ekonomi dengan meningkatkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, manufaktur, dan pertanian.
- d. Pemerintah harus menstabilkan ekonomi melalui pengendalian inflasi dan pengelolaan kebijakan moneter yang tepat.

- e. Pemerintah harus meningkatkan pemerataan pendapatan dengan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat termasuk golongan marginal.
- f. Pembangunan lingkungan hidup dan pengurangan emisi CO₂ (Hasan *et al.*, 2020).

Berikut Ekonomi Pembangunan yang ideal menurut para ahli yang dianggap penting, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kemiskinan.
- b. Ekonomi pembangunan yang ideal harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial.
- c. Masyarakat harus diikutsertakan dalam proses pembangunan dan memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi.
- d. Ekonomi pembangunan yang ideal harus didukung oleh stabilitas politik dan hukum yang kuat.
- e. Ekonomi pembangunan yang ideal harus mendorong pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan perlindungan lingkungan.
- f. Ekonomi pembangunan yang ideal harus memiliki sektor ekonomi yang beragam dan tidak tergantung pada satu sektor saja.
- g. Ekonomi pembangunan yang ideal harus memiliki infrastruktur yang baik, seperti jalan, transportasi dan jaringan listrik yang dapat mendukung pembangunan ekonomi.

Mempelajari ekonomi pembangunan penting karena dapat membantu dalam memahami proses dan masalah yang terkait dengan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah.

Beberapa alasan lain mengapa harus mempelajari ekonomi pembangunan, adalah:

- a. Membantu kita dalam memahami perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi.
- b. Membantu dalam memahami masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara atau daerah, seperti ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan.
- c. Membantu dalam memahami solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ekonomi, seperti program pemerintah dan kebijakan ekonomi.
- d. Membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial.
- e. Membantu dalam memahami peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi seperti peran dalam pengaturan pasar dan pengelolaan sumber daya ekonomi.
- f. Membantu dalam memahami peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, seperti peran dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
- g. Membantu dalam memahami masalah global yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara, seperti perdagangan global dan perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M., Alim, A. Muh. S., Alfiani, A. S. M., Sachrir, Muh. I., Shafar, Muh. R., Hanim, N. F., Arafah, S., & Audia, S. R. 2020. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Media Sains Indonesia.
- Machfudz, M. 2016. *Teori Ekonomi Makro*. UIN-Maliki Press.
- Pangestuty, F. W., & Prasetyia, F. 2021. *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teoritis dan Studi Kasus*. UB Press.
- Rapanna, P., & Sukarno, Z. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. CV. Sah Media.
- Suryono, A. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. UB Press.

BAB 2

TUJUAN DAN MANFAAT EKONOMI PEMBANGUNAN

Oleh Fitri S. Kasim

2.1 Pendahuluan

Sebuah sub bidang ekonomi yang disebut "ekonomi pembangunan" berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan warga negara mereka. Ekonomi pembangunan melihat isu-isu ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara maju dan negara berkembang untuk mencapai pembangunan ekonomi dan memberikan solusi dan pendekatan untuk mengatasinya. Sebagai contoh, ketimpangan pembangunan merupakan masalah yang terus berlanjut dan menjadi penghalang utama bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ini adalah masalah yang terus berlanjut yang terus menghambat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi diimplementasikan dengan menggunakan temuan-temuan dari bidang ilmu ekonomi pembangunan.

Karena pentingnya peran ekonomi pembangunan sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan ekonomi, ekonomi pembangunan telah lama menjadi bidang yang menarik untuk dipelajari, baik dari sisi keilmuan maupun implementasi kebijakan. Setiap pertumbuhan ekonomi diantisipasi untuk mendorong pembangunan ekonomi, yang didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan negara atau pendapatan per kapita masyarakat (Sudarmanto *et al.*, 2022).

Menurut (Todaro and Stephen C Smith., 2014) pembangunan ekonomi adalah proses beragam yang mencakup

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, penurunan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan, serta perubahan struktural, sikap dan kelembagaan.

2.2 Paradigma Pembangunan Ekonomi

Dalam pemahaman ekonomi tradisional tentang pembangunan ekonomi bahwa peningkatan pendapatan dipandang sebagai kemajuan ekonomi dalam suatu negara. Ini adalah jebakan paradigma karena pembangunan ekonomi tidak akan berjalan seperti diharapkan jika pendapatan satu-satunya indikator yang dipertimbangkan. Karena peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Hal ini umum terjadi di banyak negara miskin.

Pembangunan ekonomi tidak melulu perihal meningkatkan penambahan output atau memperbaiki system dalam ekonomi, tetapi juga dapat memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan lebih banyak pilihan. Hal ini menyiratkan bahwa akan ada lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan peluang untuk memilih kesenangan sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat membantu menutup kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju.

2.2.1 Paradigma Tradisional

Pada awalnya, konsep pembangunan identik sebagai pertumbuhan atau *“development with growth”*. Namun, setelah itu istilah ini tidak lagi sebanding karena penambahan *“development with change”* mengubah konsep aslinya. Arthur Lewis membuat perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan dalam bukunya teori pertumbuhan ekonomi (*The Theory of Economic Growth*). Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang melibatkan akumulasi modal, adalah tujuan utama pembangunan ekonomi. Nilai tambah yang lebih besar akan menghasilkan usaha-

usaha baru seiring dengan akumulasi modal. Sulit untuk menerapkan konsep ini di negara berkembang karena mayoritas dari mereka adalah negara miskin dan sulit mengumpulkan modal. Negara-negara berkembang dapat mencari investasi luar negeri atau pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan modal mereka (Amalia *et al.*, 2022).

Terbukti dengan meningkatnya polutan, polusi, dan kerusakan hutan, paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan telah berkontribusi pada sejumlah masalah termasuk degradasi lingkungan. Ketika model pembangunan lebih mengutamakan usaha padat modal daripada padat karya, maka pengangguran akan meningkat dan masyarakat miskin akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ada juga dampak lainnya, seperti meningkatnya kesenjangan (ketimpangan) pendapatan. Kesenjangan ini disebabkan oleh “kue pembangunan” yang tidak merata, atau dengan kata lain memiskinkan orang miskin karena yang hanya menikmati pembangunan hanyalah oleh pemilik modal atau orang kaya.

Hingga saat ini, pembangunan belum mampu memberikan *tricke down effect*, tetapi justru memunculkan isu-isu baru yang serius seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Teori *tricke down effect* diyakini tidak efektif. Hanya beberapa lokasi atau kelompok saja yang menjadi focus pembangunan, sehingga lapisan masyarakat lainnya tidak dapat merasakan manfaatnya.

2.2.2 Paradigma Baru

Pada akhir tahun 1960-an, beberapa negara berkembang menemukan bahwa pembangunan dan pertumbuhan bukanlah hal yang bertentangan. Pertumbuhan ekonomi memang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk pembangunan. Pertumbuhan hanya mencerminkan kenaikan output barang dan jasa suatu negara, sedangkan pembangunan mencakup lebih dari sekedar mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

sekarang lebih menekankan pada kualitas proses pembangunan daripada pertumbuhan sebagai tujuan utama. Proses pembangunan ekonomi dipandang memiliki berbagai aspek, kebijakan ekonomi dan non-ekonomi yang menyeluruh.

Pembangunan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan ke atas dari keseluruhan sistem social (Myrdal, 1974). Ada beberapa perspektif yang menekankan pada pertumbuhan dan perubahan, khususnya perubahan dalam institusi dan nilai-nilai. Hal ini didukung oleh argument bahwa pertimbangan kualitatif jauh lebih penting daripada kemajuan ekonomi. Tidak hanya pendapatan per kapita yang harus meningkat dari waktu ke waktu di negara-negara berkembang, tetapi kesetaraan pendapatan dan pengurangan kemiskinan juga merupakan factor yang sangat penting.

Myrdal, Dudley dan Seers mengamati bahwa isu-isu social seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan sering kali mendapat perhatian dalam konteks pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong pembangunan harus berfokus pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesetaraan penghasilan.

Aspek kualitatif dari pembangunan ekonomi memerlukan penyesuaian structural dasar seperti menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan serta meningkatkan standar hidup dan berinvestasi dalam Pendidikan dan Kesehatan. Ekonomi yang lemah, Sebagian besar terfokus pada sektor pertanian dapat diubah menjadi ekonomi yang berbasis pada kehidupan perkotaan yang berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berhasil ditandai dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang merata. Jadi, sangat mungkin untuk membedakan dengan jelas antara konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Blackman, Mathis and Nelson, 2001).

2.2.3 Pembangunan dengan Pendekatan Kapabilitas (kemampuan)

Amartya Sen, yang memenangkan Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1998, melakukan pendekatan terhadap pembangunan dari perspektif kemampuan. Ia menyatakan bahwa seseorang dapat mengetahui apakah seseorang miskin atau tidak dengan melihat *capability to function*. Pendapatan saja tidak mendefinisikan orang tersebut miskin; namun deprivasi kapabilitas atau hilangnya kemampuanlah yang menentukan. Hilangnya kemampuan tidak diragukan lagi berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih buruk dari yang diharapkan. Oleh karena itu, pembangunan haruslah menghasilkan realisasi dari kemampuan-kemampuan tersebut. Sen menyarankan menggunakan metode ini untuk memahami kualitas hidup dengan cara yang lebih manusiawi (Sen, 1993).

Menurut Sen, tujuan utama pembangunan bukanlah pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama pembangunan seharusnya adalah meningkatkan kebebasan dan kualitas hidup. Definisi kemiskinan tidak bergantung pada utilitas atau uang seperti yang selama ini berlaku. Kesejahteraan mencakup barang yang dikonsumsi dan keuntungan yang didapat oleh konsumen.

Kebijakan pembangunan memaksimalkan kesejahteraan sering kali lebih diutamakan daripada prinsip-prinsip penting lainnya seperti hak dan kebebasan. Dalam hal pembangunan, menjaga hak dan kebebasan harus didahulukan daripada kesejahteraan ekonomi. Jaminan kebebasan akan menguntungkan bagi perekonomian. Dibandingkan dengan negara-negara demokratis menurut Sen negara-negara otoriter kurang mampu menjamin kesejahteraan penduduknya (Sen, 1993).

Sen mendefinisikan kapabilitas sebagai kemampuan seseorang untuk memutuskan suatu tindakan berdasarkan sifat-sifat pribadi dan kendali atas sumber daya. Teori Sen berdampak pada para ekonom yang meneliti pembangunan, yang

mengarahkan mereka untuk menekankan nilai inklusi social, pemberdayaan, Kesehatan dan Pendidikan. Menurut para ahli, negara-negara berpenghasilan tinggi dengan standar Kesehatan dan Pendidikan rendah diklasifikasikan sebagai negara yang tumbuh tapi tidak berkembang. Factor-faktor ini mengarah pada kesimpulan bahwa pembangunan akan lebih bermakna jika mengadopsi perspektif kapabilitas yang mengukur dari sisi kualitas hidup manusia (Sen, 1993).

2.3 Ekonomi Pembangunan, Pembangunan Ekonomi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi pembangunan adalah subbidang ekonomi yang berfokus pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Ekonomi pembangunan juga membahas tentang masalah-masalah yang terjadi di negara berkembang serta membuat rekomendasi untuk solusi dan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut dan mencapai yang namanya pembangunan ekonomi. Jadi, ekonomi pembangunan adalah studi yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi.

Disiplin ilmu ekonomi pembangunan berbeda dengan ilmu ekonomi lainnya seperti ekonomi mikro dan makro. Perbedaan utamanya adalah bahwa sebagian besar ekonom saat ini tidak menggunakan pola analisis yang mapan untuk ekonomi pembangunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti (Mulyani, 2017):

1. Kompleksitas masalah yang berkaitan dengan pembangunan ;
2. Baik faktor yang mempengaruhi pembangunan maupun yang dipengaruhi oleh pembangunan sangatlah banyak. Oleh karena itu, ekonomi pembangunan mencakup berbagai subjek yang luas, migrasi, pertanian, industri,

- pembentukan modal, distribusi pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan isu-isu lainnya ;
3. Kurangnya teori-teori pembangunan yang dapat membangun kerangka kerja mendasar untuk menguraikan arah pembangunan ekonomi.

Istilah ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi sering kali digunakan secara bergantian. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Pembangunan ekonomi atau secara sederhana perkembangan ekonomi, adalah proses di mana pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang dan juga mengubah prinsip-prinsip dasar masyarakat. Pembangunan ekonomi, menurut (Irawan and Suparmoko, 2014) adalah upaya untuk meningkatkan standar hidup suatu negara, yang sering diukur dari tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita.

Penting pula untuk kita memahami perbedaan antara pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi, agar tidak mengalami kekeliruan dalam mengartikannya. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan pendapatan nasional, terlepas dari apakah kenaikan ini melebihi atau kurang dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah struktur ekonomi telah berubah. Sedangkan pembangunan ekonomi digambarkan sebagai kenaikan pendapatan per kapita dalam suatu masyarakat serta transformasi sistem ekonomi dari sistem tradisional menjadi sistem modern. ketika sebuah negara memproduksi lebih banyak, maka negara tersebut dianggap mengalami pertumbuhan ekonomi, dan ketika modernisasi (perubahan dalam institusi dan pengetahuan teknologi) dan peningkatan output secara bersamaan. Selain itu, pembangunan ekonomi dianggap terjadi ketika pertambahan populasi pada tahun tertentu melebihi pertumbuhan pendapatan nasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan

pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi.

2.4 Tujuan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah salah satu bidang kehidupan yang selalu dikembangkan dalam di tingkat seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena kemajuan ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan seluruh warga negara suatu bangsa merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Negara akan menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung perekonomian untuk memenuhi tujuan ini. Sedangkan menurut (Irawan and Suparmoko, 2014) tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.

Sejak meraih kemerdekaannya, Indonesia telah berusaha untuk mengembangkan ekonominya. Kebijakan pembangunan ekonomi selalu berubah setiap kali pemerintahan berganti. Tujuan nasional negara kita, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, terarah, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Selain itu, tujuan pembangunan nasional dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. **Tujuan jangka pendek.** Dalam rangka memberikan dasar yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya, pembangunan nasional jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan standar hidup, sumber daya manusia, dan

- kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan merata.
2. **Tujuan jangka panjang** adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila yang merata material dan spiritual, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, dalam suasana pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Tujuan pembangunan ekonomi menurut (Todaro and Stephen C Smith, 2014) yaitu:

- a. Berbagai pilihan ekonomi dan sosial harus tersedia bagi masyarakat sehingga mereka dapat hidup bebas dari perbudakan dan mandiri;
- b. Meningkatkan standar hidup, kualitas pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan jumlah ketersediaan dan jalur distribusi komoditas penting yang beragam.

2.5 Manfaat Pembangunan Ekonomi

Output atau kekayaan masyarakat atau ekonomi meningkat dengan adanya pembangunan ekonomi. Selain itu, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi. Ketika ekonomi berkembang, lebih banyak pilihan tersedia bagi masyarakat. Sangatlah sulit untuk menghubungkan antara kebahagiaan dan kekayaan, tetapi kesejahteraan bergantung pada perspektif seseorang tentang keberadaan manusia (Irawan and Suparmoko, 2014).

Orang yang kaya tidak selalu lebih bahagia daripada mereka yang kurang beruntung. Jika kekayaan seseorang meningkat, orang tersebut belum tentu merasa lebih beruntung. Kekayaan akan menambah kebahagiaan jika

kekayaan itu menambah alat-alat pemuas kebutuhan dan bukannya menambah jumlah kebutuhan. kekayaan juga dapat menurunkan kebahagiaan jika kekayaan tersebut membuatnya khawatir tentang kekayaan mereka saat ini dan juga bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka di masa depan. Misalnya, mereka harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menghemat energi, pemeliharaan lingkungan, menghemat sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan isu-isu lainnya (Irawan and Suparmoko, 2014).

Pembangunan ekonomi memungkinkan manusia untuk memiliki lebih banyak kendali atas lingkungan mereka dan lebih banyak fleksibilitas untuk terlibat dalam perilaku tertentu. Kemajuan ekonomi memungkinkan kebebasan untuk memilih dari pilihan kesenangan yang lebih luas.

Menurut (Mulyani, 2017) pembangunan ekonomi suatu negara memiliki sejumlah manfaat bagi masyarakat dan negara. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pembangunan ekonomi:

1. Kekayaan output ekonomi atau masyarakat akan meningkat;
2. Memberi lebih banyak kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan dari sumber daya yang tersedia;
3. Pembangunan ekonomi dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat;
4. Ketika pembangunan ekonomi terjadi, lebih banyak layanan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan tersedia;
5. Pertumbuhan ekonomi akan mempersempit kesenjangan antara negara terbelakang dan negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. *et al.* 2022. *Ekonomi Pembangunan*. Edited by R. Kusumaningrum. Bandung, Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Blackman, A., Mathis, M. and Nelson, P. 2001. 'The Greening of Development Economics: A Survey', *Discussion Paper*, (01–08), pp. 1–43. Available at: <http://www.rff.org>.
- Irawan and Suparmoko, M. 2014. *Ekonomika Pembangunan*. Keenam. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mulyani, E. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. Pertama, *Angewandte Chemie International Edition*. Pertama. Edited by S. Amalia. Yogyakarta: UNY Press.
- Myrdal, G. 1974. 'What Is Development? Author (s): Gunnar Myrdal Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/4224356> What Is Development?', *Journal of Economic History*, 8(4), pp. 729–736.
- Sen, A. 1993. '2 Functionings , Capability , and Values 3 Value-Objects and Evaluative Spaces', *The quality of life*, pp. 31–41.
- Sudarmanto, E. *et al.* 2022. *Ekonomi Pembangunan (Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah)*. Pertama, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Pertama. Edited by D.P. Sari and A. Yanto. Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Todaro, M.P. and Stephen C Smith. 2014. *Economic-Development-11Th-Todaro*.

BAB 3

HAKIKAT DAN MAKNA PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Suharno

3.1 Pendahuluan

Pembangunan Ekonomi adalah program, kebijakan atau kegiatan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Apa arti pembangunan ekonomi secara umum akan bergantung pada komunitas tempat masyarakat tersebut berada. Setiap komunitas memiliki peluang, tantangan, dan prioritasnya sendiri. Perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat harus menyertakan orang-orang yang tinggal dan bekerja di masyarakat.

Hakikat dan makna pembangunan ekonomi telah dilanda serangkaian perdebatan. Pertama, ada perdebatan antara menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan secara luas, memformulasikan kebijakan, menghasilkan pengetahuan tentang keberhasilan dan kegagalan pembangunan tertentu. Kedua, ada perdebatan antara menghasilkan pengetahuan pembangunan sebagai proses struktural transformasi (beberapa cara mereplikasi transisi ke modernitas) dan menghasilkan pengetahuan tentang masalah-masalah tertentu dan isu-isu yang terkait dengan kurangnya pembangunan (akses air bersih, kematian ibu melahirkan, *stunting* dan sebagainya). Ketiga, ada perdebatan antara ekonomi sebagai disiplin utama di mana pembangunan dipelajari, dan kontribusi disiplin ilmu lainnya. Bab ini diakhiri dengan menyarankan bahwa baru-baru ini bertahun-tahun

beberapa dari perdebatan ini telah dikenali dan hal ini membuka kemungkinan untuk mengarahkan jalan menyelesaikannya.

Studi yang sekarang kita sebut studi pembangunan, secara simbolis dalam karya Adam Smith. Sebagai lembaga dan bidang studi akademik khusus, yang muncul pada periode setelah Perang Dunia II di bawah naungan hegemoni Amerika Serikat dan berkembang secara dramatis dengan jumlah negara-negara berkembang meningkat, terutama dari tahun 1960-an. Dalam banyak hal studi pembangunan telah sukses luar biasa. Ini telah menjadi komponen vital dari pekerjaan bilateral dan badan-badan pembangunan multilateral, dipimpin oleh badan penelitian Bank Dunia (World Bank, 2010). Sejumlah besar pusat penelitian spesialis telah ditetapkan untuk mempelajari proses dan masalah pembangunan, dan telah menjadi bidang studi akademik yang mapan, dengan jurnal profesional, konferensi, dan Asosiasi profesional. Ini juga menjadi bidang studi yang semakin populer, siswa dengan banyak program gelar, terutama di tingkat pascasarjana. Studi tentang pembangunan juga secara dramatis memperluas cakupannya bersamaan dengan perluasan agenda lembaga pembangunan itu sendiri. Pada periode kontemporer itu mencakup berbagai macam hal-hal dari kebijakan perdagangan hingga konservasi laut, dan dari regulasi perbankan hingga kesehatan.

Besarnya ukuran dan variasi studi pembangunan membuat segala jenis ringkasan sederhana menjadi hal yang mustahil. Ada terlalu banyak masalah, terlalu banyak institusi yang terlibat, dan terlalu banyak pendekatan bagi mereka untuk dibuat sketsa. Tetapi harus mengamati secara keseluruhan dan bahkan penilaian studi pembangunan dimungkinkan dengan melihatnya pada tingkat abstraksi yang agak lebih tinggi. Pendekatan yang diambil di sini adalah bahwa studi pembangunan telah ditandai dengan tiga perdebatan langsung dari asal-usulnya pada periode pasca-perang. Pertama, ada perdebatan antara menghasilkan pengetahuan yang

dapat diterapkan secara luas dan formula kebijakan, dan menghasilkan pengetahuan tentang keberhasilan dan kegagalan pembangunan tertentu. Kedua, ada perdebatan antara menghasilkan pengetahuan pembangunan sebagai proses struktural transformasi (yang dalam beberapa cara mereplikasi transisi ke modernitas dengan semua yang tersirat industrialisasi, urbanisasi, dan seterusnya) dan menghasilkan pengetahuan masalah khusus dan masalah yang terkait dengan kurangnya pembangunan (akses ke air bersih, malnutrisi, kematian ibu, *stunting* dan sebagainya). Ketiga, ada perdebatan antara ekonomi sebagai disiplin utama dimana perkembangan dipelajari, dan kontribusi disiplin akademik lainnya (politik, studi wilayah, antropologi). Dalam banyak hal perdebatan ini terjadi sangat produktif, tetapi juga sangat sulit untuk diatasi, beserta tantangan yang dihadapi.

3.2 Riwayat Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang membahas aspek ekonomi dari proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Fokusnya tidak hanya pada metode mempromosikan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural tetapi juga pada peningkatan potensi massa penduduk, misalnya melalui kesehatan, pendidikan dan kondisi tempat kerja, baik melalui jalur publik maupun swasta (Bell, 1987).

Ekonomi pembangunan melibatkan penciptaan teori dan metode yang membantu dalam penentuan kebijakan dan praktik dan dapat diterapkan baik di tingkat domestik maupun internasional. Ini mungkin melibatkan restrukturisasi insentif pasar atau menggunakan metode matematis seperti optimasi antar waktu untuk analisis proyek, atau mungkin melibatkan campuran metode kuantitatif dan kualitatif. Topik umum meliputi teori

pertumbuhan, kemiskinan dan ketimpangan, modal manusia, dan institusi (McKenzie dan Paffhausen, 2017).

Tidak seperti di banyak bidang ekonomi lainnya, pendekatan dalam ekonomi pembangunan dapat menggabungkan faktor sosial dan politik untuk menyusun rencana tertentu. Juga tidak seperti banyak bidang ekonomi lainnya, tidak ada konsensus tentang apa yang harus dipahami siswa. Pendekatan yang berbeda dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konvergensi atau non-konvergensi ekonomi di seluruh rumah tangga, wilayah, dan negara (Todaro, 2006).

Menurut Adam Smith dalam buku berjudul, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, memberikan pertanyaan mendasar dari studi tentang apa yang sekarang kita sebut pengembangan (Smith cenderung menggunakan istilah perbaikan): seperti apa tampilan dikembangkan, apa yang membuatnya berbeda dari kebalikannya, dan bagaimana negara mencapainya?. Kondisi itu sebagai ambisi intelektual dari pencerahan Skotlandia membentuk narasi besar dari abad ke-19 dan awal abad ke-20, baik dalam bentuk catatan Marx tentang perkembangan kapitalisme atau sosiologi Weber dan lain-lain yang bersangkutan sendiri dengan asal-usul dan karakteristik modernitas. Tapi kajian pembangunan saja muncul sebagai bidang studi yang dilembagakan dan diprofesionalkan pada periode setelah Dunia Perang II. Kajian pembangunan di periode ini ditentukan oleh upaya untuk memahami proses perkembangan dunia yang maju dalam waktu yang lebih singkat, dan yang terpenting untuk memberikan pengetahuan yang dapat menghasilkan formula kebijakan untuk digunakan oleh pemerintah negara berkembang dan lembaga pembangunan.

Kondisi ini menempatkan asal-usul studi modern pembangunan di level internasional tertentu dan konteks kelembagaan. Secara internasional ia muncul bersamaan dengan pelembagaan proyek pembangunan internasional itu sendiri dalam

politik internasional, pendirian badan pembangunan bilateral dan multilateral dan pemberian bantuan luar negeri (Williams, 2011). Pada gilirannya ini secara signifikan merupakan hasil dari munculnya Amerika Serikat sebagai hegemonik negara dalam politik internasional. Pembangunan memainkan peran penting dalam tatanan hegemonik didirikan oleh Amerika Serikat dalam tiga cara terkait (Gilman, 2003). Pertama, pembuat kebijakan Amerika Serikat mengakui keutuhan untuk mengintegrasikan negara-negara berkembang ke dalam politik multilateral dan tatanan ekonomi yang mereka ciptakan. Dari empat puluh empat negara yang hadir di Konferensi Bretton Woods tahun 1944, sembilan belas orang berasal dari Amerika Latin, dan mereka umumnya antusias mendukung kesepakatan yang dicapai di konferensi (Helleiner, 2006). Kedua, tujuan yang luas hegemoni Amerika Serikat dimajukan melalui pembangunan negara-negara berkembang. Truman memasukkannya ke dalam pidatonya yang terkenal *four point*. Semua negara akan sangat mendapat manfaat dari program konstruktif untuk penggunaan yang lebih baik dari sumber daya manusia dan dunia sumber daya alam. Pembangunan ekonomi memperluas peluang ekonomi bagi Amerika Serikat dan mengurangi kemungkinan perang. Seperti yang dikatakan Cordell Hull, jika negara-negara mendapatkan aliran perdagangan bebas, sehingga satu negara tidak akan cemburu terhadap yang lain dan standar hidup semua negara mungkin bangkit sehingga menghilangkan ketidakpuasan ekonomi yang melahirkan perang, maka akan memungkinkan memiliki peluang yang masuk akal untuk perdamaian abadi (Hull, 1948). Ketiga, pembangunan semakin memainkan peran penting dalam kompetisi Perang Dingin. Janji dari pembangunan adalah alternatif Amerika Serikat untuk menghalau komunisme dan praktik pemberian bantuan adalah dibentuk oleh logika kompetisi Perang Dingin. Dalam hal studi pembangunan ini berarti, seperti dicatat oleh Lucian Pye, bahwa meningkatnya minat akademis terhadap masalah-masalah

baru negara bagian lebih terinspirasi oleh peristiwa-peristiwa dunia daripada kemajuan lokal negara manapun (Pye, 1966). Dengan kata lain, studi pembangunan didorong sebanyak mungkin dari pihak Amerika Serikat untuk mengelola hubungannya dengan negara-negara berkembang secara murni minat akademik. Sebagian negara berkembang tumbuh pesat dengan proses dekolonisasi, sehingga kebutuhan ini meningkat, dan seiring berjalannya waktu studi pembangunan diperluas di negara-negara lain, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda yang juga perlu menemukan cara untuk mengatur hubungan mereka dengan bekas koloni mereka.

Kemunculan kajian pembangunan modern juga dibentuk oleh faktor-faktor terkait lainnya. Ini dapat melacak sebagian dari garis keturunannya pada munculnya keahlian kebijakan publik secara lebih umum dan perkembangan lebih khusus lagi dalam disiplin ilmu ekonomi. Di akhir abad kesembilan belas dan awal abad ke-20 para ahli memainkan peran yang semakin penting dalam kebijakan publik perdebatan, dan *new deal*, misalnya, dijiwai dengan pandangan sosial dan masalah ekonomi harus diselesaikan melalui penerapan ahli, pengetahuan ilmiah, dan sikap itu terbawa ke dalam studi pembangunan (Maier, 1978). Munculnya ekonomi sebagai disiplin akademis yang terpisah dan terspesialisasi juga dikaitkan dengan kenaikan keahlian kebijakan publik. Seperti disebutkan di atas, dalam banyak hal studi pembangunan telah sangat berhasil. Tetapi juga telah dilanda setidaknya tiga perdebatan, yang sementara mereka produktif di banyak hal dan cara, dan juga telah menciptakan serangkaian masalah intelektual dan praktis.

3.3 Perdebatan dan Hakikat Pembangunan Ekonomi

Perdebatan yang pertama adalah antara menghasilkan pengetahuan dan formula kebijakan umumnya berlaku untuk kelas negara maju, negara berkembang dan menghasilkan pengetahuan tentang keberhasilan dan kegagalan negara tertentu pada waktu tertentu. Ada sesuatu dari paradoks ini. Revolusi Keynesian dalam teori ekonomi memberikan suatu hal berisi prasyarat penting untuk munculnya ekonomi khusus yang didedikasikan untuk studi tentang pembangunan dengan menunjukkan bahwa keadaan ekonomi yang berbeda mungkin memerlukan berbagai macam kebijakan ekonomi. Keputusan ini terkait dengan apa yang dimiliki oleh Albert Hirschman (1981). Disebut klaim ekonomi mono sangat penting dalam mengukir ruang intelektual yang didedikasikan untuk kajian pembangunan secara khusus. Pembagian negara menjadi negara-negara yang berdasar pada ekonomi klasik yang tepat dan beberapa jenis lain dari teori ekonomi dan kebijakan yang sesuai juga dapat ditemukan. Lihat pemikiran seperti Rosenstain-Rodan, Gershenkron dan Harriss (Rosenstein-Rodan 1943; Gershenkron 1962; dan Harriss, 2002). Warisan ini menghasilkan dua masalah yang memunculkan perdebatan antara umum dan khusus. Pertanyaan pertama adalah tentang: mungkinkah negara-negara berkembang memiliki keadaan yang berbeda sehingga mereka membutuhkan jenis ekonomi yang berbeda, tetapi apakah mereka memiliki cukup banyak kesamaan sehingga generalisasi yang bermakna dapat ditarik tentang mereka, atau apakah semuanya sangat berbeda dari satu dengan lainnya bahwa generalisasi seperti itu mungkin sangat sulit?. Kedua, selalu ada klaim yang menolak bahwa negara berkembang itu relevan berbeda sehingga mereka memerlukan jenis ekonomi yang berbeda (Bauer, 1976, Bauer, 1984; dan Johnson, 1964). Meskipun pandangan ini marjinal selama tahun

1950-an dan 1960-an, pandangan ini muncul sangat kuat pada akhir 1970-an dan 1980-an.

Generasi pertama ekonom pembangunan menerima bahwa negara berkembang memang demikian berbeda dan kemudian mencoba menggeneralisasi tentang mereka, berfokus terutama pada masalah dan kemungkinan industrialisasi. Seperti yang dikatakan Hollis Chenery, pengembangan yang sukses di hampir semua negara telah ditandai dengan peningkatan pangsa manufaktur di total output (Chenery, 1979). Studi klasik semacam ini termasuk yang dilakukan oleh W. Arthur Lewis dan Albert Hirschman, dan dengan nada yang sedikit berbeda oleh Raul Prebisch. Bahwa dalam pertanian subsisten (atau tradisional) ada tingkat kekurangan yang tinggi penggunaan sumber daya dan produktivitas rendah, dan dengan demikian sangat sedikit surplus yang dihasilkan.

Mengingat hal ini, ada potensi besar pasokan tenaga kerja di sektor pertanian yang bisa pindah ke sektor industri (kapitalis) tanpa ada penurunan produksi pertanian (ada persediaan tenaga kerja yang tidak terbatas untuk sektor kapitalis). Upah di sektor industri akan tetap rendah (tertekan oleh pasokan tenaga kerja yang tidak terbatas) dan dengan demikian keuntungan akan bertambah dengan cepat di dalam sektor kapitalis, memberikan surplus yang dapat dikenakan pajak dan diinvestasikan. Dalam model dualis ini sektor industri akan menjadi elemen yang dinamis, menyedot tenaga kerja dari sektor pertanian subsisten yang stagnan (Lewis, 1954). Lewis menjelaskan model ini dirancang untuk membantu memahami masalah kontemporer di wilayah yang luas. Sementara catatan Hirschman berbeda, menekankan peran keterkaitan ke depan dan ke belakang dalam mendorong industrialisasi melalui proses kumulatif, itu juga jelas merupakan teori umum (Hirschman, 1958).

Pada akhir 1970-an jenis formula kebijakan yang mengikuti aliran ini, diserang sebagai akibat dari krisis ekonomi yang

berkembang yang mempengaruhi banyak negara berkembang, perlambatan ekonomi global yang lebih umum dan kebangkitan ekonomi neoklasik (Toye, 1987; dan Williams, 2011). Sebagai gantinya muncul jenis lain generalisasi berasal dari apa yang dilihat sebagai penerapan universal neoklasik teori ekonomi. Deepak Lal, salah satu pendukung paling terkenal dari posisi ini, berpendapat demikian. Saat ini ada banyak bukti empiris dari berbagai budaya dan iklim yang berbeda menunjukkan bahwa petani yang tidak berpendidikan bertindak secara ekonomi sebagai produsen dan konsumen (Lal, 1983). Dengan kata lain, ekonomi berkembang tidak berbeda dalam fundamentalnya ekonomi maju: mereka tentu saja lebih miskin, tetapi jenis teori ekonomi yang sama dan jenis kebijakan ekonomi yang sama diterapkan pada mereka seperti pada semua ekonomi.

Posisi ini mencirikan apa yang kemudian dikenal sebagai Konsensus Washington dan telah terus membentuk studi pembangunan dengan cara yang penting (Williamson, 1989). Asumsi rasionalitas ekonomi telah diperluas dan dielaborasi baik dalam New Ekonomi Politik dan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan Baru untuk pembangunan. Perluasan model aktor rasional ke politisi, birokrat, dan kelompok sosial lebih banyak secara umum, dan dalam melakukan hal itu mengacu pada catatan teoretis tentang proses pengambilan keputusan dan peran kelompok kepentingan dalam politik negara-negara barat (Krueger, 1974; Bates 1981; Olson, 1982). Yang terakhir menekankan peran yang mungkin dimainkan oleh institusi, yang dipahami secara luas, dalam membentuk keputusan pelaku ekonomi rasional, dan menunjukkan bahwa struktur kelembagaan bisa memainkan peran penting dalam menentukan jalur pembangunan suatu negara, terutama dengan mengubah biaya transaksi yang dihadapi agen ekonomi (North, 1990; Williamson, 1979).

Kedua pendekatan ini dilebur menjadi perhatian dengan tata pemerintahan yang baik yang muncul sampai akhir 1980-an dan memasuki 1990-an (Williams, 2008). Di Sini sekali lagi, pendekatan yang diambil adalah konsekuensi dari pemerintahan yang baik dan buruk digeneralisasikan, dan karenanya formula kebijakan dapat dirancang yang berlaku untuk sejumlah besar negara. Pembahasan lain yang sangat penting dalam studi pembangunan yang mengambil tujuan memproduksi pengetahuan yang dapat diterapkan secara umum adalah teori pertumbuhan ekonomi. Dorongan umum di balik ini adalah untuk mengembangkan dan kemudian menguji model teoretis yang dapat menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam tradisi analitis yang luas ini telah ada beberapa model yang berbeda. Model Harrod-Domar merupakan model yang penting pengaruh pada ekonom pembangunan awal, dan sampai batas tertentu Bank Dunia juga (Harrod, 1948; Domar, 1957). Berasal dari ekonomi Keynesian, pembahasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara perubahan investasi dan perubahan pendapatan nasional. Pada gilirannya model ini diubah dan dikritik oleh model pertumbuhan lainnya, termasuk Pertumbuhan Solow (neoklasik).

Model baru oleh Teori Pertumbuhan Endogen. Terkait dengan ini juga sejumlah besar pekerjaan statistik memiliki korelasi pertumbuhan ekonomi. Di sini sekali lagi, Idenya adalah untuk menentukan kontribusi faktor-faktor tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data set yang mencakup sejumlah besar negara (Kenny dan Williams, 2001; Purnomo et al, 2021). Asumsi yang mendasari teori pertumbuhan dan pekerjaan statistik semacam ini adalah bahwa ekonomi bekerja pada dasarnya dengan cara yang sama dan dengan demikian hal itu mungkin untuk ditemukan penyebab umum pertumbuhan yang berlaku untuk sejumlah besar negara bagian.

Bentuk-bentuk generalisasi ini selalu ditentang oleh studi-studi khusus keberhasilan dan kegagalan pembangunan yang telah menempatkan alasan keberhasilan dan kegagalan dalam kondisi dan keadaan khusus negara tertentu pada waktu tertentu. Yang paling contoh nyata di sini adalah kisah sukses Asia Timur. Banyak upaya telah dilakukan menangkap pengalaman negara-negara ini di bawah teori yang lebih umum. Misalnya, Bank Dunia dalam laporan Keajaiban Asia Timur, berpendapat bahwa pemerintah dalam hal ini negara melakukan intervensi selektif dalam ekonomi, sebagian besar keberhasilan negara-negara ini dapat diletakkan pada kebijakan ekonomi makro yang sehat, investasi swasta tingkat tinggi dan ekspor pertumbuhan (World Bank, 1993). Agak paradoks, beberapa tahun kemudian ada pendapat bahwa beberapa negara tersebut mengalami krisis keuangan karena mereka tidak adanya regulasi yang memadai atau hubungan yang tepat antara pemerintah dan sektor swasta (kroni kapitalisme) (Johnson, 1998). Tetapi ada juga studi tentang negara-negara ini yang menantang generalisasi semacam ini. Misalnya, studi tentang faktor penyebab keberhasilan perkembangan Korea Selatan telah mengidentifikasi: kolonialisme Jepang, reformasi tanah, tingkat melek huruf yang tinggi, nasionalisme, geografi, budaya Konfusianisme, dukungan Amerika Serikat dan perlindungan, investasi regional dan arus perdagangan, penindasan perpecahan sosial, keadaan tertentu dari ekonomi global, dan munculnya pada waktu tertentu di bawah rezim tertentu dari negara berkembang (Leftwich, 1995; Amsden, 1994; Belassa, 1988; Kholi, 1994; dan Wade, 1996). Semua negara berkembang memiliki spesifik mereka sendiri, berasal dari sejarah spesifik mereka sendiri, termasuk bentuk kolonialisme, susunan masyarakat (kekuatan sosial), bentuk spesialisasi ekonomi, tingkat kapasitas manusia, dan bentuk pemerintahan, untuk menyebutkan beberapa saja.

Masalahnya bukanlah bahwa beberapa negara tidak cocok dengan teori umum (tidak ada teori umum dan tidak ada

kesimpulan statistik yang dapat bekerja untuk semua negara dan para pendukungnya tidak memperdebatkannya). Kondisi ini adalah keberhasilan pembangunan (atau kegagalan) masing-masing negara bagian sebagai faktor kontingen tertentu, spesifik negara. Semakin kita tahu tentang individu negara dan faktor kontingen khusus mereka, semakin tidak masuk akal menjadi teori umum. Perubahan terakhir di sini adalah semakin banyak yang kita ketahui tentang kasus tertentu, semakin kecil kemungkinannya tampaknya pelajaran umum dapat diambil untuk negara bagian lain. Kegunaan dari perkembangan negara tidak dapat diragukan, tetapi pasti dapat diragukan apakah negara seperti itu mungkin masuk akal dibuat di negara-negara dengan sejarah dan karakteristik yang sangat berbeda. Jadi kita dibiarkan dengan perdebatan. Di satu sisi, kondisi terbelakang nampaknya seperti yang umum (banyak negara pernah mengalami ini) dengan ciri-ciri umum tertentu (kemiskinan, dominasi pertanian dan sebagainya), sehingga tampaknya memerlukan teori dan penjelasan umum untuk menjelaskannya dan untuk memberikan formula kebijakan untuk mengatasinya. Pada sisi lain, semakin banyak yang kita ketahui tentang masing-masing negara, semakin banyak kita menemukan kekhasan yang signifikan dan kontingensi yang membuat teori umum tampak tidak sesuai.

Perdebatan kedua adalah pada apa yang harus dihasilkan oleh pengetahuan tentang pembangunan ekonomi dan tujuan dari pembangunan ekonomi. Dalam diskusi tentang pembangunan, situasi keterbelakangan atau kurangnya pengembangan biasanya dipahami melibatkan dua komponen terkait. Pertama adalah pembangunan dalam pengertian yang luas: proses transformasi ekonomi dan sosial untuk sesuatu seperti modernitas Barat dengan semua yang diperlukan, atau setidaknya pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah serangkaian masalah khusus yang terkait dengan kekurangan, dari kekurangan gizi, kurangnya akses ke air bersih, *stunting* dan

tingkat kematian ibu yang tinggi, infrastruktur yang buruk, sistem keuangan yang dangkal dan belum seimbang, rendahnya literasi keuangan, dan ketimpangan akses ke jasa keuangan yang terjangkau. Hal inilah yang menghasilkan keragaman yang sangat besar dalam studi pembangunan, tetapi hubungan antara mengetahui sesuatu tentang proses pembangunan skala besar (atau bahkan penyebab ekonomi berkelanjutan tumbuh kembang) belum tentu sama dengan mengetahui cara mengatasi contoh gizi buruk pada anak, dan tentu saja kebalikannya juga demikian.

Pembangunan ekonomi sebagaimana diperhatikan mengalami transformasi besar-besaran, baik dalam bentuk industrialisasi maupun pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Usaha yang paling ambisius adalah teori modernisasi. Untuk teori modernisasi, pembangunan adalah transisi ke sesuatu seperti modernitas sebagaimana dibuktikan di negara-negara industri Barat dan tidak hanya disertai oleh perubahan ekonomi tetapi juga oleh sejumlah pergeseran terkait lainnya dalam karakter dan organisasi politik, penyebaran rasionalisasi, pertumbuhan teknologi, dan difusi norma-norma tertentu, kebiasaan dan sikap. Tekanan semacam ini pada transformasi skala besar yang menyertai transisi ke modernitas, dan yang dalam pandangan ini mendefinisikan proses pembangunan itu sendiri kontras dengan fokus pada masalah tertentu yang terkait dengan kurangnya pembangunan. Adanya perdebatan bahwa perubahan skala besar mungkin diperlukan, tetapi tidak cukup kondisi untuk perbaikan dari beberapa masalah lain. Klasik pada tahun 1970-an di sana adalah pengakuan yang semakin meningkat bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk meredakan kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan.

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat beberapa dekade telah terjadi disertai dengan maldistribusi pendapatan yang lebih besar di banyak negara berkembang, dan masalah paling parah terjadi di pedesaan (McNamara, 1973). Hal ini

menimbulkan kekhawatiran, antara lain, kebutuhan dasar manusia sebagai cara berpikir tentang masalah dan kemungkinan pengembangan (Streeton, 1981). Dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak tekanan telah diletakkan pada pengentasan masalah yang terkait dengan kurangnya pembangunan, pada umumnya terinspirasi bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) (Fukado-Parr, 2004).

Perdebatan ketiga, dalam rangka membahas arah masa depan penelitian pada pembangunan ekonomi, juga telah membuat beberapa poin penting tentang studi ekonomi pembangunan. Beberapa berpendapat bahwa banyak ekonom riset tidak memulai dengan kesenjangan pengetahuan utama yang dihadapi praktisi pembangunan melainkan mencari pertanyaan yang dapat mereka jawab dalam bidang atau *tools* yang saat ini disukai. Penekanan yang cukup besar diberikan pada validitas internal, tetapi validitas eksternal tidak ditangani dengan ketelitian yang sama (World Bank, 2010). Dengan kata lain, pendekatan pengembangan ekonom melalui teori dan disiplin metodologi yang mendominasi, dan nilai dari pekerjaan ini didefinisikan dalam hal istilah-istilah tertentu daripada apa yang dapat disumbangkan pada penyelesaian pembuatan kebijakan pembangunan. Kondisi ini merujuk ke arah mengenali suatu pekerjaan yang terkadang agak abstrak untuk dilakukan dalam disiplin ilmu ekonomi sehingga memerlukan pondasi yang kuat dan lebih banyak dalam apresiasi terhadap kompleksitas proses pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsden, A. 1994. Why isn't the whole world experimenting with the East Asian model to develop? Review of the East Asian Miracle. *World Development* 22, 4: 627–33.
- Bauer, P. 1976. *Dissent on Development: Studies and Debates in Development Economics*, London: Weidenfeld and Nicolson
- Bauer, P. 1984. *Reality and Rhetoric: Studies in the Economics of Development*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bates, R. 1981. *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies*, Berkeley: University of California Press
- Bell, Clive 1987. *Development Economics*, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 1, pp. 818, 825.
- Belassa, B. 1988. The Lessons of East Asian Development: An Overview. *Economic Development and Cultural Change*, 36, 3: 273–90
- Chenery, H. 1979. *Structural Change and Development Policy*, Oxford: Oxford University Press
- Domar, E. 1957. *Essays in the Theory of Economic Growth*, Oxford: Oxford University Press
- Fukado-Parr, S. 2004. Millennium Development Goals: Why They Matter. *Global Governance*, 10: 395–401.
- Gershenkron, A. 1962. *Economic Backwardness in Historical Perspective*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gilman, N. 2003. *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Harriss, J. 2002. The Case for Cross-disciplinary Approaches in International Development, *World Development* 30, 3: 487–96
- Harrod, R. 1948. *Towards a Dynamic Economics*, London: Macmillan.

- Helleiner, G. 2006. Reinterpreting Bretton Woods: International Development and the Neglected Origins of Embedded Liberalism. *Development and Change* 37, 5: 943–67
- Hirschman, A. 1958. *The Strategy of Economic Development*, New Haven: Yale University Press.
- Hirschman, A. 1981. The Rise and Decline of Development Economics. in Hirschman, A., *Essays in Trespassing: From Economics to Politics and Beyond*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hull, C. 1948. *The Memoirs of Cordell Hull*, New York: Macmillan.
- Johnson, H. 1964. *Money, Trade and Economic Growth: Survey Lectures in Economic Theory*, London: Unwin.
- Johnson, C. 1998. 'Economic Crisis in East Asia: The Clash of Capitalisms,' *Cambridge Journal of Economics* 22, 6: 653–61.
- Kenny, C. and D. Williams. 2001. 'What Do We Know about Economic Growth? or, Why Don't We Know Very Much?' *World Development* 29, 1: 1–22
- Kholi, A. 1994. Where Do High Growth Political Economies Come From? The Japanese Lineage of Korea's. Developmental State. *World Development* 22, 9: 1269–93
- Krueger, A. 1974. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. *American Economic Review* 64, 3: 291–303.
- Lal, D. 1983. *The Poverty of 'Development Economics'*, London: IEA
- Lewis, W. 1954. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*, 22: 139–91
- Leftwich, A. 1995. Bringing Politics Back In: Towards a Model of the Developmental State. *Journal of Development Studies*, 31, 3: 400–27

- Maier, C. 1978. The Politics of Productivity: Foundations of American International Economic Policy After World War II. in Katzenstein, P. (ed.), *Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrialized States*, Madison, WI: University of Wisconsin Press.
- McNamara, R. 1973. Address to the Board of Governors. Nairobi, September 24
- McKenzie, David; Paffhausen, Anna Luisa 2017. What Is Considered Development Economics? Commonalities and Differences in University Courses around the Developing World. *The World Bank Economic Review*. 31 (3): 595–610. doi:10.1093/wber/lhx015
- North, D. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press
- Olson, M. 1982. *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities*, New Haven: Yale University Press
- Purnomo, S.D., Istiqomah, I. and Suharno, S., 2021. The Effect of Human Capital and Human Capital Spillover on Economic Growth. *ICORE*, 5(1).
- Pye, L. 1966. *Aspects of Political Development*, Boston: Little Brown.
- Rosenstein-Rodan, P. 1943. Problems of Industrialization in Eastern and South-Eastern Europe. *Economic Journal* 53, 2 : 201–11.
- Streeton, P. 1981. *First Things First: Meeting Basic Human Needs in Developing Countries*, Washington, DC: World Bank.
- Todaro, Michael and Stephen Smith. 2006. *Economic Development*. 9th ed. Addison-Wesley series in economics
- Toye, J. 1987. *Dilemmas of Development*, Oxford: Blackwell
- Wade, R. 1996. Japan, the World Bank, and the Art of Paradigm Maintenance: The East Asian Miracle in Political Perspective. *New Left Review* 217: 3–36

- World Bank. 2010. Research for Development: A World Bank Perspective on Future Directions for Research, Washington, DC: World Bank
- World Bank. 1993. East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, Oxford: Oxford University Press.
- Williams, D. 2011. International Development and Global Politics: History, Theory and Practice, London: Routledge.
- Williams, D. 2008. The World Bank and Social Transformation in International Politics: Liberalism, Governance and Sovereignty, London: Routledge.
- Williamson, J. 1989. What Washington Means by Policy Reform. in Williamson, J. (ed.), Latin American Readjustment: How Much Has Happened? Washington, DC: Institute for International Economics.
- Williamson, O. 1979. 'Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations,' Journal of Law and Economics 22, 2: 233–61

BAB 4

KERUGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Sri Nawatmi

4.1 Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi plus. Kalau pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan dari pendapatan (GNP=Gross National Product), maka pembangunan ekonomi bukan hanya dilihat dari kenaikan GNP tetapi juga diikuti dengan adanya pemerataan sehingga adanya pembangunan ekonomi di suatu negara diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi pembangunan (*development economics*) sendiri menurut Todaro (2011) adalah studi tentang upaya mentransformasi perekonomian dari keadaan stagnan ke pertumbuhan, dan dari status penghasilan rendah ke penghasilan tinggi, serta upaya menanggulangi masalah kemiskinan absolut. Komponen ekonomi pembangunan yang penting adalah peran pemerintah yang lebih besar untuk mentransformasi perekonomian. Studi ekonomi pembangunan harus bersifat eklektik, berupaya mengkombinasikan berbagai konsep dan teori yang relevan dari sejumlah model baru dan pendekatan multidisiplin yang lebih luas. Tujuan akhir dari studi ekonomi pembangunan adalah membantu kita memahami perekonomian negara sedang berkembang dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan mayoritas dari penduduk dunia. Definisi Seidman dalam Ahmad (2023) tentang ekonomi pembangunan tidak jauh beda, pembangunan diartikan dengan sebuah proses menciptakan

serta memanfaatkan asset fisik, keuangan, manusia serta sosial untuk dapat menghasilkan kesejahteraan ekonomi serta kualitas hidup yang lebih baik dan juga dibagi secara luas untuk suatu komunitas atau wilayah.

Ekonomi Pembangunan merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi NSB (Negara sedang Berkembang) serta cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut sehingga negara tersebut mampu membangun ekonominya dengan cepat (Sadono, 2010). Jadi ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi atau perkembangan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang disertai adanya perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat.

Inti dari pembangunan ekonomi yang sesungguhnya adalah kecukupan (*sustenance*) yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia pada tingkat yang minimal. Yang kedua, Harga diri (*self esteem*), yaitu perasaan berharga yang dinikmati suatu masyarakat jika sistem dan lembaga sosial, politik dan ekonominya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti kehormatan, martabat, integritas serta kemandirian. Ketiga, kebebasan (*freedom*) merupakan situasi yang menunjukkan dimana suatu masyarakat memiliki berbagai alternatif untuk memuaskan keinginannya dan setiap orang dapat mengambil pilihan riil sesuai keinginannya (Todaro, 2011).

Dengan demikian adanya pembangunan ekonomi di suatu negara diharapkan akan memajukan perekonomian negara tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Oleh karena itu, setiap negara akan selalu berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan berbagai kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hanya saja,

tidak setiap aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan membawa dampak positif, ada juga dampak negatifnya dari pembangunan ekonomi.

4.2 Masalah-Masalah Pembangunan Ekonomi

Masalah pembangunan ekonomi di negara maju adalah kurangnya permintaan sehingga menghambat produksi, sedangkan masalah yang dihadapi negara sedang berkembang (NSB) lebih kompleks dengan adanya *vicious circle of poverty* (lingkaran setan kemiskinan). Produktifitas NSB yang rendah ditunjukkan oleh PDB per kapita yang kecil. PDB per kapita yang kecil disebabkan rendahnya tingkat kehidupan sehingga kesempatan kerja sedikit. Rendahnya tingkat kehidupan karena Pendidikan yang rendah. Pendapatan rendah menyebabkan tabungan dan investasi rendah, sehingga akumulasi modal lambat dan berujung pada produktivitas yang rendah. Produktivitas rendah mengakibatkan pendapatan rata-rata rendah.

Masalah kedua, tingginya tingkat pengangguran di NSB disebabkan salah satunya oleh laju pertumbuhan Angkatan kerja yang sangat tinggi melebihi daya tampung perekonomian nasional. Hal tersebut diperparah dengan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja karena rendahnya penanaman modal terutama sektor industri dan jasa modern (Subhan, 2018).

Masalah lainnya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dan distribusi penduduk yang tidak merata di NSB (Hasan, 2018). Penyebaran penduduk yang tidak merata akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Hal tersebut akan menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata atau timpang. Ditambah lagi di NSB ada ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dan pertambangan primer sehingga ekspor mereka adalah produk-produk primer yang nilai tambahnya (value added) sangat kecil. Akan berbeda jika produk di sektor tersebut diolah lebih dulu sebelum di ekspor agar menjadi barang akhir sehingga memiliki

nilai tambah yang tinggi. Bahkan ada negara yang tergantung hanya pada sektor pertanian (monokutural).

Presiden World Bank David Malpass menyatakan terdapat kesenjangan ekonomi di negara berkembang dengan negara berpendapatan rendah, dan jumlah orang miskin ekstrem telah meningkat akibat Pandemi Covid-19. Pendapatan per kapita negara berkembang diperkirakan 5 persen pada tahun 2021 tetapi negara miskin hanya 0,5 persen. Hal ini diperparah dengan inflasi tinggi, minimnya lapangan pekerjaan dan krisis listrik di beberapa negara dan meningkatnya utang 12 persen pada negara berpendapatan rendah.

Arsyad (2004) menyatakan ada tiga permasalahan dasar yang dihadapi NSB: distribusi pendapatan yang tidak merata, kemiskinan dan gap yang semakin melebar antara negara maju dengan NSB. Yang menjadi perhatian utama adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Penyebab dari distribusi pendapatan yang tidak merata menurut Irma dan Cynthia (1973):

1. Menurunnya pendapatan per kapita
2. Inflasi
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan dari modal lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan dari kerja sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha para kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) NSB dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat dari ketidakelastisannya permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB.

8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga.

4.3 Tujuan dan Manfaat Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dilakukan oleh setiap negara dengan harapan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dengan adanya pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan meningkat, lapangan pekerjaan bertambah banyak sehingga kemampuan menyerap tenaga kerja menjadi semakin besar. Di samping itu, masyarakat mudah mencari pekerjaan, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita akan meningkat sehingga kesejahteraan juga akan meningkat.

Todaro (2011) menyebutkan bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi di suatu negara adalah:

1. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
2. Peningkatan standar hidup. Bukan hanya peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Tidak hanya menyangkut material tetapi juga meningkatkan harga diri individu dan bangsa.
3. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan. Tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghambakan dan perasaan bergantung pada orang dan negara-negara lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan berbagai kebodohan dan kesengsaraan.

Manfaat pembangunan ekonomi bagi masyarakat dan negara :

1. Adanya pembangunan ekonomi menyebabkan kegiatan dalam perekonomian berjalan lebih lancar serta mempercepat proses pertumbuhan ekonomi
2. Pembangunan ekonomi membuat terbukanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mengurangi pengangguran
3. Adanya lapangan pekerjaan akan memperbaiki tingkat pendapatan nasional
4. Melalui pembangunan ekonomi memungkinkan terjadinya perubahan struktural dari perekonomian agraris menjadi perekonomian yang mengandalkan sektor industri yang memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar dari pada sektor agraris.
5. Pembangunan ekonomi menuntut kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Hal tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Kerugian Pembangunan Ekonomi

Dalam menjalankan pembangunan ekonomi, pemerintah akan menghadapi berbagai kendala baik kendala dari pemerintah sendiri (perbedaan cara pandang dalam membuat kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ataupun kebijakan pembangunan yang tidak pro rakyat) maupun kendala yang berasal dari masyarakat sendiri yang mungkin kurang menyadari pentingnya pembangunan ekonomi. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pembangunan ekonomi bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di samping adanya keuntungan atau manfaat pembangunan ekonomi, ada juga kerugian pembangunan ekonomi yang harus ditanggung negara

dan masyarakat, yang bisa jadi kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit.

Kerugian pembangunan ekonomi bisa berwujud materi maupun non materi yang dihitung sebagai biaya. Kerugian pembangunan ekonomi dalam bentuk materi mudah untuk dihitung besarnya biaya, akan tetapi kalau kerugiannya dalam bentuk non materi sangat sulit untuk dihitung dan bisa jadi sangat besar. Misalnya akibat pembangunan ekonomi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, dari sisi materi bisa dihitung dari biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan lingkungan ke keadaan semula, maupun biaya pengobatan masyarakat yang terkena pencemaran. Akan tetapi menjadi sangat sulit untuk dihitung biayanya bila dikaitkan dengan kerugian akibat masyarakat tidak bisa lagi menikmati indahnya lingkungan sekitar, ketenangan batin yang hilang, keceriaan anak-anak yang hilang akibat pencemaran lingkungan, hati yang merasa gundah merasakan efek pencemaran lingkungan dan seterusnya. Kerugian itu mau tidak mau harus ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat.

Adapun kerugian dari adanya pembangunan ekonomi di suatu negara antara lain adalah:

Kerusakan dan pencemaran Lingkungan

Pembangunan ekonomi di NSB identik dengan industrialisasi. Hal ini mengacu pada perkembangan ekonomi yang terjadi di negara maju, dimana mereka menjadi negara maju karena industrialisasi. Banyak NSB yang mengubah ketergantungan dari sektor pertanian ke sector industry, baik industry berat, industri menengah maupun industri kecil.

Adanya industrialisasi berarti akan menambah produksi diberbagai sektor. Perkembangan produksi membutuhkan berbagai sumber daya baik SDM (sumber daya Manusia), SDA (sumber daya alam) meliputi sumber daya air, tanah, mineral, tambang maupun kekayaan alam lainnya. Kalau tidak hati-hati

dalam mengeksploitasi sumber daya akan berakibat buruk bagi perekonomian yaitu adanya kerusakan lingkungan. Bagi NSB yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, sehingga sering tidak mempedulikan efeknya terhadap kerusakan lingkungan. Hutan dibabat habis sehingga hutan menjadi gundul, pengubahan hutan alami menjadi hutan buatan, keanekaragaman hayati maupun hewani yang berkurang atau bahkan hilang dan seterusnya. Efek negatif dari industrialisasi besar-besaran akan menjadikan kerusakan lingkungan yang semakin parah bila pemerintah tidak segera bertindak untuk mengatasi masalah tersebut.

Industrialisasi juga akan menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Pembuangan limbah oleh sektor industri yang belum diatur atau sudah ada undang-undang tentang pencemaran lingkungan tetapi karena tidak ada penegakan hukum menjadikan para pengusaha membuang limbah seenaknya. Adanya pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara maupun tanah akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar kawasan industri. Pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat luas. Adanya industrialisasi berarti mengubah peruntukan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri atau hutan menjadi lahan industri. Kalau hal itu tidak diatur dengan bijak akan menimbulkan berkurangnya produksi pangan. Orang bisa hidup tanpa industri tetapi tidak mungkin bisa hidup tanpa pangan. Fenomena kekurangan pangan di berbagai belahan dunia menjadi pemandangan yang umum.

Rusaknya tatanan nilai-nilai sosial budaya

Pembangunan ekonomi menjadikan suatu negara harus membuka diri dengan negara lainnya yang berakibat pada masuknya nilai-nilai asing, kemudian terserap dalam masyarakat atau terjadi akulturasi budaya. Kalau itu tidak diseleksi dengan baik akan merusak tatanan nilai-nilai sosial budaya yang ada.

Pergeseran budaya ini sering terjadi dan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam masyarakat. Padahal nilai - nilai dari luar yang masuk ke masyarakat belum tentu sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dimiliki masyarakat setempat. Hal itu menimbulkan benturan budaya, yang pada akhirnya berdampak negatif bagi masyarakat. Contohnya adalah sikap hidup yang pragmatis, pandangan masyarakat yang cenderung materialistis, individualis, dan gaya hidup yang hedonis. Yang paling memprihatinkan adalah kerusakan moral yang semakin parah dalam masyarakat. Malu sebagian dari iman tidak lagi banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat sehingga sering terjadi hal-hal yang memalukan dan itu sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Sekulerisasi sudah meresap di sebagian besar kehidupan masyarakat.

Ketimpangan di berbagai bidang

Pembangunan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pemerataan pendapatan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan sehingga menimbulkan ketimpangan di berbagai sektor. Ketimpangan terjadi karena keterbatasan dana dan manajemen yang dimiliki NSB. Banyak negara yang merupakan negara miskin maupun NSB sama-sama memperebutkan modal asing dari berbagai negara maju. Belum lagi kecenderungan dari negara-negara maju di Eropa yang lebih suka menggelontorkan dana di negara sesama Eropa. Ditambah lagi dengan kondisi global yang tidak lagi memungkinkan untuk mendapatkan kucuran dana dalam jumlah besar karena kelesuan ekonomi global. Di samping itu juga budaya korup dari pejabat di negara sedang berkembang, karena rata-rata negara NSB memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) yang kecil (semakin kecil nilai IPK semakin korup negara tersebut).

Hambatan yang dihadapi NSB harusnya bukan alasan untuk terjadinya ketimpangan antara wilayah. Jika dana memang terbatas maka pemerintah bisa membuat skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa nomorduakan. Skala prioritas harus dikaji betul-betul agar bisa bersikap adil pada masyarakat. Jangan sampai skala prioritas karena factor politis atau pribadi. Jika faktor politis atau kepentingan pribadi maka akan menimbulkan masalah kemiskinan. Pembangunan yang benar itu menimbulkan kesejahteraan bukan kemiskinan sehingga kalau ada pembangunan justru menambah penduduk miskin, maka itu menjadi *warning*, bahwa ada yang salah dalam menjalankan pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Meningkatnya kaum urban

Pembangunan ekonomi yang tidak merata akan menimbulkan masalah sosial. Pembangunan ekonomi yang difokuskan di kota atau wilayah yang sudah maju saja, maka akan menimbulkan kecemburuan bagi penduduk yang ada di wilayah pedesaan atau wilayah yang belum maju. Efek dari kecemburuan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti penurunan keamanan, apatisme masyarakat, dan seterusnya. Jika pembangunan difokuskan di kota tanpa mempedulikan dampak negatif bagi daerah pedesaan atau wilayah yang tidak atau kurang maju, maka akan menyebabkan wilayah kota menjadi wilayah impian bagi banyak masyarakat, baik masyarakat yang ada di wilayah tersebut maupun masyarakat yang ada di luar wilayah tersebut. Dengan demikian akan menyebabkan masyarakat yang ada di luar wilayah maju, akan berbondong-bondong ke kota untuk menikmati berbagai fasilitas yang disediakan di wilayah tersebut. Adanya kaum urban akan semakin memajukan wilayah kota dan semakin memiskinkan wilayah pedesaan yang ditinggalkan. Wilayah pedesaan yang ditinggalkan akan semakin kesulitan mencari pekerja yang mau bekerja di ladang/sawah, dampaknya

kemiskinan akan semakin meningkat karena produktifitas semakin menurun. Kaum urban lebih suka bekerja di pabrik-pabrik dari pada di sawah/ladang sehingga Sawah/ ladang semakin banyak ditinggalkan, bila hal itu tidak segera teratasi akan menimbulkan kekurangan pangan.

Jika banyak masyarakat pedesaan yang beerbondong-bondong ke kota akan menambah kepadatan penduduk kota yang sudah padat. Hal itu akan menimbulkan masalah baru bagi kota yang didatangi, karena belum tentu masyarakat yang datang ke kota bisa terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Jika itu terjadi, tentu saja akan menimbulkan masalah lainnya di kota tersebut.

Meningkatnya pengangguran

Pembangunan ekonomi yang tidak merata/timpang akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Daerah yang tidak/belum terjangkau pembangunan ekonominya atau masih sedikit pembangunan yang dilakukan, menyebabkan angkatan kerja yang ada sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jika mereka berpindah ke kota, belum tentu juga lapangan pekerjaan tersedia untuknya karena biasanya wilayah miskin itu tingkat pendidikan yang dimiliki juga rendah, produktifitas rendah, pendapatan rendah sehingga terjadi lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang sulit untuk diputus.

Pengangguran juga bisa terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak segera diatasi. Biasanya tingkat pertumbuhan penduduk di NSB sangat tinggi. Bisa jadi lapangan pekerjaan yang tersedia cukup banyak tetapi yang dibutuhkan adalah angkatan kerja yang memiliki kualitas (skil yang tinggi). Sementara tingkat Pendidikan rata-rata penduduk di NSB adalah rendah. Lebih celaka lagi, jika pemerintah hanya peduli dengan membangun industri, sedangkan pembangunan di sektor pertanian agak diabaikan. Padahal kebanyakan NSB mengandalkan

sektor pertanian dan sektor pertanian relatif tidak menuntut pendidikan yang tinggi, yang sebenarnya kalau dibenahi betul bisa menyerap angkatan kerja yang berpendidikan rendah sehingga bisa mengurangi pengangguran. Tapi sayangnya pemerintahan rata-rata negara NSB tidak percaya diri sehingga mereka lebih suka meniru apa yang dilakukan negara maju, tanpa memikirkan potensi yang dimiliki, akibatnya pengangguran banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang.

Terjadinya pergeseran mata pencaharian

Orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada sector industri akan menyebabkan pergeseran peran dari sector pertanian ke sektor industri sehingga sumber pendapatan nasional terbesarnya bukan lagi berasal dari sektor pertanian tetapi beralih ke sektor industri. Pergeseran ini secara langsung akan mengeser mata pencaharian masyarakat dari sebelumnya banyak bekerja di sektor pertanian kemudian beralih lebih banyak bekerja di sektor industri baik secara suka rela maupun terpaksa. Suka rela terjadi bila masyarakat sudah tidak mau lagi bekerja di sektor pertanian, karena beratnya bekerja di sektor pertanian, mereka lebih suka menjadi buruh pabrik atau masuk ke industri lainnya dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Keterpaksaan terjadi jika masyarakat yang sebelumnya menjadi petani atau buruh tani karena lahan sawah berkurang atau tidak ada lagi lahan yang bisa digarap untuk bertani, terpaksa beralih ke sektor industri menjadi buruh industri atau tenaga kasar dari proyek-proyek pembangunan di kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4.5 Penutup

Pembangunan ekonomi diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Akan tetapi di sisi lain, adanya pembangunan ekonomi bisa menyebabkan kerugian

baik pada negara maupun masyarakat. Untuk mengantisipasi atau mengurangi kerugian tersebut, maka pemerintah harus hati-hati dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi. Jangan sampai adanya pembangunan ekonomi justru menyebabkan kerugian yang lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat besar dalam mengendalikan atau mengatasi dampak negatif pembangunan ekonomi.

Di samping pemerintah harus hati-hati dalam membuat kebijakan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah juga harus membuat kebijakan agar pembangunan ekonomi bisa berkelanjutan (*sustainable development*). Perencanaan pembangunan harus dibuat dengan matang baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang dengan melibatkan para pakar di berbagai bidang. Pelaksanaan pembangunan harus di monitor dan dievaluasi . Hasil monitoring dan evaluasi bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi sehingga dampak negatif dari pembangunan ekonomi bisa ditekan. Agar pembangunan berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka perlu penegakan hukum sehingga orang yang ingin melanggar aturan akan berpikir ulang untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, manfaat pembangunan ekonomi diharapkan lebih besar dari pada kerugiannya sehingga *sustainable development* akan berjalan lancar, kesejahteraan masyarakat akan segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad nasrudin. 2023. *Pembangunan Ekonomi : Definisi, Tujuan dan Tahapan*. cerdas.com.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Cahya Dicky Pratama. 2022. *Masalah Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*. Kompas.com.
- Endang Mulyani. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. UNY Press.
- Hasan, Muhammmad dan Aziz, Muhammad. 2018. *Pembangunan Ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat*. Makasar : Pustaka Taman Ilmu.
- Irma A. dan Cynthia T. M. 1973. *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. Stanford universssssity Press.
- Rafi Wijaya. 2020. *Pengertian Pembangunan Ekonomi : Tujuan, Indikator dan Tahapannya*. gramedia.com
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2011. *Economic Development*, Edition 11. Pearson Education Limited
- Sadono Sukirno. 2010. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Subhan, Muhammad Amsal. 2018. *Kolaborasi pembnagunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Makasar ; CV Sah Media.
- , 2013. *Kerugian Pembangunan Ekonomi*.
<https://Psychologymania.com/>

BAB 5

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Izzah Dienillah

5.1 Pendahuluan

Pembangunan suatu negara tidak serta merta berjalan dengan lancar, apalagi negara berkembang, banyak faktor-faktor penghambat diantaranya pada masalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kondisi geografis, kebijakan pemerintah yang harus diimplementasikan dan lain sebagainya. Sebagai penunjang pembangunan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang berbeda-beda pada setiap daerah, disesuaikan dengan kekhasan daerah tersebut (Subandi, 2014)

Suatu negara yang telah melakukan pembangunan tentu ingin mengetahui pembangunan yang telah dilakukan berhasil atau tidak, sejauh mana keberhasilan negara tersebut tercapai, ada dampak positif atau tidak. hal ini perlu adanya alat ukur bagaimana cara mengetahui proses pembangunan yang sudah dilakukan, sedang dilakukan dan yang akan dilakukan dapat dikatakan berhasil? Semuanya akan terlihat berhasil dengan melalui indikator-indikator pembangunan ekonomi.

Dalam jangka panjang bukan hanya dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita saja, tetapi pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan (rasio gini), indeks kualitas hidup secara fisik, indeks pembangunan manusia (IPM), struktur ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Indikator-indikator pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebuah Negara

mengalami perkembangan atau kemajuan, hal ini agar memudahkan dalam pembuatan kebijakan fiskal dan moneter yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Sebagaimana kebijakan pemerintah Indonesia tentang prioritas program atau proyek insfraktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di masa sekarang dan mendatang (www.ekon.go.id, 2022).

Beberapa indikator yang menunjukan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang positif, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,31% (yoy) di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, adapun penyebab ketidakpastian ekonomi dunia antara lain terjadinya perang Rusia vs Ukraina yang mengakibatkan guncangan ekonomi Amerika dan Uni Eropa.

5.2 Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator pembangunan ekonomi yang telah diterapkan diberbagai negara yaitu:

5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator pembangunan ekonomi yaitu tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. (Fuady, 2012) Pertumbuhan ekonomi ini diukur dari tinggi rendahnya produktivitas masyarakat pada suatu negara dalam kurun waktu satu tahun. Dalam bahasa ekonomi, produktivitas masyarakat ini bisa dilihat dari besarnya GNP.

GNP merupakan hasil produksi dari keseluruhan penduduk pada suatu negara dengan jumlah penduduk yang berbeda pada setiap negara. Untuk mengetahui GNP dengan menggunakan rumus:

$$\text{GNP} = \text{GDP} + (\text{PFLN} - \text{PFDN})$$

Sedangkan perbandingan keadaan pertumbuhan ekonomi di negara satu dengan negara yang lain dapat diketahui dengan menggunakan pendapatan per kapita (*income per capita*) dengan rumus:

$$\text{Pendapatan Per Kapita} = \frac{GNP}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp. 71 juta atau setara dengan US\$4.783,9. Sebuah keberhasilan pada negara Indonesia saat ini dikarenakan PDB yang dicapai pada tahun 2022 lebih tinggi 5,31 % dibanding tahun 2021. (BPS, 2022)

5.2.2 Pemerataan Distribusi Pendapatan (Rasio Gini)

Kekayaan yang dimiliki penduduk suatu negara tidak merata, ada sebagian penduduk bergelimangan harta sedangkan banyak lagi yang miskin, serba kekurangan, gizi buruk dan sebagainya. Ketika seluruh kekayaan suatu negara tersebut dibagi rata kepada semua penduduk bisa saja diperoleh rata-rata pendapatan per kapitanya tinggi. Kekayaan segelintir orang dapat menutupi banyaknya kemiskinan penduduk pada suatu negara tersebut. Tapi nyatanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin sangatlah jauh.

Dengan adanya kesenjangan tersebut maka perlu mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dengan rasio gini (koefisien gini). Rasio gini merupakan suatu ukuran ketidakmerataan pendapatan agregat yang angkanya berada pada kisaran nol (pemerataan sempurna) sampai satu (ketimpangan sempurna). (Todaro, 2000)

Angka 0,50 sampai 0,70 menyatakan bahwa ketimpangan kesejahteraan suatu negara tersebut sangatlah lebar. Sedangkan

jika berada diantara 0,20 sampai 0,35 suatu negara tersebut distribusinya dikatakan merata. (Fuady, 2012)

Tercatat rasio gini Indonesia pada September 2022 mencapai 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur dengan menggunakan rasio gini merata. Pada September 2022 ini rasio gini Indonesia mengalami penurunan, yang awalnya pada bulan Maret 2022 mencapai 0,384. (BPS, 2022)

5.2.3 Indeks Kualitas Hidup Secara Fisik

Indeks kualitas hidup secara fisik (*Physical Quality Of Life Index* (PQLI)). teori ini memiliki 3 unsur pokok, yaitu:

1. Tingkat harapan hidup seseorang setelah umur 1 tahun (*Life Expentancy at age 1*)
2. Rata-rata jumlah kematian bagi setiap 1000 kelahiran
3. Tingkat melek huruf

Teori yang diperkenalkan oleh Morris D dalam masing-masing indikator merupakan kinerja pembangunan suatu negara berdasarkan skala pada kisaran 1 sampai 100. Angka 1 menggambarkan kinerja terburuk, dan angka 100 yang terbaik. Angka 100 pada harapan hidup seseorang diberikan apabila rata-rata usianya 77 tahun. Angka 100 pada tingkat kematian bayi diberikan apabila mencapai 9 per 1000 kelahiran bayi, sedangkan angka 1 diberikan apabila mencapai 299 per 1000 kelahiran bayi. Tingkat melek huruf pada suatu negara dapat diketahui dengan mengukur persentase jumlah penduduk dari angka 1 sampai 100. Indeks gabungan diperoleh yakni dengan cara menjumlahkan ketiga indikator tersebut dan dibagi 3.

5.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator pembangunan ekonomi juga dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia dapat diperoleh dari 3 dimensi, yaitu:

1. Dimensi Pengetahuan menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sehingga semakin tinggi tingkat rata-rata membaca dan sekolah maka pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil, untuk mengetahuinya dapat menggunakan rumus berikut:

$$I \text{ pengetahuan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$$

$$I \text{ RLS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

2. Dimensi umur panjang dan hidup sehat menggunakan indikator umur harapan hidup saat lahir (UHH). Semakin tinggi harapan hidup penduduk pada suatu negara maka pembangunan tersebut berhasil. Untuk mengetahuinya dengan rumus:

$$I \text{ kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

3. Dimensi standart hidup layak menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita. Pendapatan riil ini disesuaikan dengan daya beli atau mata uang pada suatu negara. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka pembangunan dikatakan berhasil.

Dimensi tersebut antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Apabila semua dimensi tersebut dapat meningkatkan IPM maka dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu negara tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan 0,62 yang pada saat ini mencapai 72,91 dibandingkan tahun 2021 mencapai 72,29. (BPS, 2022) hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pembangunan Indonesia dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dikatakan berhasil.

5.2.5 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi merupakan salah satu upaya perubahan menuju peningkatan pembangunan ekonomi. Dengan berkembangnya pembangunan ekonomi mengakibatkan pergeseran dari sektor pertanian yang berubah menjadi sektor industri, dengan demikian struktur ekonomi akan berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun, mengakibatkan semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per kapita, maka semakin cepat pula dalam mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi dinamakan transformasi struktural. Transformasi struktural dapat dilihat dari nilai output yang didapatkan dari setiap sector pada pendapatan nasional (PDB). Transformasi struktur dapat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Lubis *et. al*, 2021)

Transformasi struktur dapat ditingkatkan melalui 2 cara, yaitu peningkatan produktivitas sumber daya manusia secara khusus dalam peningkatan kualitas tenaga kerja disetiap sector dan transfer tenaga kerja yang dari sector yang produktivitasnya rendah ke sector yang produktivitasnya lebih tinggi. (Nipsa Rinaldi, 2022) Kebijakan pemerintah salah satu penentu peningkatan produktivitas tenaga kerja baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. (Fitri Amalia, *et al*, 2022)

5.2.6 Pembangunan Berkelanjutan

Suatu Negara yang memiliki produktivitas tinggi dan pemerataan ekonomi yang merata bisa saja nanti akan berubah menjadi Negara miskin, dan sebaliknya Negara miskin dan kesenjangan ekonomi yang sangat jauh akan menjadi Negara yang sejahtera. Hal ini bisa terjadi dikarenakan Negara yang memiliki produktivitas tinggi tidak memperdulikan efek negatif terhadap lingkungannya. Sumber daya alam rusak, dan terkuras habis, sedangkan proses rehabilitasi lingkungan membutuhkan proses yang lama. Sehingga pada pertumbuhan ekonomi ini perlu memasukkan nilai kerusakan lingkungan dan sumber daya alam akibat tindakan ekonomi.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan sumber daya alam, sumber daya manusia, bisnis hingga politik yang memiliki prinsip dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan mampu memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang.

Terdapat 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada aspek ekonomi berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, mengolah pola produksi dan konsumsi yang seimbang. Pilar kedua yaitu sosial yang berkaitan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pilar ketiga yaitu lingkungan diantaranya mengenai upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi udara, konservasi atau reservasi sumber daya alam, dan pengelolaan limbah. Dengan adanya 3 pilar ekonomi berkelanjutan tujuan akan tercapai, yaitu keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan sosial masyarakat yang merata (*social progress*), keberlanjutan ekologi yang seimbang (*ecological balance*). (Susyanto, 2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitri et al, 2022, *Pembangunan Ekonomi*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- BPS, 2022, *Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022*.
- BPS, 2022, *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022*.
- BPS, 2022, *Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2022*.
- Fuady, Wachid, 2012, *Kajian Teori dan Implementasi Pembangunan Terhadap Tolak Ukur Keberhasilan Pembangunan*, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, Vol. 19 No. 32, 1-14.
<http://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/JEMA/article/view/65/63>
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4660/memeratakan-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-pemerintah-dorong-pengembangan-psn-prioritas-di-berbagai-wilayah>
- Rinaldi, Nibsa, et . al, 2022, *Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia*, Jurnal Ekonomi Aktual, 1(3), 117-126.
<https://journal.widapublishing.com/index.php/JEA/article/view/19/85>
- Subandi, 2014, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung, Alfabeta
- Todaro, Michael, 2000, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara Logman
- Tunut, Susyanto, dkk. 2022, *Tipologi Daerah Berdasarkan Indikator Pembangunan Berkelanjutan*, Journal of Management and Bussines (JOMB), 4(2), 1612-1621.
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOMB/article/view/4634/3233>

BAB 6

CIRI CIRI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Oleh Anita Latuheru

6.1 Pendahuluan

Negara Sedang Berkembang (NSB) merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam pengelompokan suatu negara yang mempunyai kesejahteraan material tingkat rendah dibandingkan dengan istilah dalam pengelompokan negara maju. Hingga saat ini tidak ada definisi tetap mengenai negara sedang berkembang yang diakui secara Internasional, sebab tingkat pembangunan suatu negara berkembang berbeda – beda bervariasi, serta standar hidup di tiap – tiap negara rata – rata tinggi. Selain itu, negara dengan kondisi ekonomi maju dari pada negara sedang berkembang, tetapi tidak memiliki tanda – tanda negara maju, maka pengelompokan sebagai negara industri baru.

Seluruh negara yang ada di dunia tidak hanya dikelompokkan sebagai negara sedang berkembang atau negara maju berdasarkan letak geografisnya, namun pengelompokan negara juga berdasarkan pada tingkat perekonomian.

Dalam bab ini secara umum akan di jelaskan bagaimana pengelompokan suatu negara dalam hal ini yang akan kita lihat adalah Negara Sedang Berkembang (NSB), dan karakteristik negara sedang berkembang, bagaimana keadaan umum dari NSB dan permasalahan yang dihadapi dalam aspek kegiatan perekonomian negara sedang berkembang (Lincoln Arsyad, 2005)

Dengan uraian tersebut maka dapat di definisikan bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang

menganalisis masalah – masalah yang dihadapi Negara Sedang Berkembang (NSB) dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi agar negara dapat membangun perekonomian yang lebih cepat (Lincoln Arsyad, 2005).

6.2 Pengelompokan Negara Sedang Berkembang

Pengelompokan Negara-negara dalam kategori negara maju dan negara sedang berkembang, menurut bank dunia atau world bank, biasanya di lihat dari tingkat kesejahteraannya dengan menggunakan indikator pendapatan riil perkapita, biasa dikenal dalam GNP riil perkapita atau GDP riil perkapita.

Negara Sedang Berkembang biasa disebut sebagai Negara Dunia Ketiga atau Negara Selatan dan Negara Maju biasa di sebut dengan Negara Dunia Pertama atau negara di keawasan Eropa Barat, yang terdiri dari Negara amerika Utara, Austrlia, New Zealand dan Jepang (Sadono Sukirno, 2007).

Negara Dunia Ketiga atau Negara Sedang Berkembang sebagian besar terdapat pada Benua Asia, Afrika dan Amerika Latin, mempunya pembangunan yang masih rendah dan memiliki pendapatan perkapita kurang dari US \$1.000, yang menggambarkan rendahnya pendapatan bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita di negara maju yang sebagian besar memiliki pendapatan perkapita sebesar diatas US \$10.000 (Sadono Sukirno, 2007).

Pada data Bank Dunia, ada beberapa NSB yang mempunyai Pendapatan perkapita yang setara di atas US \$10.000 sama dengan negara maju seperti, Korea Selatan, Singapura dan Arab Saudi yang mempunya pendapatan perkapita yang besar, tetapi negara tersebut belum di golongankan dalam kategori Negara Maju dikarenakan adanya ketidak seimbangannya faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut dengan teknologi yang mereka kuasai sehingga penggunaan modal dan tenaga kerja secara keseluruhan belum tercapai (Dewi Fatmasari, 2015).

Data Bank Dunia mengklasifikasikan 3 kelompok berdasarkan Gross National Income (GNI) sesuai dengan tingkat pendapatan perkapita yaitu :

1. Negara berpenghasilan rendah (low income economies) dengan GNI per kapita dibawah US \$765
2. Negara berpenghasilan menengah (middle income economies) dengan GNI per kapita antar US \$765 sampai US \$ 3,305.
3. Negara berpenghasilan menengah tinggi (upper middle income) dengan GNI per kapita diatas US \$3,305 sampai US \$ 9,385.
4. Negara berpenghasilan tinggi (high income) dengan GNI per kapita diatas US \$9,385.

Berdasarkan klasifikasi kelompok yang di utarakan di atas maka tabel kategori negara menurut gross national income, bisa kita lihat sebagai berikut :

Tabel 6.1. Per Kapita 4 kelompok golongan Negara tahun 2021

Negara	GNP Per Kapita US (\$)
Negara berpenghasilan rendah :	
1. Etopia	940
2. Tazania	1.100
3. Kenya	2.080
4. Bangladesh	2.570
5. Veitnam	3.590
Negara berpenghasilan menengah :	
1. Srikangka	4.030
2. Indonesia	4.180
3. Filipina	4.500
4. Thailand	7.090
5. Malaysia	10.710

Negara	GNP Per Kapita US (\$)
Negara berpnghasiam tinggi :	
1. Korea Selatan	35.110
2. Israel	49.290
3. Singapura	64.010
4. Jepang	42.650
5. Amerika Serikat	68.599

Sumber: Bank Dunia (2022)

Dari gambaran diatas dapat kita ketahui gambaran umum mengenai taraf kemakmuran yang dicapai dari beberapa negara, yang digolongkan dalam tiga kelompok.

6.3 Karakteristik Neraga Sedang Berkembang

Suatu negara dapat di golongankan dalam kategori negara maju atau negara sedang berkembang berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator pendapatan riil per kapita (Michael P Todaro, 2006).

Melihat dari tingkat kesejahteraan suatu negara dan pada tabel 6.1 maka dapat kita jabarkan karakteristik negara sedang berkembang, yang kita lihat negara sedang berkembang salah satunya seperti Indonesia sebagai berikut :

1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tinggi.

Tingkat pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang (NSB) seperti Indonesia biasanya lebih tinggi dari Negara Maju seperti Singapura, dari data Satisitik tahun 2022 tingkat pertumbuhan penduduk indonesia sebesar 270,2 jiwa sedangkan di negara Singapura jumlah tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 5,64 juta jiwa. Hal ini yang terjadi di Indonesia karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian petani diperdesaan. Angka tingginya pertumbuhan penduduk di sebabkan karena

tingginya tingkat kelahiran, tingkat kematian dan ketidakmerataan penyebaran penduduk yang mengakibatkan penghambatan dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan di negara maju sebaliknya dengan negara sedang berkembang.

2. Tingkat Pengangguran Tinggi.

Apabila dibandingkan dengan Negara Maju, tidak bisa dibandingkan bahwa tingkat pengangguran di negara sedang berkembang pasti lebih tinggi. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi melebihi daya tampung perekonomian nasional. Ketidak seimbangannya lapangan pekerjaan yang disediakan dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga mengakibatkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang rendah akan kalah dengan pendidikan yang tinggi dalam hal ini lulusan SMA akan lebih sedikit mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan lulusan S1 yang akan mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga dipengaruhi dengan kurangnya tingkat penanaman modal pada sektor – sektor industri dan jasa.

3. Tingkat Produktivitas Rendah

Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita pekerja yang kecil. Yang menyebabkan pendapatan per kapita kecil yaitu rendahnya tingkat kehidupan dan kesempatan kerja, terutama bagi mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah atau tidak sekolah sama sekali. Sehingga seringkali negara sedang berkembang dikaitkan dengan istilah lingkaran setan yang sulit diputus. Dalam arti bahwa dalam mata rantai pendapatan rendah, maka berdampak pada tabungan dan investasi yang juga rendah. Dari kedua mata rantai tersebut akan mengakibatkan akumulasi modal

yang lambat sehingga berujung pada produktivitas yang rendah yang akan mengakibatkan rendahnya pendapatan rata – rata.

4. Kualitas Hidup Rendah.

Rendahnya kualitas hidup dapat dilihat dari kemampuan penduduk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan rumah. Rendahnya tingkat penghasilan masyarakat menyebabkan masyarakat tidak bisa merasakan kesehatan, pendidikan sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah. Akibat pembangunan yang kurang merata, pembangunan berpusat di beberapa wilayah saja sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak merata.

5. Ketergantungan Pada Sektor Pertanian

Sebagian besar penduduk dalam negara sedang berkembang, dalam hal ini di Indonesia, kebanyakan hidup di daerah perdesaan dan mata pencahariannya adalah petani dengan ketergantungan yang tinggi akan hasil dari sektor pertaniannya, sebab penduduk belum bisa mengembangkan sektor lain, dan hanya dapat memanfaatkan sumberdaya alam secara langsung.

6. Pasar dan Informasi Yang Tidak Sempurna

Pasar yang ada di negara sedang berkembang seperti Indonesia cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap, struktur pasar barang dan jasa umumnya cenderung tidak sempurna. Selain itu sebagian besar informasi pasar hanya diterima oleh pengusaha yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi yang bersangkutan dan hal seperti itulah yang dapat merugikan masyarakat.

7. Ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan Internasional.

Kondisi perekonomian negara sedang berkembang seperti Indonesia biasanya cenderung di pengaruhi oleh kondisi perekonomian negara sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor. Apalagi barabg-barang yang di ekspor adalah barang-barang primer. Di pasar global biasanya negara sedang berkembang seperti Indonesia menjual tenaga kerja murah dan pasokan bahan mentah, hasil sumber daya alam yang di jual ke nagara maju, karena negara maju dapat merubah bahan mentah menjadi bahan jadi dengan peralatan yang canggih. Bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia yang melakukan kerja sama atau hubungan dengan negara maju, hubungan ini akan membuat ketergantungan bagi negara sedang berkembang.

8. Tingkat Ketergantungan Pada Angkatan Kerja Tinggi.

Perbandingan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dengan penduduk non angkatan kerja di negara sedang berkembang nilainya berbeda dengan di negara maju. Dengan demikian di negara maju penduduk yang berada dalam nonproduktif lebih banyak bergantung pada yang masuk angkatan kerja.

9. Ketergantungan Tinggi Pada Perekonomia Eksternal Yang Rentang.

Negara sedang berkembang seperti Indonesia biasanya memiliki ketergantungan perekonomian luar negeri yang bersifat rentan akibat hanya mengandalkan ekspor komoditas primer yang tidak menentu. Kondisi tersebut

pada akhirnya akan melahirkan ketergantungan negara sedang berkembang terhadap negara –negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Fatmasari. 2015. *EKONOMI PEMBANGUNAN*. Pertama. Cirebon: CV. Pangger.
- Lincoln Arsyad. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan EKONOMI DAERAH*. Kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Michael P Todaro, S. C. S. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Kesembilan. Edited by D. Barnadi, S. Saad, and W. Hardani. Jakarta: Erlangga.
- Sadono Sukirno. 2007. *EKONOMI PEMBANGUNAN Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.

BAB 7

FAKTOR-FAKTOR PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Khusaini

7.1 Pendahuluan

Pada saat ini yang menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan negara dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui transisi struktur sosial dan sumber daya manusia (Lemaitre *et al.*, 2018). Pembangunan ekonomi tidak akan terjadi tanpa adanya perubahan ekonomi dan sosial. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan produktivitas, tatanan sosial yang lebih baik, kebijakan pemerintah yang pro rakyat miskin, serta menurunnya masalah sosial yang sangat bergantung pada sumber daya manusia dan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Seorang ahli ekonomi ekonomi mengungkapkan bahwa ciri perubahan dalam laju pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya penurunan pengangguran, kemiskinan, dan meratanya pendapatan masyarakat (Seers, 1969).

Sementara itu, Owens (1987) lebih menekankan pada perubahan sumber daya manusia yang lebih baik sebagai bentuk pembangunan. Mengingat manusia merupakan obyek sekaligus subyek dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh kondisi ekonomi dan non ekonomi (sosial) di setiap negara. Apabila kondisi ekonomi dan non ekonomi baik, maka laju pembangunan ekonomi akan semakin meningkat, atau sebaliknya. Determinan ekonomi dan non ekonomi tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang

berdampak langsung pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

7.2 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu determinan pembangunan ekonomi yang memiliki dimensi ekonomi dan benefit terhadap pembangunan. Pada bagian ini akan disajikan uraian faktor ekonomi sebagai penentu pembangunan ekonomi, diantaranya penduduk, ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya, kemajuan teknologi, perluasan pasar, struktur pekerjaan, perencanaan pembangunan, investasi dan akumulasi modal, perdagangan dan kerjasama internasional, serta infrastruktur.

7.2.1 Penduduk

Penduduk suatu negara menjadi subyek dan obyek pembangunan ekonomi. Subyek pembangunan dimaknai bahwa penduduk menjadi pelaku yang mengkolaborasi sumberdaya berdasarkan kemampuan dan kompetensinya dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan sebagai obyek pembangunan dapat diartikan bahwa penduduk menjadi target pembangunan fisik, mental, dan spiritualnya sehingga tercapai kesejahteraannya. Sementara itu, pertambahan penduduk yang tinggi juga dapat menjadi potensi dan hambatan pembangunan.

Negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi mendeskripsikan permintaan barang dan jasa yang juga tinggi, melimpahnya angkatan angkatan kerja, atau sebaliknya. Namun, jumlah penduduk tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan maka permintaan barang dan jasa tidak meningkat. Demikian juga dengan melimpahnya angkatan kerja yang tidak disertai dengan produktivitas, keterampilan, dan pendidikan maka kurang berkontribusi dalam laju pembangunan ekonomi. Namun, pertambahan jumlah penduduk yang terus bertambah tanpa

terkendali dapat mengakibatkan kelangkaan pangan (Malthus, 1798) layanan Kesehatan dan Pendidikan yang terhambat (Todaro & Smith, 2015) akibatnya tujuan peningkatan taraf hidup tidak tercapai.

Peningkatan taraf hidup masyarakat sulit dicapai apabila tidak melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Bahkan terdapat studi yang menemukan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak signifikan pada pembagian lahan, kelangkaan pangan, menurunnya pendapatan rumah tangga, dan terhambatnya masalah sosial, ekonomi, dan masalah lainnya (Maja & Ayano, 2021). Oleh karena itu, Ritson (2020) menyarankan pentingnya kebijakan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dan pangan, agar laju pembangunan ekonomi tetap terjaga.

7.2.2 Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya

Keseluruhan sumber daya yang terdapat pada alam dan pemanfaatannya untuk kemakmuran makhluk hidup dinamakan sumber daya alam. Secara ekonomi, sumber daya alam yang tersedia berkontribusi dalam menentukan pembangunan ekonomi suatu negara. Negara yang kurang memiliki sumber daya alam, namun memiliki sumber daya manusia yang produktif dan terampil akan mampu mengelola sumber daya dengan memiliki nilai ekonomi yang tinggi (mis. Singapura, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain). Sebaliknya, negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun produktivitas dan keterampilan sumber daya manusia rendah maka dapat menghambat pembangunan ekonomi. Akibatnya negara sedang berkembang atau negeri terbelakang akan mengalami perlambatan untuk menjadi negara maju.

Terdapat hasil studi yang menguatkan anggapan bahwa sumber daya alam berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yakni (Bellos & Knio, 2021; Hayat & Tahir, 2021), bahkan berdampak pada kualitas lingkungan dan perilaku

korupsi (Majeed *et al.*, 2022; Zallé, 2022). Efek sumber daya juga dapat berupa efek kontijensi jangka pendek dan jangka Panjang terhadap pembangunan ekonomi (Nzié & Pepeah, 2022). Namun, suatu negara dengan institusi yang lemah akan menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang bersih dan jujur agar institusi menjadi kuat sehingga mampu mengelola sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi (Zallé, 2019).

7.2.3 Teknologi

Kemajuan teknologi merujuk pada penggunaan teknologi yang berefek pada nilai ekonomi, aplikasinya mampu menghasilkan invensi dan inovasi, serta pemanfaatannya berskala besar. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat secara signifikan berkontribusi pada laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Samuelson (2004) mengungkapkan bahwa negara yang melakukan investasi yang tinggi tidak lebih baik dibandingkan dengan negara dengan invensi yang tinggi. Dalam teori pertumbuhan dinyatakan bahwa kemajuan teknologi (kemajuan teknis) menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang penting (Bruton, 1967; Solow, 1957).

Negara yang sedang berkembang terkait dengan teknologi menghadapi pilihan tindakan kemampuan menggunakan dan memanfaatkan modal, menghemat tenaga kerja, atau tindakan netral. Kemajuan teknologi dapat dicapai dengan Langkah-langkah sebagai berikut: meningkatkan inovasi dan invensi, melakukan investasi penelitian yang massif, serta memperluas pasar dalam dan luar negeri. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkualitas (Zhao *et al.*, 2022), bahkan pembangunan berkelanjutan (Li *et al.*, 2022).

7.2.4 Perluasan Pasar

Perluasan atau ekspansi pasar akan mendorong perluasan skala produksi dan diferensiasinya sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Aktivitas ekspor yang tinggi dan impor menjadi ukuran penting dalam mobilitas barang dan jasa yang dibutuhkan serta indikator luasnya pasar. Mengingat, alokasi sumber daya yang langka diantara berbagai tujuan alternatif dapat menciptakan pasar yang efisien (Nafziger, 2006). Hal ini disebabkan oleh konsumen *willingness to pay* akan barang dan jasa, produksi yang dihasilkan perusahaan bertujuan memaksimalkan profit, maksimisasi pendapatan melalui penyewaan sumber daya, tenaga kerja dan modal menentukan pasar, serta pasar mampu mendistribusikan pendapatan secara optimal kepada individu.

Liu & Meissner (2019) menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kemungkinan untuk memproduksi dengan elastisitas pendapatan yang rendah atau tinggi, net ekspor yang tinggi dapat memacu pertumbuhan ekonomi, pengalaman Negara China dan India memiliki elastisitas pendapatan yang rendah meskipun mampu mengekspor barang yang cukup tinggi. Negara tidak cukup hanya mengekspor barang dan jasa ke satu negara tujuan saja, namun dibutuhkan integrasi pasar internasional melalui pola Kerjasama internasional dan regional (Alex *et al.*, 2004).

7.2.5 Struktur Pekerjaan

Fisher (1945) mengungkapkan bahwa investasi dan pergeseran lapangan pekerjaan untuk aktivitas produksi sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier memiliki dampak positif dalam perkembangan ekonomi. Salah satu ciri negara terbelakang atau sedang berkembang adalah perekonomiannya sangat bergantung pada aktivitas produksi sektor primer. Oleh karena itu, transformasi ekonomi sektor ekonomi tersebut penting untuk dilakukan secara bertahap agar dapat berdaya saing dan

mensejajarkan diri dengan negara-negara yang relatif lebih maju. Misalnya Indonesia, pada tahun 2022, pergeseran aktivitas produksi sektor pertanian ke sektor manufaktur mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1.01% dari 5.31% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Disamping itu, pada tahap awal pembangunan terdapat dominasi transformasi struktural, migrasi tenaga kerja sektor modern dari sektor tradisional, memperluas jam kerja, mengurangi pekerja dibawah umur maka dapat meningkatkan produktivitas per tenaga kerja sehingga berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Das *et al.*, 2015). Peningkatan pendapatan penduduk juga akan meningkat jika tingkat pendidikannya tinggi. Penduduk yang memiliki Pendidikan tinggi cenderung tidak mau bekerja di sector pertanian dan lebih memilih di sektor non pertanian, karena hanya bekerja di ladang, tidak memiliki jaminan sosial, serta pendapatan rendah (Zhu *et al.*, 2023).

7.2.6 Perencanaan Pembangunan

Penyusunan perencanaan pembangunan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi. Hal ini ditunjukkan pada akhir tahun 1980-an, bahwa negara-negara sedang berkembang telah Menyusun perencanaan pembangunan lima tahunan yang menawarkan solusi terhadap setiap permasalahan dan memastikan laju pertumbuhan ekonomi meningkat (Todaro & Smith, 2015). Perencanaan pembangunan bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam pengambilan keputusan ekonomi dan kemudahan koordinasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

7.2.7 Perdagangan dan Kerjasama Internasional

Keberhasilan pembangunan ekonomi juga ditentukan aktivitas perdagangan dan kerjasama internasional/regional. Jalur peningkatan laju pembangunan ekonomi melalui peningkatan

pendapatan ekspor, aliran masuk dari modal asing, serta Kerjasama internasional dan regional. Tahir *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat dalam jangka panjang disebabkan oleh keterbukaan ekonomi dan kerjasama internasional. Bentuk kerjasama internasional meliputi OPEC, ASEAN, EURO, BRICS, OECD dan sebagainya dan Lembaga internasional yang membantu negara sedang berkembang dan negara maju diantaranya ILO, IMF, ADB, World Bank, dan sebagainya.

Sementara itu, (Abendin & Duan, 2021; Dvouletý, 2019) telah membuktikan bahwa perdagangan internasional menjadi mesin penggerak pembangunan ekonomi. Di sebagian negara-negara Afrika mengalami pergeseran pertumbuhan yang intermiten ke pertumbuhan berkelanjutan disebabkan oleh adanya integrasi regional antar negara Afrika, namun perdagangan internasional bukan merupakan solusi dari pertumbuhannya (Tinta et al., 2018). Meskipun demikian, perlu adanya negara yang menjadi penyeimbang, untuk menghindari eksploitasi dari negara-negara maju, seperti yang dilakukan oleh China sebagai penyeimbang (Zhou, 2023).

7.2.8 Investasi dan Akumulasi Modal

Dalam ekonomi makro, investasi dapat dinyatakan sebagai penambahan stok kapital negara yang berupa bangunan, perangkat lunak, peralatan yang bergerak dan tidak bergerak, serta persediaan dalam kurun waktu tertentu. Semnatar itu, pengeluaran investasi oleh perusahaan dapat berupa pengeluaran modal fisik yang produktif, seperti mesin, konstruksi bangunan, perubahan persediaan guan memproduksi barang dan jasa. Investasi ini dilakukan dengan memperoleh pengembalian yang menguntungkan. Sementara itu tinggi rendahnya investasi ditentukan oleh besarnya suku bunga dan pendapatan (Fujino, 1974; Keynes, 1936).

Terkait dengan peran investasi dan akumulasi modal kapital fisik terhadap pertumbuhan ekonomi berdasar pada teori yang dikemukakan oleh (Harrod, 1939; Solow, 1956, 1957; Swan, 1956). Investasi tersebut dilakukan melalui aktivitas pembangunan pabrik, pembelian perangkat keras dan lunak, pembangunan gedung sekolah, pengembangan dan perluasan penelitian terapan, melatih penyuluh pertanian, dan sebagainya (Nafziger, 2006). Sedangkan akumulasi modal fisik diperoleh dengan cara menginvestasikan sebagian pendapatan sekarang guna menambah barang dan jasa dan pendapatan di masa yang akan datang (Todaro & Smith, 2015). Temuan studi menunjukkan bahwa penambahan barang dan jasa (pertumbuhan ekonomi) melalui peningkatan investasi dalam negeri, investasi luar negeri, dan penemuan teknologi (Das *et al.*, 2015; Tahir *et al.*, 2022).

7.2.9 Infrastruktur

Faktor ekonomi terakhir sebagai penentu pembangunan ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur dasar di setiap negara. Infrastruktur dasar tersebut dapat berupa infrastruktur ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, sanitasi, teknologi informasi dan komunikasi, energi, dan infrastruktur jalan. Penyediaan infrastruktur dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah agar mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Aworinde & Akintoye, 2019), pengentasan kemiskinan dan kualitas hidup (Akinlabi & Olandunjoye, 2014; Khusaini *et al.*, 2023). Studi lain menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pertanian, sumber daya air, transportasi dan komunikasi, layanan pendidikan dan kesehatan, serta lingkungan dalam jangka Panjang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi (Fasoranti, 2012).

7.3 Faktor Non Ekonomi

Selain faktor ekonomi, faktor non ekonomi yang meliputi modal sosial, pendidikan, budaya, kesehatan, serta lingkungan juga menentukan pembangunan ekonomi.

7.3.1 Modal Sosial

Faktor non ekonomi yang pertama adalah modal sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Modal sosial dapat melekat pada nilai kepercayaan, jaringan sosial, dan norma yang ada dalam masyarakat. Tantangan yang cukup berat bagi negara sedang berkembang adalah melakukan perubahan sosial secara bertahap. Mengingat bahwa perubahan sosial tersebut dibutuhkan untuk memperkuat modal sosial guna mendorong perubahan ekonomi. Telah banyak studi yang telah membuktikan tentang peran modal sosial dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya (Engbers & Rubin, 2018; Lee *et al.*, 2015; Suryahadi *et al.*, 2020).

7.3.2 Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pendidikan menjadi tempat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berketerampilan. Para lulusan hasil pendidikan dapat menjadi salah satu input produksi yang menghasilkan barang dan jasa memungkinkan menerima pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan dan tentu terjadi perbedaan kesejahteraan (Todaro & Smith, 2015). Studi telah menunjukkan bahwa Pendidikan memiliki peran dalam menurunkan ketimpangan pendapatan (Bhagwati & Hansen, 1973; Khusaini *et al.*, 2020; Latuconsina *et al.*, 2020) mengurangi jumlah penduduk miskin (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, pemerataan Pendidikan sangat diperlukan agar semua penduduk dapat menikmati layanan pendidikan (Khusaini *et al.*, 2022).

7.3.3 Budaya

Faktor selanjutnya adalah budaya yang merupakan pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota sosial yang berbeda (Hofstede, 1984). Budaya memiliki peran yang penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi telah sepakat bahwa kondisi budaya masing-masing negara telah terbukti signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya (Acemoglu, 2012; Dieckmann, 1996; Pratikto, 2012). Hasil studi lain hubungan budaya yang diproksi dengan agama mempengaruhi pembangunan ekonomi (Safira *et al.*, 2020).

7.3.4 Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu isu penting dalam perekonomian baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Karena dengan Kesehatan menyebabkan manusia dapat menikmati hidup yang lebih lama, lebih produktif, dan lebih sehat (Bloom *et al.*, 2004). Bahkan Todaro & Smith (2015) mengungkapkan bahwa salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah penduduk yang sehat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk Kesehatan sangat dibutuhkan agar kualitas hidupnya semakin meningkat (Khusaini *et al.*, 2023). Beberapa studi telah meyakinkan para pemangku kebijakan yang menemukan bahwa peningkatan derajat kesehatan penduduk dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan (Fogel, 2004; Strauss & Thomas, 1998).

7.3.5 Lingkungan

Isu besar saat ini adalah permasalahan lingkungan karena lebih dari setengah penduduk negara berkembang bekerjanya berhadapan langsung dengan dampak yang ditimbulkannya. Pekerjaan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, bahkan

industri manufaktur akan menghasilkan efek lingkungan. Lingkungan yang berkualitas akan mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara (Todaro & Smith, 2015). Kondisi lingkungan bisnis yang baik dihasilkan oleh lingkungan alam yang sehat dan baik. Sementara itu, semakin meluasnya permasalahan lingkungan juga diakibatkan oleh bertambahnya industri dan pertumbuhan penduduk (Yadav et al., 2021) dan meningkatnya kebutuhan energi juga berdampak pada penipisan sumber daya dan polusi udara (International Monetary Fund, 2020). Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sedapat mungkin mengendalikan lingkungan agar selalu sehat.

7.3.6 Efisiensi Administrasi

Efisiensi administrasi pemerintahan juga memainkan peran penting bagi pembangunan ekonomi. Perangkat yang bertugas tentu harus memiliki sikap jujur, adil, kuat, dan efisien guna mendorong laju pembangunan. Hal sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh (Lewis, 1951) bahwa perlambatan kegiatan ekonomi dapat direduksi dengan perilaku pemerintah yang jujur dan terbebas dari korupsi. Pemerintah sebagai penentu kebijakan selalu menjaga integritas, terbebas dari penyalahgunaan wewenang untuk bertindak sebagai *rent seeker*, serta menghindari transaksi korupsi agar pemerintah menjadi kuat. Disamping itu, tindakan-tindakan tersebut menjadi beban yang tidak kecil bagi perubahan sosial dan ekonomi suatu negara (Kunicova & Rose-Ackerman, 2005).

Terdapat beberapa studi yang telah membuktikan bahwa dalam jangka panjang, pendapatan perkapita dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintahan yang bersih (Feruni *et al.*, 2020; Horvat *et al.*, 2021). Studi lain juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan ditentukan oleh perilaku korupsi pemerintahnya (Alfada, 2019). Namun demikian, perwujudan pemerintahan yang bersih dari perilaku

korupsi tidak cukup mengandalkan penegakan hukum yang ada, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan dan pelaporan. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut adalah inefisiensi ekonomi dan sosial.

7.4 Rangkuman

Materi ini ditulis dengan tujuan mendeskripsikan berbagai faktor yang berkontribusi dalam mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi. Semua faktor penentu pembangunan ekonomi disajikan bukan hanya berdasar pada intuisi ekonomi namun telah didukung dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Agar argumentasi yang dikemukakan meminimalisir subyektivitas penulis buku dan lebih ilmiah. Masih terdapat factor lain sebagai penentu pembangunan ekonomi yang tidak disajikan dalam buku ini, diantaranya faktor penegakan hukum, stabilitas politik, dan sebagainya.

Karakteristik keberhasilan ekonomi sebuah negara adalah kondisi penduduk miskin yang minimal, kesenjangan pendapatan yang rendah, dan jumlah pengangguran juga rendah. Disamping itu, terpenuhinya kebutuhan dasar manusia juga menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berhasil dibutuhkan dorongan atau faktor yang bersifat ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari penduduk, ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya, kemajuan teknologi, perluasan pasar, struktur pekerjaan, perencanaan pembangunan, investasi dan akumulasi modal, perdagangan dan kerjasama internasional, serta infrastruktur. Sedangkan faktor non ekonomi diantaranya modal sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang sehat.

7.5 Pertanyaan Diskusi

1. Menurut berbagai pendapat ahli ekonomi pembangunan, mengapa kesejahteraan selalu menjadi target atau tujuan keberhasilan pembangunan? Jelaskan juga dimensi pembangunan ekonomi yang meliputi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran untuk kasus di Indonesia?
2. Sumber daya manusia merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan ekonomi, jelaskan pernyataan ini!
3. Mengapa sumber daya alam dan teknologi menjadi kontributor penting dalam pembangunan ekonomi?
4. Asumsi bahwa faktor budaya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negeri dan berikan contoh kasus sebuah negara?
5. Mengapa negara sedang berkembang dan negara terbelakang sulit untuk maju secara cepat padahal jumlah penduduknya melimpah?

DAFTAR PUSTAKA

- Abendin, S., & Duan, P. 2021. International trade and economic growth in Africa: The role of the digital economy. *Cogent Economics and Finance*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1911767>
- Acemoglu, D. 2012. Introduction to economic growth. In *Journal of Economic Theory* (pp. 1–851). International Growth Centre. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2012.01.023>
- Akinlabi, I. A., & Olandunjoye, M. A. 2014. Determination of Empirical Relations Between Geoelectrical. *Ife Journal of Science*, 16(3), 437–445. <https://www.ajol.info/index.php/ij/article/view/131701>
- Alex, G., Byerlee, D., Helene-collion, M., & Rivera, W. 2004. *Extension and Rural Development Converging Views on Institutional Approaches?* (No. 4; Agriculture and Rural Development Discussion Paper). <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/474761468329360966/extension-and-rural-development-converging-views-on-institutional-approaches>
- Alfada, A. 2019. The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Aworinde, O. B., & Akintoye, I. R. 2019. Institutions, Infrastructure and Economic Growth in Nigeria. *Æconomica*, 15(3), 205–216. <http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oekonomica/article/view/5525>
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022* (Direktorat Diseminasi Statistik (ed.)). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>

- Bellos, G., & Knio, M. S. 2021. Estimating the impact of the effective valorization of cultural and natural resources for the economic development of Beirut. *Journal of Transnational Management*, 26(2), 90–117. <https://doi.org/10.1080/15475778.2021.1915566>
- Bhagwati, J., & Hansen, B. 1973. A Theoretical Analysis of Smuggling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(2), 172–187. <https://doi.org/10.2307/1882182>
- Bloom, D. E., Canning, D., & Jamison, D. T. 2004. New evidence coupled with a wider perspective suggest sizable economic returns to better health. In L. Wallace & J. Clift (Eds.), *Health and Development: A compilation of articles from Finance & Development* (pp. 10–15). International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/health/eng/hdwi/hdwi.pdf>
- Bruton, H. J. 1967. Productivity Growth in Latin America. *The American Economic Review*, 57(5), 1099–1116. <http://www.jstor.org/stable/1814396>
- Das, S., Mourmouras, A., & Rangazas, P. C. 2015. Economic growth and development: A dynamic dual economy approach. In *Springer*. Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-89755-4>
- Dieckmann, O. 1996. Cultural determinants of economic growth: Theory and evidence. *Journal of Cultural Economics*, 20(4), 297–320. <https://doi.org/10.1007/BF00149234>
- Dvouletý, O. 2019. *More Trade, More Wealth? Impact of Trade on the Economic Development of African Developing Countries BT - Globalization and Development: Economic and Socio-Cultural Perspectives from Emerging Markets* (N. Faghih (ed.); pp. 241–255). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14370-1_10

- Engbers, T. A., & Rubin, B. M. 2018. Theory to Practice: Policy Recommendations for Fostering Economic Development through Social Capital. *Public Administration Review*, 78(4), 567–578. <https://doi.org/10.1111/puar.12925>
- Fasoranti, M. M. 2012. The effect of government expenditure on infrastructure on the growth of the Nigerian economy, 1977-2009. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2(4), 513–518. <https://ideas.repec.org/a/eco/journ1/2012-04-14.html>
- Feruni, N., Hysa, E., Panait, M., Rădulescu, I. G., & Brezoi, A. 2020. The impact of corruption, economic freedom, and urbanization on economic development: Western balkans versus eu-27. *Sustainability (Switzerland)*, 12(22), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su12229743>
- Fisher, A. G. B. 1945. *Economic Progress and Social Security* (1st ed.). MacMillan. <https://doi.org/10.1086/635971>
- Fogel, R. 2004. Health, Nutrition, and Economic Growth. *Economic Development and Cultural Change*, 52(3), 643–658. <https://doi.org/10.1086/383450>
- Fujino, S. 1974. *A Theory of Investment BT - A Neo-Keynesian Theory of Inflation and Economic Growth* (S. Fujino (ed.)). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48150-5_2
- Harrod, R. F. (1939). An Essay in Dynamic Theory. *The Economic Journal*, 49(193), 14–33. <https://doi.org/10.2307/2225181>
- Hayat, A., & Tahir, M. 2021. Natural Resources Volatility and Economic Growth: Evidence from the Resource-Rich Region. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(2), 84. <https://doi.org/10.3390/jrfm14020084>
- Hofstede, G. 1984. *Culture's consequences: International differences in work-related values* (Vol. 5). sage.

- Horvat, T., Mayrlettner, P., Vide, R. K., & Bobek, V. 2021. Culture, corruption and economic development: The case of emerging economies. *Acta Oeconomica*, 71(1), 99–116. <https://doi.org/10.1556/032.2021.00005>
- International Monetary Fund. 2020. *World Economic Outlook: A long and difficult ascent*. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020>
- Keynes, J. M. 1936. *The general theory of employment, interest and money* (pp. 1–190). International Relation and Security Network - ETH. https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_KeynesTheoryofEmployment.pdf
- Khusaini, K., Bastian, A. F., Latuconsina, H., & Pratama, R. 2023. Boosting the quality of life through additional general allocation funds for village infrastructure development. *International Journal of Public Health Science*, 12(1), 348–360. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v12i1.21860>
- Khusaini, K., Ramdani, H. C., Syamiya, E. N., & Aisyah, I. 2022. Does the government expenditure on education and family income boost educational expansion? Lesson from panel FMOLS. *Review of Applied Socio-Economic Research*, 24(2), 89–105. <https://doi.org/10.54609/reaser.v24i2.140>
- Khusaini, Remi, S. S., Fahmi, M., & Muhamad Purnagunawan, R. 2020. Measuring the Inequality in Education: Educational Kuznets Curve. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 54(3). <https://doi.org/10.17576/JEM-2020-5403-05>
- Kunicova, J., & Rose-Ackerman, S. 2005. Electoral Rules and Constitutional Structures as Constraints on Corruption. *British Journal of Political Science*, 35(4), 573–606. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0007123405000311>
- Latuconsina, H., Khusaini, & Sabur, A. 2020. Income and Education Inequality in Banten. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 131–140. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i2.3861>

- Lee, J., Park, J.-G., & Lee, S. 2015. Raising team social capital with knowledge and communication in information systems development projects. *International Journal of Project Management*, 33(4), 797–807. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.12.001>
- Lemaitre, G., Schleicher, A., Schkolnik, S., Goldstone, L., Marchant, T., Feres, J. C., & Median, F. 2018. *Social dimensions of economic development and productivity: inequality and social performance* (B. Carlson (ed.); Issue August). Restructuring and Competitiveness Network. <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4659/S99117.pdf?sequence=1>
- Lewis, W. A. 1951. *The Principles of Economic Planning*. Public Affairs. <https://doi.org/10.2307/1053769>
- Li, X., Zhou, X., & Yan, K. 2022. Technological progress for sustainable development: An empirical analysis from China. *Economic Analysis and Policy*, 76, 146–155. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.08.002>
- Liu, D., & Meissner, C. M. 2019. Market potential and economic development with non-homotheticity. *Journal of Development Economics*, 139, 217–228. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.03.010>
- Maja, M. M., & Ayano, S. F. 2021. The Impact of Population Growth on Natural Resources and Farmers' Capacity to Adapt to Climate Change in Low-Income Countries. *Earth Systems and Environment*, 5(2), 271–283. <https://doi.org/10.1007/s41748-021-00209-6>
- Majeed, M. T., Mazhar, M., Samreen, I., & Tauqir, A. 2022. Economic complexities and environmental degradation: evidence from OECD countries. *Environment, Development and Sustainability*, 24(4), 5846–5866. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01687-4>

- Malthus, T. R. 1798. *An Essay on the Principle of Population* (pp. 1–32). University of Michigan Press.
- Nafziger, E. W. 2006. *Economic Development* (Fourth). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511805615>
- Nzié, J. R. M., & Pepeah, A. T. 2022. Are natural resources an impetus for economic growth in Africa? *Natural Resources Forum*, 46(1), 136–153. <https://doi.org/10.1111/1477-8947.12247>
- Owens, E. 1987. *The future of freedom in the developing world: Economic development as political reform*. Pergamon.
- Pratikto, A. 2012. Pengaruh Budaya Terhadap Kinerja Perekonomian. *Buletin Studi Ekonomi*, 17(2), 98–115.
- Ritson, C. 2020. *Population Growth and Global Food Supplies BT - Food Education and Food Technology in School Curricula: International Perspectives* (M. Rutland & A. Turner (eds.); pp. 261–271). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-39339-7_17
- Safira, H. A., Khusaini, K., & Ramdani, H. C. 2020. Agama Dan Pembangunan Ekonomi Regional Di Banten Tahun 2000–2016. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 80–93.
<https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.199>
- Samuelson, P. A. 2004. Where Ricardo and Mill Rebut and. *Journal of Economic Perspectives*, 18(3), 135–146.
<https://doi.org/10.1257/0895330042162403>
- Seers, D. 1969. *The meaning of development assistance* (No. 44; IDS Communication). <http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/14769>
- Solow, R. M. 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
<https://doi.org/10.2307/1884513>

- Solow, R. M. 1957. Technical Change and the Aggregate Production Function. *The Review of Economics and Statistics*, 39(3), 312–320. <https://doi.org/10.2307/1926047>
- Strauss, J., & Thomas, D. 1998. Health, Nutrition, and Economic Development. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 766–817. <http://www.jstor.org/stable/2565122>
- Suryahadi, A., Rishanty, A., & Sparrow, R. 2020. *Social Capital and Economic Development in a Large Multi-ethnic Developing Country: Evidence from Indonesia* (No. 4; Working Paper). <http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP042020.pdf>
- Swan, T. W. 1956. Economic Growth and Capital Accumulation. *Economic Record*, 32(2), 334–361. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x>
- Tahir, M., Burki, U., & Hayat, A. 2022. Natural resources and economic growth: evidence from Brunei Darussalam. *International Journal of Emerging Markets*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2021-0762>
- Tinta, A. A., Sarpong, D. B., Ouedraogo, I. M., Al Hassan, R., Mensah-Bonsu, A., & Ebo Onumah, E. 2018. The effect of integration, global value chains and international trade on economic growth and food security in ECOWAS. *Cogent Food and Agriculture*, 4(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2018.1465327>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2015. *Economic Development* (D. Battista & D. Alexander (eds.); Twelfth Ed). Person.
- Yadav, P., Singh, J., Srivastava, D. K., & Mishra, V. 2021. Environmental pollution and sustainability. In P. Singh, P. Verma, D. Perrotti, & K. K. B. T.-E. S. and E. Srivastava (Eds.), *Environmental Sustainability and Economy* (pp. 111–120). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822188-4.00015-4>

- Zallé, O. 2019. Natural resources and economic growth in Africa: The role of institutional quality and human capital. *Resources Policy*, 62, 616–624. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.11.009>
- Zallé, O. (2022). Natural Resource Dependence, Corruption, and Tax Revenue Mobilization. *Journal of Economic Integration*, 37(2), 316–336. https://www.e-jei.org/upload/JEI_37_2_316_336_2013600272.pdf
- Zhao, P., Gao, Y., & Sun, X. 2022. How does artificial intelligence affect green economic growth?—Evidence from China. *Science of The Total Environment*, 834, 155306. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155306>
- Zhou, J. 2023. *China's Global Expansion and the International Institution BT - Great Power Competition as the New Normal of China-US Relations* (J. Zhou (ed.); pp. 137–164). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09413-2_6
- Zhu, R., Jiang, J., Cong, Y., & Chen, G. 2023. Does servitization of industrial structure adversely affect the quality of economic development? Evidence from China. *Heliyon*, 9(1), e12841. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12841>

BAB 8

TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Misbahul Munir

Pada bab ini kita akan membahas mengenai tahapan pembangunan ekonomi, di antaranya definisi ekonomi pembangunan, tujuan pembangunan ekonomi, teori-teori dalam pembangunan ekonomi, indikator-indikator dalam pembangunan ekonomi, tahapan-tahapan dalam pembangunan ekonomi serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi.

8.1 Definisi Ekonomi Pembangunan

Berbicara mengenai ekonomi, pada umumnya akan berfokus pada perhitungan, nominal dan uang. Karena banyak sebagian dari kita memaknai ekonomi secara logika. Kenyataannya, cakupan dari ekonomi itu sangatlah luas dan tidak hanya tertuju dalam perhitungan secara kuantitatif semata. Lebih dari itu, ekonomi berkaitan juga dengan beberapa aktivitas misalnya pembuatan produk, pemasaran serta pendistribusian produk.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari suatu aturan-aturan yang mana didalamnya berkaitan dengan proses pembuatan (menciptakan barang), distribusi, dan penggunaan barang (misalnya keuangan, manufaktur, dan perdagangan).

Menurut Paul A. Samuelson, ilmuwan yang berasal dari Amerika menyatakan bahwa ekonomi adalah suatu upaya yang dilangsungkan seseorang dengan memanfaatkan sumber daya yang seadanya (minim) untuk menghasilkan beragam produk

kemudian dipasarkan agar bisa digunakan oleh khalayak ramai (umum). Sedangkan John Stuart Mill (ilmuan ekonomi dan ahli filsafat asal Inggris) mendefinisikan ekonomi secara sederhana, yaitu ekonomi sebagai implementasi keilmuan dimana bentuk penerapan yang dimaksudkan disini dengan membelanjakan dan mengunpulkan uang.

Lebih lanjut, Adam Smith seorang ilmuwan terkemuka menyatakan bahwa ekonomi adalah studi sistematis tentang perilaku manusia yang ditujukan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan ekonomi adalah segala upaya yang dilakukan seseorang untuk memaksimalkan sumber daya yang ada hingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan termasuk masyarakat.

Masih berkaitan dengan ekonomi. Sebenarnya ekonomi menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Karena dengan adanya pengetahuan mengenai ilmu ekonomi, dapat mendukung negara mencapai setiap *goals* yang telah ditetapkan sebelumnya termasuk juga membantu dalam membangun perekonomian suatu negara.

Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi merupakan keadaan dimana berubahnya pendapatan perkapita dan pendapatan nasional yang terjadi dan tidak terputus. Sedangkan Sukirno menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah kegiatan memaksimalkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki, dimana tujuannya adalah menambah pendapatan perkapita suatu negara.

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka membentangkan seluas-luasnya perekonomian yang ada, hingga pada akhirnya dapat memajukan infrastruktur, memajukan dunia pendidikan dan teknologi, serta dapat menumbuh-kembangkan perekonomian suatu negara (Khotami, 2019).

Pembangunan ekonomi adalah tahap peralihan keadaan dalam suatu negara, dimana mengarah pada kondisi yang lebih baik yang dilaksanakan dengan sistematis dengan tujuan menaikkan derajat hidup masyarakat.

Disadari atau tidak, pembangunan ekonomi bertitik fokus pada masyarakat. Dikatakan demikian, karena masyarakat menjadi subjek primer sementara pemerintah sebagai pihak yang mengarahkan proses pembangunan ekonomi.

Sederhananya, pembangunan ekonomi adalah proses atau langkah-langkah yang ditempuh menuju gerbang perbaikan ekonomi negara termasuk upaya yang dilakukan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

8.2 Tujuan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan unsur terpenting bagi setiap negara. Indonesia adalah negara berkembang, maka dari itu pembangunan ekonomi harus benar-benar direalisasikan mengingat hal tersebut merupakan pilar utama dalam upaya proses pembangunan negara.

Kurangnya upaya dalam membangun ekonomi akan berdampak terhadap keberlangsungan masyarakat yang ada didalamnya. Tujuan pembangunan ekonomi tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat agar lebih baik lagi.

Penerapan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia sendiri selalu berubah, sesuai dengan masa pemerintahannya. Meskipun demikian, tetap saja tujuan utamanya adalah menciptakan kedamaian, keadilan, serta pemerataan ekonomi bagi setiap masyarakat (Mulyani, 2017).

8.3 Teori-teori dalam Pembangunan Ekonomi

Berbicara mengenai teori dalam pembangunan ekonomi, tentu banyak sekali teori dari beberapa ilmuwan ahli ekonomi. Walaupun anggapan mereka berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut ini terdapat dua teori dalam pembangunan ekonomi, yaitu teori pertumbuhan aliran klasik dan teori pertumbuhan neo klasik.

8.3.1 Teori Pertumbuhan Aliran Klasik

Teori pertumbuhan klasik adalah teori yang dicetuskan oleh Adam Smith. Teori ini menjadi teori sangat populer, Adam Smith menyatakan dalam suatu negara, masyarakat bisa memperoleh kemakmuran melalui aspek pertumbuhan masyarakat melalui pertumbuhan *output* (pengeluaran) yang ada.

Meskipun dengan lugas teori tersebut digagas oleh Adam Smith, tetap saja terdapat ilmuwan lain yang kurang setuju dengan anggapan tersebut, salah satunya David Ricardo. Bantahannya menjelaskan jika pertumbuhan masyarakat memberikan pengaruh negatif pada tumbuh-kembangnya ekonomi suatu negara. Karena, semakin banyak masyarakat yang produktif dan inovatif meningkatkan upah para pegawai (Hasan & Muhammad, 2018).

8.3.2 Teori Pertumbuhan Aliran Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik akrab disebut dengan pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Karena yang mengemukakan teori ini dua ilmuwan ternama, yaitu Robert Solow dan S.W. Swan. Namun sebelum kedua ilmuwan tersebut mengemukakan teori neo klasik, ternyata Adam Smith adalah orang yang pertama kali mencetuskan teori neo klasik, bentuk teori ini adalah berisi penjabaran dari teori klasik.

Terdapat tiga aspek utama yang dipusatkan pada teori neo klasik, di antaranya modal, tenaga kerja serta tumbuh kembangnya teknologi. Makna yang ada dalam teori neo klasik yaitu semakin banyaknya jumlah pegawai dapat meningkatkan pendapatan atau

penghasilan perkapita. Namun, dengan adanya penambahan pendapatan perkapita tidak serta-merta mampu membangun dan menumbuhkan kembangkan ekonomi suatu negara. Alhasil, perlu juga diimbangi teknologi modern seperti yang ada saat ini (Rapanna & Sukarno, 2017).

8.4 Indikator-indikator dalam Pembangunan Ekonomi

Indikator merupakan alat ukur yang digunakan dalam mengetahui sejauh mana tujuan akan dicapai. Dalam suatu negara, meskipun proses pembangunan ekonomi terus berlangsung, tetapi kita tidak boleh berharap dan beranggapan hal itu terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena pada kenyataannya, suatu rencana terkadang tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi, dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya struktur ekonomi dan pendapatan perkapita.

8.4.1 Indikator Struktur Ekonomi

Indikator utama dalam membangun ekonomi suatu negara adalah bagaimana tatanan ekonomi negara itu sendiri. Pada indikator ini ditandai dengan terjadinya peralihan pada sektor-sektor yang ada. Misalnya banyak kita temui masyarakat yang masih bergelut dalam bidang pertanian, tanpa melirik bidang lain. Bukan tidak boleh, hanya saja bidang lain, misalnya bidang industri, mungkin bisa sangat membantu dalam membangun ekonomi suatu negara. Dimana pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan negara termasuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di dalamnya.

8.4.2 Indikator Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah jumlah masing-masing penghasilan yang diterima masyarakat dalam suatu negara. Tidak bisa dipungkiri, pendapatan perkapita dapat menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara. Adanya kestabilan negara berarti

penghasilan perkapita pun meningkat. Dengan meningkatnya penghasilan perkapita menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan jauh dari ketimpangan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

8.5 Tahapan-tahapan dalam pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi menjadi titik utama suatu negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, tentu terdapat beberapa tahapan yang menjadi perhatian utama dalam memaksimalkan pembangunan ekonomi.

Rostow, ilmuwan asal Amerika Serikat menyatakan, terdapat lima tahapan dalam membangun ekonomi suatu negara, di antaranya tahap masyarakat tradisional, tahap masyarakat prasyarat lepas landas, tahap masyarakat lepas landas, tahap masyarakat menuju kedewasaan atau kematangan dan yang terakhir tahap masyarakat konsumsi berlebihan (tinggi).

8.5.1 Tahap Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah sekumpulan orang yang memegang teguh nilai-nilai kebudayaan. Selain itu, masyarakat tradisional dapat dikatakan dengan masyarakat yang tidak tersentuh dunia luar. Mereka tidak mengetahui wilayah luar, jauhnya akses dari keramaian, dan tidak mengerti bidang yang berkaitan dengan teknologi modern seperti sehingga mengakibatkan minimnya pemanfaatan produksi.

Tahap pembangunan ekonomi masyarakat tradisional ini terjadi jika tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas masyarakat minim. Sehingga mengakibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri. Ini terbukti dari banyaknya atau hampir seluruh dari masyarakat bekerja sebagai petani atau buruh tani (Mulyani, 2017).

8.5.2 Masyarakat Prasyarat Lepas Landas

Pada tahapan ini, masyarakat sudah berpikir untuk beranjak meninggalkan tahapan hidup yang tradisional. Artinya, mereka tidak lagi menggunakan nilai-nilai kebudayaan nenek moyang (adat-istiadat) yang ada sebelumnya. Mereka lebih cenderung memiliki pemikiran yang terbuka, termasuk dalam menerima perubahan nyata, menyerap informasi yang ada terkhusus dalam aspek produksi.

Dari sinilah, akan terciptanya suatu perubahan baik pada struktur sosial maupun kegiatan dalam sektor pertanian menjadi perniagaan. Tahapan ini menjadi tanda jika pertumbuhan ekonomi suatu negara sudah sedikit menggembirakan dari tahap sebelumnya sehingga dapat merangkak menuju tahap selanjutnya.

8.5.3 Masyarakat Lepas Landas

Tahapan masyarakat lepas landas, mengindikasikan bahwa perekonomian negara berangsur membaik. Tahap ini meningkatkan sirkulasi politik maupun ekonomi yang ada dari sebelumnya. Lepas landas menjadi tahapan awal dari berkembangnya sektor perindustrian, adanya aktivitas investasi walaupun belum begitu besar, sehingga mampu melahirkan kekuatan dasar bagi pertumbuhan suatu negara.

8.5.4 Masyarakat Menuju Kedewasaan atau Kematangan

Tahap ini merupakan tahap dimana masyarakat sudah beranjak memanfaatkan media teknologi, sehingga beberapa aspek produksi dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien. Tahap cenderung dominan pada sektor perindustrian, peralihan dari tahap sebelumnya yaitu sektor pertanian. Dari sini, lahirlah orang-orang yang memiliki kecakapan tinggi di bidang industri.

Perekonomian yang matang tentu memiliki ciri tersendiri dalam mengelola suatu negara. Termasuk menyelesaikan persoalan ekonomi negaranya tanpa adanya andil pihak lain.

8.5.5 Masyarakat Konsumsi Berlebihan (Tinggi)

Tahapan ini adalah tahap akhir dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Tahap konsumsi tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat telah mencapai titik kesejahteraan ekonomi. Dimana mereka cenderung berpikir untuk mendistribusikan pendapatan yang dimiliki.

Pendapatan masing-masing masyarakat ini berkaitan dengan pendapatan perkapita suatu negara. Tingginya pendapatan tersebut menyebabkan masyarakat berkeinginan untuk memiliki barang-barang mewah. Dari barang mewah yang dibeli ini akan menambah penghasilan pajak suatu negara, sehingga pada tahap ini bisa dikatakan masyarakat dan negara berada pada derajat kemakmurannya. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana dua pihak tersebut mempertahankan kemakmuran yang ada.

8.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

Dalam menumbuh-kembangkan perekonomian suatu negara tentu terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhinya, di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

8.6.1 Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan negara dari kekayaan yang sifatnya alamiah. Misal, di daerah tertentu memiliki tanah subur sehingga dapat memperoleh hasil panen yang berkualitas tinggi, sumber mata air jernih dari pegunungan, hingga hasil dari laut dan menjadi kekuatan tersendiri bagi negara.

Sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah memberikan dampak positif bagi negara. Karena sumber daya alam yang dimiliki sangat membantu dalam mendukung pembangunan ekonomi. Sumber daya alam juga menjadi tumpuan yang diharapkan negara dalam menumbuh-kembangkan perekonomiannya.

Tetapi perlu digarisbawahi, sumber daya alam saja masih kurang untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perlu adanya sumber daya lain yang mampu memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki. Misalnya, sumber daya manusia (SDM).

8.6.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia termasuk faktor terpenting dalam membangun ekonomi suatu negara. Sayang bukan, jika kita memiliki jumlah sumber daya alam yang melimpah namun terbengkalai begitu saja lantaran tidak memiliki SDM yang pandai mengolah. Oleh karena itu, negara perlu memiliki orang-orang yang produktif dan inovatif untuk mengelola dan mengolah sumber daya alam yang ada.

Sumber daya manusia ini dapat menjadi pengendali dalam mengatur setiap hasil bumi yang dimiliki. Manusia menjadi elemen terpenting dalam organisasi yang bergerak dibidang industrial. Tanpa disadari, memang besar peran SDM terhadap sumber daya alam yang dimiliki. Tidak heran jika SDM menjadi faktor yang membantu pembangunan suatu negara termasuk keberlangsungan ekonomi yang ada di dalamnya.

8.6.3 Akumulasi Modal

Faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi selain sumber daya alam dan sumber daya manusia, adalah modal. Modal adalah sesuatu yang dapat menunjang kedua sumber daya yang disebut sebelumnya. Modal yang dimaksudkan disini,

bentuknya banyak, mungkin beberapa contohnya bisa berupa bahan baku, bangunan dan alat transportasi. Bangunan (gedung) menjadi tempat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, serta alat transportasi digunakan untuk menunjang dalam kegiatan operasional.

Modal sangat bermanfaat bagi manusia untuk membantu mengolah apa yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan mutu atau kualitas produk yang dihasilkan nantinya. Dengan demikian, benar adanya jika modal dapat membantu membangun dan menumbuh kembangkan perekonomian suatu negara.

8.6.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurang rasanya, jika kita hanya memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal, tetapi kita tidak memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin hari semakin terasa, pesatnya perkembangan dunia. Jika kita tidak mampu beradaptasi akan kalah dalam persaingan global. Maka dari itu, kita dituntut untuk mengetahui dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang pembangunan ekonomi suatu negara.

Dimasa sebelumnya, masih banyak pabrik atau perusahaan memperkerjakan SDM untuk mengolah produk yang dimilikinya secara manual. Cara kerja seperti itu sebaiknya perlu dipertimbangkan ulang dalam konteks hari ini. Karena, untuk saat ini, ada cara yang lebih efektif membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Misalnya menggunakan alat atau mesin yang bisa langsung memproses produk yang dihasilkan dengan jumlah yang jauh lebih banyak, cepat, efektif dan efisien. Dalam hal ini, peran manusia hanyalah sebagai pengendali dan penyeimbang dalam menunjang kegiatan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M., & Muhammad, A. 2018. *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: CV. Nur Lina.
- Khotami, W. 2019. *Ekonomi Pembangunan*. Banjarmasin: Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin.
- Literasi Pembangunan Ekonomi*, <https://www.gramedia.com>, (diakses pada hari Jum'at, 17 Maret 2023, pukul 15.32 WIB).
- Mulyani, E. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. In *Angewandte Chemie International Edition* (Edisi Pert, Vol. 6). Yogyakarta: UNY Press.
- Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli*, <https://an-nur.ac.id>, (diakses pada hari Jum'at, 17 Maret 2023, pukul 09.45 WIB).
- Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli*, <https://www.stiepasim.ac.id>, (diakses pada hari Jum'at 17 Maret 2023, pukul 10.15 WIB).
- Pertumbuhan Ekonomi*, <https://ekonomi.bunghatta.ac.id>, (diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2023, pukul 09.27 WIB).
- Pertumbuhan Ekonomi*, <https://money.kompas.com>, (diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2023, pukul 07.54 WIB).
- Tahap Pertumbuhan Ekonomi Menurut Walt Whitman Rostow*, <https://adjar.grid.id>, (diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2023, pukul 00.20 WIB).
- Rapanna, P. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV. Sah Media.

BAB 9

PERKEMBANGAN PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Agung Nusantara

9.1 Negara dan Kesejahteraan

Perdebatan mengenai peran negara dalam pembangunan bukan lagi mengenai perlu atau tidaknya namun telah bergeser ke arah kedalaman negara dalam keterlibatannya dalam proses pembangunan. Senator Amerika Serikat, John Huntsman, Jr. menyatakan:

"I was criticized at some level within the Republican Party by those who say government should not be in the economic development business at all. My response is that the only country I know that doesn't have an economic development plan is Papa New Guinea." (Hendricks, 2016)

Artinya, seberapa pun derajat keterlibatan negara dalam pembangunan, peran negara tetaplah penting dalam mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan atau prosperity. Kesejahteraan, yang menjadi acuan negara dan masyarakat merupakan kesuksesan pembangunan dalam berbagai aspek, misalnya aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai keadaan individu, masyarakat maupun komunitas yang merasa puas dan bahagia dalam hidup mereka, dan memiliki akses keberbagai sumber daya, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Luasnya cakupan kesejahteraan tidak mungkin menafikkan peranan negara dalam pembangunan.

Di dunia ini, ada peran negara yang mampu mengantarkan masyarakatnya menuju pada negara sejahtera. Negara yang paling sejahtera didunia adalah Norwegia, disusul Swiss dan Finlandia. Peran ketiga negara dalam pembangunan tidaklah dominan namun perannya penting dalam menghasilkan regulasi-regulasi yang mengantarkan masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Dengan latar belakang sosial-budaya yang jauh berbeda, China juga mampu menunjukkan keberhasilan pembangunan yang menakjubkan. Sejak 1970an, pertumbuhan ekonomi rata-rata China mencapai kurang lebih 10%. China secara menakjubkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang akut hanya dalam jangka waktu 10-15 tahun. Peran negara memang sangat dominan dalam mendorong perekonomian China menuju perekonomian terbuka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada negara yang memiliki pengalaman sukses dalam memperbaiki kesejahteraan. Baik dengan latar belakang masyarakat yang demokratis maupun masyarakat yang dipimpin sebagaimana China. Praktek-praktek negara yang sukses dalam mengambil peran pembangunan, dengan memperhatikan kondisi obyektif masyarakatnya, merupakan praktek yang bisa ditiru oleh negara lain yang sedang membangun. Khususnya untuk negara yang masuk dalam kategori negara sedang berkembang. Negara yang terlambat memasuki era pembangunan karena sejarah kolonial.

9.2 Spontaneous Development

Pemikiran mengenai *spontaneous development*, pada dasarnya mengacu pada konsep *spontaneous order* yang dikemukakan oleh Hayek (Hayek, 1948, pp. 6–8). Pemikiran Hayek sebenarnya lebih mengarah pada konsep individualisme Josiah Tucker, Adam Smith, Adam Ferguson dan Edmund Burke. Mereka mengembangkan pemikiran individualism yang berbeda dengan

kelompok utilitarian Jeremy Bentham yang menjadi dasar pemikiran ekonom klasik. Hayek menyatakan, mengutip pendapat Adam Ferguson (Hayek, 1948, p. 7):

"nations stumble upon establishments, which are indeed the result of human action but not the result of human design"

Hayek meyakini bahwa kebebasan masyarakat, yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, dan mereka selalu berupaya untuk mengejar manfaat yang optimum, maka akan muncul apa yang disebut dengan *spontaneous order*. *Spontaneous order*, sekalipun tidak didefinisikan secara jelas oleh Hayek, akan bekerja dalam bentuk kerjasama masyarakat untuk mencapai tujuan alokasi sumber daya yang optimal.

Spontaneous order, atau tatanan spontan, adalah konsep yang dikemukakan oleh Friedrich Hayek dalam teorinya tentang ekonomi dan masyarakat. Konsep ini menyatakan bahwa tatanan sosial yang kompleks dapat muncul secara alami dari interaksi individu yang bebas dalam sebuah sistem yang tidak terencana.

Menurut Hayek, spontanitas tatanan sosial ini merupakan hasil dari pengetahuan tersebar dan tidak terpusat yang dimiliki oleh setiap individu. Hayek juga menekankan bahwa dalam sebuah sistem spontan, tidak ada satu entitas atau individu yang memiliki kontrol penuh atas proses dan hasilnya.

Konsep ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, spontanitas memungkinkan terciptanya fleksibilitas dan adaptabilitas yang dibutuhkan dalam sebuah masyarakat yang terus berubah. Karena masyarakat mengetahui apa yang mereka kuasai dan yang tidak mereka kuasai. Kedua, spontanitas memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas dalam sebuah tatanan sosial melalui seleksi alami.

Namun, Hayek juga mengakui bahwa spontanitas tatanan sosial ini dapat menghasilkan ketidakpastian, kebingungan, dan ketidakadilan jika tidak diimbangi oleh regulasi dan tata kelola yang tepat. Oleh karena itu, Hayek menyarankan agar tatanan

spontan ini diberi batasan-batasan dan pengaturan yang diperlukan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, konsep spontaneous order dari Hayek dapat memberikan sudut pandang yang menarik dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Namun, penting untuk memahami bahwa konsep ini harus diimbangi dengan regulasi dan pengaturan yang tepat agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Beberapa ciri-ciri dari pendekatan spontaneous development antara lain:

1. Muncul secara alami: Pendekatan *spontaneous development* muncul secara alami dari interaksi dan inisiatif masyarakat lokal, tanpa intervensi pemerintah atau kepentingan luar yang memaksakan pembangunan.
2. Partisipasi aktif masyarakat: Dalam pendekatan ini, masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan yang diinginkan, termasuk dalam memilih dan mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Pemanfaatan sumber daya lokal: Pembangunan didasarkan pada pemanfaatan sumber daya lokal, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan pembangunan.
4. Fleksibilitas: Pendekatan *spontaneous development* bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya.
5. Mendorong kreativitas dan inovasi: Dalam pendekatan ini, masyarakat diberikan kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan ide dan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan masyarakat sekitarnya.

6. Berkelanjutan: Pendekatan *spontaneous development* menempatkan keberlanjutan pembangunan sebagai tujuan utama, dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial dalam pembangunan.

Beberapa contoh dari pendekatan *spontaneous development* antara lain gerakan ekonomi rakyat, seperti koperasi dan usaha mikro, serta gerakan permaculture dan pertanian organik yang dikembangkan oleh masyarakat lokal. Referensi terkait dengan pendekatan ini antara lain buku "*Small is Beautiful*" karya E.F. Schumacher dan buku "*The End of Poverty*" karya Jeffrey Sachs

Berikut adalah kelemahan pendekatan *spontaneous development*:

1. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan sistem pendekatan ini.
2. Tidak semua masyarakat memiliki kapasitas untuk melakukan pengembangan yang mandiri.
3. Memerlukan koordinasi dan pengelolaan yang baik untuk menghindari konflik antara berbagai kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dapat menjadi kendala dalam pengembangan pendekatan ini.
5. Pengaruh pihak-pihak luar dapat mengganggu atau memanfaatkan proses ini untuk kepentingan mereka sendiri.

Namun, kekuatan pendekatan *spontaneous development* yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta pengembangan kapasitas lokal, mendorong kreativitas dan inovasi, dan berkelanjutan, menjadikannya salah satu pendekatan yang cukup menjanjikan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara baik dan

terukur, dengan mempertimbangkan keberagaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat.

Berikut adalah beberapa tahapan yang mungkin terjadi dalam proses *spontaneous development*:

1. Identifikasi kebutuhan masyarakat: Proses *spontaneous development* dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebutuhan ini bisa bermacam-macam, seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, air bersih, atau pekerjaan.
2. Munculnya inisiatif masyarakat: Setelah kebutuhan teridentifikasi, masyarakat lokal kemudian mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Inisiatif bisa muncul dari individu atau kelompok masyarakat yang merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri.
3. Pengembangan potensi lokal: Masyarakat lokal kemudian mengembangkan potensi lokal yang dimiliki, seperti sumber daya alam, keahlian, dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka mungkin mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.
4. Kolaborasi dan kemitraan: Dalam proses pengembangan ini, masyarakat lokal dapat bekerja sama dengan kelompok atau individu lain, seperti organisasi masyarakat, lembaga non-pemerintah, atau bisnis sosial. Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka.
5. Pemberdayaan masyarakat: Dalam proses *spontaneous development*, masyarakat lokal menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan memperbaiki kondisi mereka sendiri. Proses ini dapat memperkuat peran masyarakat

lokal dalam proses pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Proses *spontaneous development* bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Penting untuk memperhatikan konteks lokal dan mempertimbangkan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya dalam proses pengembangan

9.3 Induced Development

Konsep "*induced development*" merupakan salah satu teori dalam bidang pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Konsep ini menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya terjadi secara alami atau spontan, namun juga dapat diinduksi atau didorong melalui berbagai kebijakan dan intervensi yang tepat.

Menurut konsep *induced development*, ada beberapa faktor yang dapat memicu atau mendorong terjadinya pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah akses terhadap sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dukungan teknologi dan inovasi, kebijakan yang mendukung pemerataan dan keadilan sosial, serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Dalam konsep ini, pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Hal ini penting untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Meskipun konsep *induced development* memiliki keunggulan dalam memberikan perhatian pada aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan, namun juga ada kritik terhadap konsep ini. Beberapa kritik menyatakan bahwa kebijakan dan

intervensi yang diinduksi dapat mempengaruhi pasar dan mengganggu proses alami pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada juga kritik yang menyatakan bahwa konsep ini tidak memberikan perhatian yang cukup pada aspek institusional dan politik dalam pembangunan.

Secara keseluruhan, konsep *induced development* dapat memberikan sudut pandang yang menarik dalam memahami dinamika pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menemukan cara-cara yang tepat untuk mengimplementasikan konsep ini dalam konteks masing-masing negara dan masyarakat.

Induced development adalah proses pengembangan yang didorong oleh pemerintah atau entitas luar lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara atau wilayah. Berikut adalah ciri-ciri dan kekuatan serta kelemahan dari pendekatan *induced development*:

Ciri-ciri *induced development*:

1. Pemerintah dan kepentingan luar lainnya memiliki peran penting dalam memulai dan mendorong proses pengembangan.
2. Fokus pada pembangunan infrastruktur dan industri yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi.
3. Proses pengembangan diarahkan dan diatur oleh pemerintah, dengan tujuan mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan partisipasi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Pendekatan *induced development* memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Mendorong investasi dalam pembangunan infrastruktur dan industri, sehingga meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

2. Pemerintah dapat mempercepat proses pengembangan dengan menetapkan tujuan dan arah yang jelas.
3. Pengembangan yang diinduksi dapat meningkatkan akses ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Di samping kekuatan pendekatan *induced development*, juga memiliki kelemahan, yaitu:

1. Pemerintah mungkin lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada pengembangan sosial dan lingkungan, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.
2. Ketergantungan pada investasi asing dan kepentingan luar dapat membatasi kemampuan suatu negara untuk mengendalikan arah dan tujuan pembangunan.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan dapat mengurangi keberlanjutan dan kualitas hasil pembangunan.

Dalam prakteknya, pendekatan *induced development* dapat diintegrasikan dengan pendekatan lain seperti *participatory development* dan *sustainable development* untuk meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan kekuatan dari masing-masing pendekatan

Sebuah isu yang menarik mengenai *induced development* adalah terjadinya *Induced displacement*. Fenomena *induced displacement* terjadi ketika pemerintah atau entitas luar lainnya memaksa orang atau komunitas untuk meninggalkan tempat tinggal mereka sebagai akibat dari kebijakan pembangunan.

Induced displacement dapat terjadi ketika pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bendungan, atau gedung-gedung tinggi, yang membutuhkan pengambilan tanah atau lahan yang digunakan oleh penduduk

setempat. Dalam beberapa kasus, penduduk setempat tidak diberi pilihan untuk memilih apakah mereka ingin meninggalkan tanah mereka atau tetap tinggal di sana, dan seringkali mereka tidak mendapatkan kompensasi yang memadai.

Induced displacement dapat memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan pada penduduk yang terkena dampak. Mereka mungkin kehilangan akses ke sumber daya penting seperti air, makanan, dan tempat tinggal, serta mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, pengusiran yang diinduksi dapat memecah belah komunitas dan merusak ikatan sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan entitas luar lainnya untuk memperhitungkan dampak pengembangan yang diinduksi pada masyarakat setempat dan mencari cara untuk meminimalkan pengusiran yang diinduksi dan memastikan bahwa penduduk setempat diberi suara dalam proses pengambilan keputusan.

Di awal pembangunan ekonominya, Jepang menerapkan pendekatan *induced development*. Setelah Perang Dunia II, Jepang mengalami kerusakan yang sangat parah, termasuk infrastruktur yang hancur dan kekurangan sumber daya alam. Untuk mempercepat pemulihan ekonominya, pemerintah Jepang mengadopsi strategi ekonomi yang dipacu, yaitu dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri tertentu dengan memberikan dukungan dan fasilitas.

Salah satu contoh strategi ini adalah dengan memberikan dukungan finansial dan teknologi untuk industri otomotif, seperti Toyota, Nissan, dan Honda. Pemerintah Jepang juga memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspor, sehingga industri otomotif dapat berkembang pesat dan memimpin ekspor Jepang. Pemerintah juga memberikan dukungan dan insentif untuk

sektor teknologi informasi dan komunikasi, seperti Sony dan Panasonic.

Dengan demikian, Jepang menerapkan pendekatan *induced development* untuk mempercepat pemulihan ekonominya dan mengembangkan sektor-sektor industri yang dipandang strategis. Pendekatan ini berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi Jepang dan menjadikannya sebagai negara industri maju dalam waktu yang relatif singkat.

9.4 Command Development

Konsep "*forced development*" mengacu pada upaya untuk mendorong atau memaksakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial melalui kebijakan yang terkesan otoriter atau represif. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan harus dipaksakan atau didorong secara paksa, terlepas dari keinginan atau partisipasi aktif dari masyarakat.

Namun, konsep *forced development* sering dikritik karena memiliki banyak dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Beberapa dampak negatif dari *forced development* antara lain:

1. Pelanggaran hak asasi manusia: Upaya untuk memaksakan pembangunan dapat memaksa masyarakat untuk mengorbankan hak asasi mereka, seperti hak atas tanah, air, dan kebebasan berbicara.
2. Perusakan lingkungan: Kebijakan *forced development* dapat merusak lingkungan dan sumber daya alam, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.
3. Peningkatan kesenjangan sosial: Kebijakan *forced development* sering kali hanya menguntungkan segelintir elit dan tidak memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga memperburuk kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi.

4. Mengabaikan kepentingan jangka panjang: Kebijakan *forced development* sering kali hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.
5. Menekan partisipasi masyarakat: Kebijakan *forced development* sering kali menekan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Secara keseluruhan, konsep *forced development* tidak dianjurkan sebagai pendekatan yang tepat dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Sebaliknya, pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial seharusnya diadopsi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Meskipun kedua konsep tersebut seringkali digunakan secara bergantian, namun *command development* dan *forced development* memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Command development adalah sebuah model pembangunan yang didorong oleh intervensi pemerintah secara langsung untuk mengarahkan dan mengontrol pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam model ini, pemerintah berperan sebagai pusat pengambil keputusan, dan masyarakat hanya sebagai obyek yang harus menerima keputusan tersebut. Model ini banyak diterapkan pada masa-masa awal pembangunan ekonomi negara-negara sosialis. Sedangkan *forced development* lebih mengacu pada pendekatan pembangunan yang dipaksakan oleh kepentingan global, multinasional, atau negara-negara maju, yang mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Pendekatan ini seringkali memaksa masyarakat lokal untuk menerima kebijakan dan proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, dan dapat menyebabkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

9.5 Beberapa Praktek Penerapan Kebijakan Pembangunan

Dalam prakteknya, perbedaan antara *spontaneous order*, *forced development order*, dan *command development order* mungkin tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas. Hal ini karena banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu sistem ekonomi beroperasi dan berkembang, termasuk konteks politik, sosial, dan ekonomi.

Sebagai contoh, di beberapa negara, meskipun terdapat kebijakan yang mendorong spontanitas dalam ekonomi, seperti deregulasi dan kebijakan pro-pasar, namun pemerintah masih memainkan peran aktif dalam mengendalikan beberapa sektor tertentu, seperti industri strategis atau sektor keuangan. Di negara lain, pemerintah mungkin memainkan peran lebih aktif dalam mengendalikan seluruh ekonomi dan menentukan prioritas pembangunan.

Oleh karena itu, pengelompokan berbagai model pembangunan seperti *spontaneous order*, *forced development order*, dan *command development order* dapat memberikan kerangka kerja untuk memahami perbedaan pendekatan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi. Namun, dalam prakteknya, ada banyak kebijakan yang dapat termasuk dalam lebih dari satu kategori dan memerlukan analisis yang lebih mendalam dan konteks yang spesifik untuk dipahami secara tepat.

Penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki tantangan dan kondisi unik dalam mengembangkan ekonomi, dan tidak ada satu model pembangunan yang cocok untuk semua negara. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks yang spesifik dan menemukan keseimbangan yang tepat antara campur tangan pemerintah dan kebebasan pasar dalam mengembangkan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Kecil (KUK), dan

Kredit Usaha Mikro (KUM). Program-program tersebut memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah untuk membantu mereka memperkuat bisnis mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pada awalnya, program tersebut memang hasil dorongan pemerintah (*forced development*), namun ketika perkembangannya mengarah pada perbaikan akses masyarakat kecil terhadap modal, maka program tersebut akan berjalan dengan sendirinya di masyarakat tanpa dorongan dari pemerintah. Selain itu, Indonesia juga telah mengurangi birokrasi dan membuka peluang investasi melalui kebijakan yang ramah bisnis.

Di era digital, ketiga pendekatan pembangunan tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital. Namun, penggunaannya dapat bervariasi tergantung pada tujuan pembangunan ekonomi dan kondisi spesifik suatu negara.

Pendekatan *spontaneous order* dalam ekonomi digital dapat merujuk pada pengembangan inovasi dan kreativitas yang dihasilkan oleh pasar digital yang terbuka dan kompetitif. Dalam lingkungan digital, spontanitas dan inovasi dapat muncul dengan cepat melalui pengembangan teknologi baru, model bisnis baru, dan platform baru. Oleh karena itu, pemerintah dapat mendorong pembangunan ekonomi digital dengan kebijakan yang mendukung inovasi dan pengembangan pasar digital yang terbuka dan bersaing.

Pendekatan *forced order* dalam ekonomi digital dapat merujuk pada strategi pemerintah untuk mempromosikan pengembangan sektor tertentu atau teknologi tertentu, seperti kebijakan pengembangan startup, digitalisasi, dan *e-commerce*. Pemerintah dapat memainkan peran aktif dalam menentukan arah pengembangan ekonomi digital dengan mengalokasikan sumber daya dan mengendalikan sektor kunci, serta memastikan bahwa pengembangan teknologi dan sektor tertentu didukung oleh kebijakan yang tepat.

Pendekatan *command order* dalam ekonomi digital dapat merujuk pada strategi pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur seluruh ekonomi digital. Di negara-negara yang menganut pendekatan ini, pemerintah memiliki kendali penuh terhadap pengembangan dan operasi sektor digital, termasuk melalui pengaturan akses internet dan konten yang dapat diakses.

Namun, penting untuk diingat bahwa ekonomi digital memiliki dinamika yang berbeda dengan ekonomi konvensional, dan penggunaan ketiga pendekatan ini harus disesuaikan dengan kondisi spesifik dan dinamika ekonomi digital. Pemerintah perlu mempertimbangkan cara yang tepat untuk mempromosikan inovasi, mengatur sektor kunci, dan menentukan arah pengembangan ekonomi digital untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hayek, F. A. 1948. *Individualism and Economic Order*. The University of Chicago Press.
- Hayek, F. A. 1992. *Hayek's Legacy of the Spontaneous Order*. Federal Reserve Bank of Minneapolis.
- Hendricks, K. 2016. Why Economic Development is Important—From Peach Glen to Papua New Guinea. *Adams Economic Alliance*. <https://adamsalliance.org/why-economic-development-is-important-from-peach-glen-to-papua-new-guinea/>
- Ohno, K. 2006. *The Economic Development of Japan: The Path Traveled by Japan as a Developing Country*. GRIPS Development Forum.
- Ohno, K. 2018. *The History of Japanese Economic Development: Origins of Private Dynamism and Policy Competence*. Routledge.
- Palmberg, J. 2013. *Spontaneous Orders and The Emergence of Economically Powerful Cities*. Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.
- Petsoulas, C. 2001. *Hayek's Liberalism and Its Origins: His Idea of Spontaneous Order and The Scottish Enlightenment*. Routledge.
- Robinson, W. C. 2003. *Risks and Rights: The Causes, Consequences, and Challenges of Development-Induced Displacement*. The Brookings Institutions-SAIS.
- Sugden, R. 1989. Spontaneous Order. *Journal of Economic Perspectives*, 3(4), 85–97.
- Warner (ed.), M. 2019. *Kemiskinan dan Kebebasan: Studi Kasus Pembangunan Ekonomi Global*. Suara Kebebasan.

BAB 10

TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Luluk Fadliyanti

10.1 Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan pada mulanya menggunakan arti pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh suatu masyarakat akan dinilai dapat berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakatnya meningkat dan mengalami perubahan (Lestari et al., 2021). Pada dasarnya pembangunan mempunyai hubungan dengan pertumbuhan, pembangunan dapat menciptakan pertumbuhan, begitu juga pertumbuhan diakibatkan oleh adanya pembangunan (Digdowiseiso, 2020).

Teori pembangunan ekonomi pada dasarnya digunakan dalam menjelaskan fenomena dari tingkat keberhasilan dan kegagalan negara-negara yang sedang berkembang. Teori ekonomi pembangunan yang berkembang dituntut agar dapat menjelaskan berbagai macam fenomena ekonomi dan sosial yang terjadi. Model-model ekonomi pembangunan berupaya untuk menjelaskan keseluruhan proses pembangunan ekonomi (Hasan and Muhammad, 2018).

10.2 Mazhab Historisme

Pola pemikiran aliran Historisme berdasarkan sudut pandang sejarah terhadap suatu masalah dan fenomena-fenomena ekonomi. Landasan pemikiran mazhab ini berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Jerman pada abad ke-19. Mazhab ini

mencoba melihat pentingnya suatu kebijakan yang bertujuan untuk perbaikan kondisi masyarakat secara umum, yang dianggap dapat memberikan dampak positif pada sikap nasionalisme dan loyalitas kepada negara, serta perbaikan pada kondisi masyarakat yang akhirnya dapat menaikkan tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja (Arsyad, 2015).

10.2.1 Ahli Ekonomi Mazhab Historisme

Friedrich List merupakan salah satu tokoh pada masa pra-klasik dimana dipandang sebagai perintis pemikiran ekonomi di sekolah Historismus. Pemikiran List dituangkan secara rinci dalam bukunya yang berjudul *Das Nationale System der Politischen Oonomie (1841)*. Pokok pemikirannya bahwa sistem liberalisme *laissez-faire* tidak memberikan jaminan alokasi sumber daya yang maksimal. Dimana pembangunan ekonomi bergantung pada peran pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan budaya. Pembangunan ekonomi akan dapat terjadi ketika terdapat kebebasan dalam masyarakat baik dalam kegiatan politik maupun dalam kehidupan sosial. List juga menekankan bahwa suatu negara harus dapat melindungi kepentingan kaum yang lemah dalam masyarakat (Arsyad, 2015).

Dan perkembangan masyarakat dapat dilihat dari segi historis. Terdapat Ada 5 (lima) tahap perkembangan ekonomi yang mendasari cara produksi masyarakat, antara lain:

1. Tahap berburu atau barbarian, merupakan ciri khas masyarakat primitif, yang dalam tahapan ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam.
2. Tahap beternak atau pastoral, pada tahapan ini terdapat kegiatan peternakan, tetapi tidak menetap atau masih berpindah-pindah.
3. Tahap agraris, tahapan ini masyarakat sudah mulai menetap dan bercocok tanam
4. Penggabungan tahapan usaha tani dan industri manufaktur dan perdagangan, pada tahapan ini pola-pola industri

manufaktur serta perdagangan masih dalam bentuk sederhana.

5. Perpaduan antara tahap bertani dengan tahap industri manufaktur dan perdagangan, pada tahapan ini pola industri manufaktur dan perdagangan telah mencapai tahap maju (Boianovsky, 2013).

List mengemukakan bahwa sistem perdagangan bebas (*free trade*) yang dikemukakan oleh kaum Klasik hanya cocok bagi negara-negara yang perkembangan ekonomi masyarakatnya diposisi tahap kelima, yang mana pola industri manufaktur dan perdagangan sudah ada kelanjutannya.

Ahli ekonomi selanjutnya adalah Bruno Hilderbrand yang menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi dicerminkan dan didasari pada sejarah. Tetapi pembahasan mengenai sejarah ekonomi tidak dijabarkan secara lengkap beserta kerangka analisis yang kohesif, yang pada akhirnya sebagian besar dari karyanya hanya bersifat deskriptif mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi.

Kritikan terhadap list, Hilderbrand mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi bukan berdasarkan pada metode produksi atau konsumsinya, melainkan didasari oleh metode distribusi.

Bruno Hildebrand mempunyai pandangan lain mengenai pertumbuhan ekonomi. Pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi diawali dari alat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan tukar-menukar, antara lain:

1. Masa pertukaran barang dengan barang/barter
2. Masa pertukaran dengan menggunakan uang untuk jual-beli
3. Masa pertukaran dengan kredit (Istianto, Kumenaung and Lopian, 2021)

Dan kemudian dikembangkan oleh pendapat ahli ekonomi Karl Bucher yang menulis sintesa dari pendapat list dan hilderbrand. Bucher menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi suatu negara akan melalui 3 (tiga) tahapan antara lain:

1. Perekonomian subsisten, pada tahapan ini produksi hanya untuk keperluan sendiri
2. Perekonomian kota, pada tahapan ini perdagangan sudah meluas
3. Perekonomian nasional, pada tahapan ini peran pedagang menjadi semakin penting (Arsyad, 2015).

10.3 Teori Klasik

Dalam pembangunan ekonomi berbagai ahli ekonomi mempunyai pemikiran masing-masing di dalam menjelaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori klasik mengenai pembangunan ekonomi memberikan penekanan pada mekanisme pasar dalam pengaturan ekonomi serta pembatasan peran pada pemerintah dan lebih memberikan peluang yang lebih besar pada swasta. Oleh karena itu teori klasik lebih menegaskan pentingnya pembentukan modal atau investasi yang dilakukan oleh pihak swasta (SBM, 2022).

Tahapan-tahapan pada teori klasik dalam tatanan ekonomi masyarakat, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pasar bebas adalah inti dari suatu perekonomian.
2. Kegiatan perekonomian dilakukan dengan mekanisme pasar akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
3. Nilai dan harga barang, upah, sewa tanah serta laba ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar.

10.3.1 Ahli Ekonomi Teori Klasik

Adam Smith merupakan tokoh ekonomi klasik yang merupakan bapak ekonomi, dengan buku yang terkenal yaitu *The Wealth of Nations*. Pemikirannya secara umum yaitu mengenai tatanan dan keselarasan alam serta mekanisme alam sebagai suatu anugrah dari sang pencipta. Terdapat “invisible hand” atau “tangan ajaib” yang dapat bekerja dengan sendiri untuk mengalokasikan setiap sumber daya agar perekonomian selalu dalam keadaan seimbang atau lebih dikenal dengan mekanisme pasar. Menurut Adam Smith, adanya kebijakan pasar dan pengurangan campur tangan pemerintah dinilai dapat memberikan solusi. Namun pada kenyataannya mekanisme pasar tidak dapat berjalan dengan sempurna jika memiliki hambatan pasar. Adam Smith mengemukakan bahwa sumber daya alam yang tersedia adalah suatu dasar bagi kegiatan produksi masyarakat, dimana kuantitas sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia mempunyai peran yang pasif dalam proses pertumbuhan output, dimana masyarakat akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja. Terdapat 3 (tiga) alasan Adam Smith dalam spesialisasi dan pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, antara lain: (1) Spesialisasi dan pembagian kerja yang baik akan mendorong tenaga kerja untuk lebih dapat berkonsentrasi pada usaha melalui proses pengerjaan yang menjadi keterampilan sehingga produktivitas meningkat atau dapat disebut dengan “*learning by doing*”, (2) Spesialisasi dan pembagian kerja yang baik dapat mengurangi waktu yang terbuang dalam proses perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, sehingga produktivitasnya dapat meningkat, serta (3) Spesialisasi dan pembagian kerja yang meningkat dapat merangsang penemuan teknologi yang baru dan mampu mendorong tingkat produktivitas pada setiap satuan input. Selain itu, Akumulasi modal juga mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. Dimana akumulasi modal yang

dapat disebut dengan modal pembangunan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

David Ricardo merupakan salah satu pemikir atau ahli ekonomi klasik selanjutnya yang juga mempunyai pengaruh dalam memberikan pemikiran-pemikiran mengenai pembangunan ekonomi. Teori keunggulan komparatif merupakan pemikiran David Ricardo yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi pada saat ini. Menurut David Ricardo bahwa perdagangan dapat terjadi pada tingkat nasional maupun internasional tergantung pada keunggulan komparatif yang efektif dan efisien dibandingkan dengan keunggulan absolut atau mutlak. Hal tersebut disebabkan karena setiap negara akan lebih memilih menjual barang dan jasa lebih efisien dalam melakukan suatu produksi. Oleh sebab itu suatu negara kan melakukan spesialisasi untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu menurut David Ricardo, setiap negara harus memusatkan kegiatan ekonomi pada sektor industri agar dapat bersaing dan lebih kompetitif dalam perdagangan luar negeri (Atmanti, 2017).

Robert Malthus merupakan salah satu tokoh aliran klasik lainnya yang merupakan orang pertama yang dapat mengembangkan teori kependudukan yang komprehensif dan konsisten yang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Bukunya yang terkenal berjudul "*Essay on the Principle of Population*" yang terbit pada tahun 1798 (Subair, 2015). Teori ini mengenai tingginya tingkat penduduk terjadi disebabkan karena adanya kelangkaan atau *scarcity* yang mengakibatkan ketidak seimbangan antara jumlah barang yang tersedia dengan jumlah barang yang diminta, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya tingkat kebutuhan yang lebih tinggi dari jumlah barang atau jasa yang tersedia. Hal tersebut akan berdampak pada kelangkaan kebutuhan hidup seperti pangan, ketika terjadi pertumbuhan penduduk. Yang pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan

pangan karena tidak mencukupi kebutuhan seluruh penduduk (AlFauziah, 2021). Secara matematika, penjabaran dari teori Malthus dapat dijelaskan dengan angka, rumus Malthus menunjukkan suatu pertumbuhan jumlah penduduk sebagai deret ukur, yaitu: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Sedangkan persediaan makanan sebagai deret hitung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Artinya adalah ketika jumlahnya bertambah dua kali lipat dalam setiap 25 tahun (kecuali jika dicentang), maka pertumbuhan pada geometris mempunyai nilai (1, 2, 4, 8, 16, 32, dll), sedangkan meningkatnya produksi pangan pada aritmatika mempunyai nilai (1, 2, 3, 4, 5, 6, dll), dimana penduduk akan melewati batas dari jumlah makanan (Subair, 2015). Menurut Malthus bahwa semakin banyak jumlah penduduk suatu negara maka semakin besar untuk hidup sejahtera. Peningkatan jumlah penduduk yang secara terus-menerus merupakan suatu unsur yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah permintaan di pasar. Tetapi jika kenaikan jumlah penduduk saja yang tidak diimbangi dengan kemajuan-kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lainnya tentunya tidak dapat menaikkan jumlah pendapatan dan jumlah permintaan.

10.4 Teori Keynesian

Roy.F.Harrod dan Evsey. D. Domar merupakan 2 (dua) ahli ekonomi setelah Keynes. Teori-teori dari dua tokoh ekonom ini dikembangkan secara terpisah, Harrod menulis teorinya pada *Economic Journal* yang berjudul '*An Essay on Dynamic Theory*' pada tahun 1939, sedangkan pada tahun 1947 Domar menulis teorinya pada *American Economic Review* yang berjudul '*Expansion and Employment*'. Tetapi karena inti dari kedua teori ini sama, maka digabungkan menjadi satu dengan sebutan teori Harrod-Domar (Arsyad, 2015).

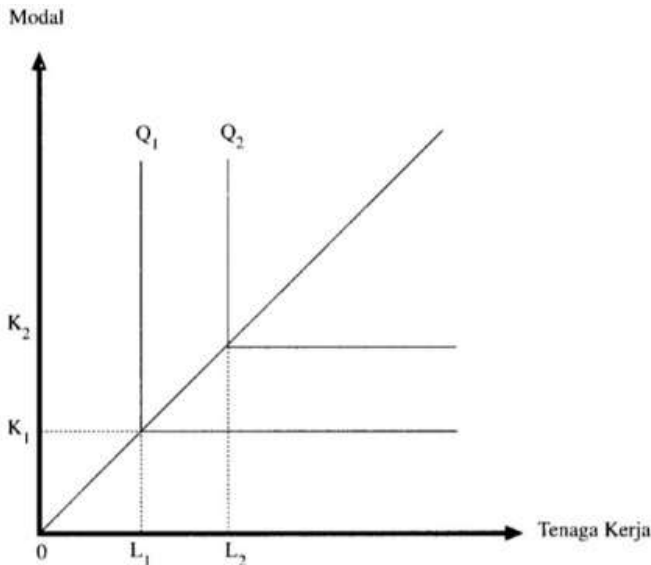
10.4.1 Ahli Ekonomi Keynesian

Teori Harrod-Domar pertama kali terpublikasi pada *American Economic Review* tahun 1947 yang berjudul *Expansion and Employment*. Teori ini adalah pengembangan teori makro ekonomi oleh Keynes yang mempunyai anggapan bahwa analisis Keynes kurang mampu mengungkapkan permasalahan ekonomi jangka panjang. Oleh sebab itu Harrod-Domar mencoba menganalisis persyaratan apakah yang diperlukan agar perekonomian dapat segera tumbuh serta berkembang dalam jangka panjang. Teori ini berusaha menunjukkan persyaratan yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh serta berkembang dengan kokoh (*steady growth*). Dalam teori Harrod-Domar akumulasi modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal diperoleh melalui proses akumulasi tabungan (Yunianto, 2021).

Asumsi-asumsi dari Harrod-Domar, sebagai berikut:

1. Perekonomian dalam keadaan lapangan kerja penuh (*full employment*) dan faktor produksi yang ada digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terbagi menjadi 2 (dua) sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan
3. Tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional
4. Kecenderungan untuk menabung besarnya tetap

Fungsi produksi dari Teori Harrod-Domar membentuk L, hal tersebut disebabkan karena jumlah output yang dihasilkan oleh kombinasi dari jumlah modal. Untuk menghasilkan output sejumlah Q_1 maka dibutuhkan L_1 dan K_1 . Dan ketika produsen mengubah kombinasi modal maka akan mengubah output.



Gambar 10.1. Kurva Fungsi Produksi Harrod-Domar
Sumber: Ekonomi Pembangunan (Arsyad, 2015)

inti dari teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar ini menjelaskan mengenai kebutuhan suatu negara akan investasi. Suatu negara dapat saja menyisihkan sebagian dari pendapatan nasionalnya, tetapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi sebagai tambahan atas modal.

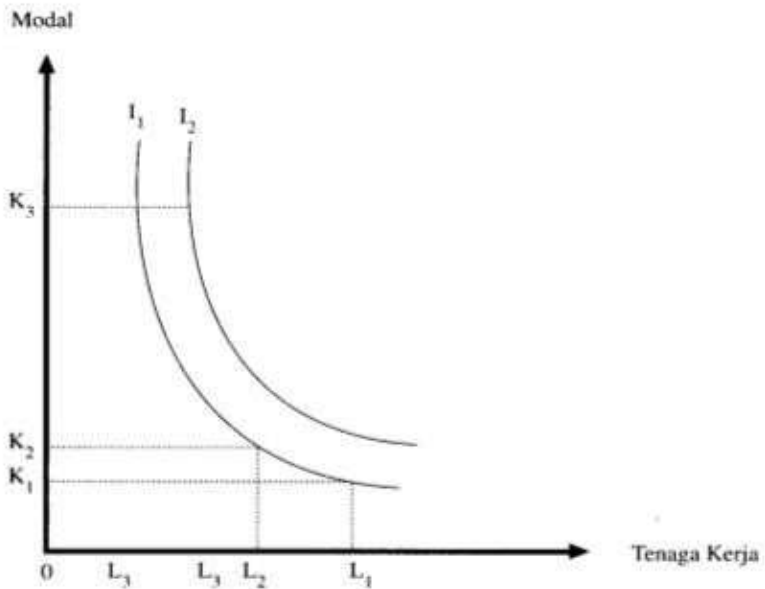
10.5 Teori Neo Klasik

Teori Neo-klasik menjelaskan mengenai bagaimana faktor-faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat tumbuh dan stabil dengan memaksimalkan 3 (tiga) komponen yang penting, yaitu modal, tenaga kerja dan teknologi. Suatu negara dapat mengalokasikan sebagian dari pendapatan nasional untuk menambah barang modal yang rusak. Tetapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan

investasi sebagai salah satu upaya untuk menambah cadangan bersih maupun stok modal. Setiap tambahan cadangan bersih terhadap stok modal dalam bentuk sebuah investasi yang baru, maka akan menghasilkan kenaikan jumlah output nasional atau GNP (*Gross National Product*).

10.5.1 Ahli Ekonomi Neo-Klasik

Robert M. Solow dan T.W. Swan yang merupakan salah satu ahli ekonomi pada masa Neo-Klasik. Berkembangnya teori ini didasari oleh -analisis sebelumnya yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi pada masa klasik. Model ini dikenal dengan sebutan teori Solow-Swan, yang menggunakan variabel-variabel seperti pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, teknologi, dan besaran output yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Adapun perbedaan utamanya dengan model Harrod-Domar yaitu model ini memasukkan variabel kemajuan teknologi. Model Solow-Swan ini menggunakan fungsi produksi sebagai model yang memungkinkan terdapat substitusi antara Modal (K) dan tenaga kerja (L). Sehingga dalam model Solow-Swan, persyaratan agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik menjadi kurang restriktif, hal tersebut disebabkan karena substitusi tenaga kerja dan modal. Hal tersebut artinya bahwa terdapat fleksibilitas pada rasio modal output dan rasio modal tenaga kerja (Yunianto, 2021). Berikut gambar kurva fungsi produksi neo klasik:



Gambar 10.2. Kurva Fungsi Produksi Neo Klasik
 Sumber: Ekonomi Pembangunan (Arsyad, 2015)

Kurva di atas menunjukkan bahwa fungsi produksi yang ditunjukkan oleh I_1 dan I_2 . Dimana tingkat output yang dihasilkan dalam fungsi ini dapat dihasilkan dengan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Selain itu, jumlah output dapat mengalami s u a t u perubahan dalam kondisi jumlah modal tetap. Contohnya, jika jumlah modal tetap sebesar K_3 , maka jumlah output dapat ditingkatkan menjadi I_2 jika tenaga kerja yang digunakan ditambah yaitu, L_3 menjadi L_2 (Arsyad 1999).

Model ini merupakan pengembangan formulasi Harrod- Domar dalam menambahkan variabel yang kedua, yaitu tenaga kerja serta memperkenalkan variabel ketiga, yaitu tingkat teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan.

Perbedaan dari model Harrod Domar yang mempunyai asumsi *constant return to scale* dengan model pertumbuhan neo-klasik Solow yang menggunakan konsep *diminishing returns* dari input modal dan tenaga kerja, jika keduanya di analisis secara terpisah. Namun ketika keduanya dianalisis secara bersamaan, maka akan sama dengan analisis yang dilakukan oleh Solow. Dimana kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor residu yang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang serta tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut oleh Solow maupun para ahli ekonomi lainnya. Dengan asumsi bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain (Todaro, 2006). Suatu perekonomian akan tetap mengalami peningkatan dalam kondisi tenaga kerja penuh (*full employment*) dan modal akan digunakan sepanjang waktu. Dapat dikatakan bahwa perkembangan ekonomi akan ditentukan oleh pertambahan jumlah penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

10.6 Teori Pertumbuhan Endogen

Ketika teori neo-klasikal dianggap belum mampu menjelaskan konsep dari pertumbuhan ekonomi dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh salah satu variabel utama yang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perkembangan teknologi yang dianggap sebagai variabel eksogen. Teori ini mencoba memasukkan proses teknologi secara *endogenous* agar hasil output perusahaan ataupun industri yang diperoleh lebih baik (Juhro and Trisnanto, 2018). Teori pertumbuhan Endogen merupakan perbaikan dari teori Neo-klasik yang mempunyai pandangan bahwa perkembangan teknologi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan dari sumber modal lainnya. Dalam artian, modal dapat di definisikan secara luas bukan hanya modal fisik tetapi juga modal non-fisik, misalnya pendidikan.

Teori pertumbuhan Endogen merupakan salah satu teori yang mempunyai isu baru dalam perkembangan teori pertumbuhan ekonomi dalam kelompok neo klasik yang muncul pada akhir tahun 1980an. Berawal dari muncul dalam salah satu jurnal yang ditulis oleh Paul Romer dan Robert Lucas yang mengkritik model pertumbuhan Solow melalui penjelasannya tentang kunci utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Wijayanto, 2017).

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh sumber modal lain. Modal yang dimaksud dapat diartikan lebih luas, tidak sebatas modal fisik akan tetapi mencakup modal non-fisik seperti pendidikan. Faktor-faktor dalam proses produksi menghasilkan pertumbuhan ekonomi, misalnya pada skala ekonomi yang tinggi ataupun perubahan teknologi yang dianggap sebagai faktor dari luar, misalnya peningkatan jumlah populasi. Pada teori pertumbuhan endogen dimana tingkat dari pertumbuhan ekonomi tergantung pada satu variabel, yaitu tingkat pengembalian modal. Variabel lainnya seperti inflasi, penurunan tingkat pengembalian, yang nantinya dapat mengurangi jumlah akumulasi modal dan dapat pula mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu variabel penyumbang perbedaan utama antara model pertumbuhan endogen dengan ekonomi neo-klasik (Simanungkalit, 2020).

10.6.1 Ahli Ekonomi Teori Pertumbuhan Endogen

Salah satu pelopor dari model pertumbuhan endogen, yaitu Paul M. Romer. Dengan model perkembangan teknologi yang bergantung pada jumlah total investasi terhadap *knowledge*. Jumlah total investasi terhadap *knowledge* ditentukan dari keputusan individu masing-masing setiap perusahaan. Investasi terhadap *knowledge* ini dapat dilakukan melalui pengembangan pada sektor R&D (*Research and Development*) (Juhro and Trisnanto, 2018). Suatu perusahaan dapat dikatakan lebih maju dibandingkan dengan perusahaan lain, maka dibutuhkan

stock knowledge yang lebih tinggi dengan perusahaan lain. Dengan cara demikian, maka modal *knowlegde* dapat mempengaruhi tingkat *output* dari perusahaan.

Teori Pertumbuhan Endogen memberikan kesimpulan mengenai investasi terhadap modal fisik dan *human capital* yang mempunyai peran pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang selanjutnya memberikan dorongan peran yang aktif terhadap kebijakan publik untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui investasi yang telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan *human capital*. Adapun peran dari pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan pengaruhnya pada perubahan konsumsi dan pengeluaran untuk investasi publik serta penerimaan pajak (Todaro, 2006).

Kelemahan dari teori Pertumbuhan Endogen ini masih tetap bergantung pada asumsi-asumsi neo-klasik yang sering tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi. Contohnya, diasumsikan bahwa hanya ada satu sektor produksi atau semua sektor bersifat simetris. Hal tersebut tidak memungkinkan untuk realokasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan pertumbuhan penting di antara sektor-sektor

yang berubah selama proses perubahan struktural. Selain itu pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang sering terhambat oleh ketidakefisienan yang timbul akibat dari infrastruktur yang buruk, struktur kelembagaan yang tidak memadai, dan pasar modal dan barang yang tidak sempurna. Teori pertumbuhan endogen dianggap mengabaikan faktor-faktor yang sangat berpengaruh tersebut dalam penerapannya untuk studi pembangunan ekonomi sangat terbatas terutama pada saat membandingkan antar negara yang terlibat. Contohnya teori ini gagal menjelaskan rendahnya tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik pada negara-negara berpenghasilan rendah yang mempunyai modal langka. Selain itu, terdapat struktur insentif

yang buruk yang bertanggung jawab atas lambatnya pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto) seperti rendahnya tingkat tabungan dan akumulasi modal. Alokasi umum terjadi pada ekonomi yang mengalami transisi dari pasar tradisional ke pasar komersial menjadi tidak efisien. Teori ini telah mengabaikan dampak pertumbuhan jangka pendek dan menengah, hal tersebut disebabkan karena teori ini menekankan pada faktor penentu pertumbuhan jangka panjang (Todaro, 2014).

10.7 Teori Schumpeter

Teori Schumpeter yang terkenal yang diterbitkan awalnya menggunakan bahasa jerman dan kemudian diterbitkan kembali dalam bahasa Inggris dengan judul *'The Theory of Economic Development'* pada tahun 1934. Setelah itu Schumpeter menjelaskan teorinya ke dalam buku yang berjudul *'Business Cycle'* pada tahun 1939 mengenai berjalannya proses pembangunan serta faktor utama penentu pembangunan (Arsyad, 2015). Schumpeter menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi terjadi karena adanya suatu perubahan terutama pada sektor industri dan sektor perdagangan (Hasan and Muhammad, 2018). Teori ini membedakan definisi dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, walaupun tujuannya sama yaitu untuk peningkatan output masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi akan maju jika setiap orang didorong untuk menghargai dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kata lain dibutuhkan inovasi dan kreativitas, lingkungan yang paling cocok yaitu bagi masyarakat yang menganut paham *laissez-faire* dan tidak untuk masyarakat sosialis yang lebih kearah mematikan kreativitas masyarakatnya (Arsyad, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- AlFauziah, N. I. 2021. 'Teori Ekonomi David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Dan Jean Baptiste Say', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), pp. 1–5.
- Atmanti, H. D. 2017. 'Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2), pp. 511–524.
- Boianovsky, M. 2013. 'Friedrich list and the economic fate of tropical countries', *History of Political Economy*, 45(4), pp. 647–691. doi: 10.1215/00182702-2369958.
- Digdownseiso, K. 2020. *Teori Pembangunan Daerah*. Available at: <http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku> Teori Pembangunan.pdf.
- Hasan, M. and Muhammad, A. 2018. 1/ *Pembangunan Ekonomi*.
- Istianto, T., Kumenaung, A. G. and Lopian, A. L. C. P. 2021. 'Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Bolaang Mongondow Raya', *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), pp. 75–95.
- Juhro, S. and Trisnanto, B. 2018. 'Paradigma dan Model Pertumbuhan Ekonomi Endogen Indonesia', *Publication-Bi*, pp. 1–40. Available at: <http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP112018.pdf>.
- Lestari, N. et al. 2021. 'Teori Pembangunan Ekonomi', *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), pp. 95–112. doi: 10.24042/revenue.v2i2.9071.
- SBM, N. 2022. 'Ekonomi pembangunan', in, pp. 29–41.
- Simanungkalit, E. F. B. 2020. 'PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA', *Journal of Management*, 13(3), pp. 327–340.

- Subair. 2015. 'Relevansi Teori Malthus Dalam Diskursus', *Jurnal DIALEKTIKA*, 9(2), pp. 96–110.
- Todaro, M. P. 2014. *Economic-Development-11Th-Todaro*.
- Wijayanto, B. 2017. 'Teori Pertumbuhan Endogenous', *Forman Journal of Economic Studies*, 13, pp. 83–103.
- Yunianto, D. 2021. 'Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi', *Forum Ekonomi*, 23(4), pp. 688–699. doi: 10.30872/jfor.v23i4.10233.

BAB 11

PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Oleh Kurnia Dwi Sari Utami

11.1 Definisi dan Konsep

Apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan? Munculnya konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan dibangun dari dua konsep yaitu berkelanjutan dan pembangunan. Menurut Rivai & Anugrah, (2011) definisi sederhana berkelanjutan adalah kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan hidup generasi saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi akan datang. Awal konsep pembangunan berkelanjutan dikenal hingga sekarang, lahir dari sebuah kritik terhadap fokus utama dari pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun dalam prosesnya banyak timbul dampak buruk seperti degradasi kapasitas produksi dan kualitas lingkungan karena eksploitasi yang terlalu masif. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dari generasi mendatang dengan tidak melakukan pengurangan kualitas sumberdaya yang tersedia.

Paradigma tentang pembangunan berkelanjutan sangat multidimensi dan multiinterpretasi. Namun demikian, secara umum pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek utama yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dari aspek sosial adalah terdapat kesetaraan dalam memperoleh pelayanan sosial seperti kesehatan, gender, pendidikan dan pemenuhan aspirasi politik. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan menurut aspek ekonomi menganggap

bahwa pembangunan secara terus-menerus harus menghasilkan output baik output berupa barang maupun jasa agar pemerintahan dapat terus berjalan serta dalam proses tersebut menjaga keseimbangan antar sektoral yakni sektor industri dan sektor pertanian. Dan terakhir berkelanjutan pada aspek lingkungan diartikan sebagai lingkungan yang perlu dipelihara agar sumber daya tetap stabil dengan mempertahankan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi ekosistem yang ada serta tidak melakukan eksploitasi yang merusak lingkungan.

Dalam pengertian Cabezas *et al.*, (2003) bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dipahami bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan yang merupakan landasan utama dari keberlanjutan pembangunan ekonomi. Asas pemerataan tidak hanya diperoleh generasi saat ini, tetapi juga dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana agar generasi yang akan datang memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkannya. Pembangunan berkelanjutan dalam aspek ekonomi dilandasi tujuan optimasi ekonomi yang disertai oleh efisiensi alokasi sumber daya saat melaksanakan kegiatan pembangunan. Pada praktiknya ditemukan banyak permasalahan terutama dalam penerapan pembangunan berkelanjutan dari aspek sosial dan lingkungan. Saat ini para praktisi belum memperoleh formulasi yang tepat bagi tujuan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan agar tercapai optimasi ekonomi dan alokasi sumber daya dilakukan dengan efisien sehingga tidak mengorbankan kondisi lingkungan yang telah dilakukan pembangunan. Aspek ekonomi berusaha memaksimalkan kesejahteraan manusia bersamaan dengan kendala pengelolaan sumber daya dan teknologi sumber daya alam. Sumber daya alam sebagai modal dasar perlu dikonservasi,

dimana konservasi yang dilakukan akan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan sehingga ketiga aspek ini perlu diterapkan secara berimbang. Sistem sosial stabil dan lingkungan yang sehat menjadi sumber bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi, sedangkan kesejahteraan ekonomi menjadi unsur terpenting bagi tercapainya stabilitas sosial dan terpeliharanya sumber daya serta lingkungan. Hampir sebagian besar masyarakat setuju untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan dari sumber daya maupun lingkungan dengan baik. Akan tetapi, kualitas lingkungan dan sumber daya kita semakin menurun karena beberapa faktor seperti semakin terjadinya peningkatan konsentrasi penduduk, muncul teknologi baru, dan meningkatnya kesejahteraan ekonomi. Tujuan-tujuan keberlanjutan pada aspek lingkungan sangat penting. Namun persoalannya adalah mengkoordinir agar tujuan-tujuan aspek lingkungan tersebut sejalan dengan tujuan sosial dan tujuan ekonomi karena hingga saat ini belum ada kesepakatan bersama terkait permasalahan ini.

Bagi Hák et al., (2018) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tetap mempertahankan terjadinya pembangunan itu dimasa mendatang dan tidak terbatas. Pembangunan berkelanjutan juga dimaknai sebagai perbaikan kualitas hidup yang disertai dengan penyesuaian terhadap kondisi daya dukung lingkungan atau dikenal dengan *continuing without lessening* yaitu meneruskan aktivitas tanpa adanya pengurangan atau penurunan sumber daya.

11.2 Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan yang dikenal sebagai komisi Bruntland menyadari bahwa pembangunan selama ini menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan sehingga

diperlukan perlindungan dan pengelolaan secara bijak karena dianggap sebagai modal dasar suatu pembangunan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan dimaknai solidaritas antar generasi sangat penting dimana sering terabaikan dalam pembangunan. Terdapat dua hal utama yang mendasari pembangunan tersebut, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan dasar dan pembangunan yang memihak masyarakat miskin
2. Lingkungan sebagai faktor pembatas karena karakteristiknya, teknologi yang ada dan organisasi sosial yang ada

Pada awal penerapan paradigma pembangunan ekonomi berkelanjutan terdapat pertentangan antara negara maju dan negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang memahami bahwa diperlukan upaya yang sangat besar untuk menyamakan diri dengan negara-negara maju, akan tetapi kehadiran konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi permasalahan dalam mencapai upaya tersebut, yakni:

1. Rasa ketidakadilan yang muncul dengan dibatasinya penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan
2. Saat sedang mengupayakan kenaikan pertumbuhan ekonomi, dipaksa untuk mengupayakan perlindungan terhadap kondisi lingkungan yang sulit untuk dilakukan. Sebagai contoh, pada saat Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi melebihi 6 persen, apakah Indonesia telah mengupayakan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan, diantaranya kontroversi antarnegara maju dan berkembang serta merubah perilaku manusia saat berinteraksi dengan lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Adapun tantangan-tantangan besar yang

dihadapi saat ini dalam penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan salah satunya adalah penentuan nilai aset lingkungan secara utuh.

Penentuan akurat dampak lingkungan yang akan dihadapi saat dilakukan pembangunan sangat penting karena dapat mengukur secara pasti besaran nilai aset lingkungan tersebut sehingga apabila suatu pembangunan memberikan dampak negatif maka biaya pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang terdegradasi tersebut dapat diperhitungkan diawal pengambilan keputusan pembangunan dilakukan. Untuk melakukan pengukuran terhadap aset lingkungan telah digunakan beberapa tehnik pengukuran, namun pada kenyataannya penilaian aset lingkungan secara utuh sangat sulit dilakukan karena memerlukan valuasi menyeluruh.

Tantangan besar lainnya adalah penentuan secara akurat ambang batas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak mengganggu ekosistem didalamnya. Saat ini, pengetahuan mengenai keterkaitan antara aktivitas manusia dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan masih parsial dimana manusia belum dapat merespons dengan tepat terkait adanya perubahan lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang sangat kompleks meskipun hal tersebut sangat dibutuhkan saat pengambilan keputusan.

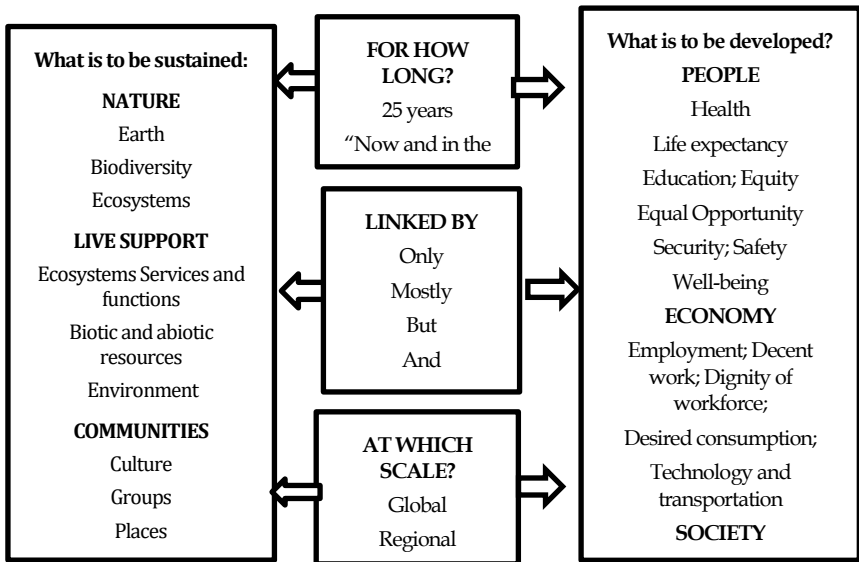
Terdapat banyak inovasi yang dikembangkan dalam mengukur perkiraan dampak negatif suatu pembangunan. Sebagai contoh awal penggunaan CFC (*chlorofluorocarbon*) tidak memperkirakan dampak bagi lapisan ozon. Salain itu, program revolusi hijau oleh pemerintah yang tidak memperkirakan dampak negatif dari penggunaan pestisida dan pupuk buatan secara masif. Pemanfaatan sumber daya alam sudah dilakukan sejak dulu, namun demikian belum semua karakteristik sumber daya alam dapat diketahui seberapa besar pengukuran secara pasti daya regenerasi

dan daya pulih pada setiap sumber daya alam yang digunakan dalam proses pembangunan.

Lingkungan masih dipenuhi ketidakpastian dan mempunyai ambang batasnya, akan tetapi bukan berarti peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus diminimalkan. Telah banyak kajian lingkungan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan untuk mengurangi derajat ketidakpastian tersebut sehingga terkait menentukan besar ambang batas lingkungan dapat diketahui dengan adanya kajian terus-menerus. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menentukan besar ambang batasnya.

Pertama, merancang kebijakan dan kelembagaan yang tepat dalam menetapkan skala prioritas agar pembangunan ekonomi dapat dijalankan secara berkelanjutan. Usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dilakukan dengan tetap melindungi kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang semakin terdegradasi karena pembangunan yang kurang tepat sehingga diperlukan reorientasi arah pembangunan.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, darimana harus memulainya?, kebijakan seperti apa yang dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan dampak degradasi lingkungan?, serta kelembagaan seperti apa yang dapat mengelola pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan? Ketiga pertanyaan ini bisa terjawab dengan mengaitkan konsep pembangunan berkelanjutan Sala *et al.*, (2012) dan merancang strategi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi sekarang.



Sumber : Sala et al., (2012)

Kedua, menyelesaikan permasalahan finansial karena pada negara-negara berkembang ditemui kesulitan dalam menentukan prioritas perbaikan kualitas lingkungan hidup. Sebagai contoh penanganan masalah pencemaran air dan udara, manakah yang harus diprioritaskan dengan memperhatikan kondisi finansial negara? Bebeberapa kasus dinegara maju yang memprioritaskan pemulihan kondisi sungai yang tercemar, akan tetapi perhitungan ekonomi menunjukkan bahwa perbaikan kualitas udara akan lebih bermanfaat dalam jangka panjang.

Ketiga, menciptakan suatu kondisi masyarakat yang berkelanjutan, dimana kunci kesuksesan dari suatu pembangunan adalah peran aktif dari masyarakat. Eksploitasi lingkungan menimbulkan dampak-dampak negatif terutama yang merasakan

dampak terbesar yaitu masyarakat miskin. Karena pada masyarakat menengah kebawah, mereka tidak memiliki perlindungan diri apabila terjadi kerusakan lingkungan. Upaya melindungi lingkungan harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat menengah kebawah, khususnya masyarakat miskin. Sangat disadari bahwa kesuksesan pembagunan pada lingkungan hidup bergantung pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan perlu diarahkan agar lebih memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat dan mengurangi otoritas pemerintah.

Terdapat empat hal yang perlu diterapkan masyarakat agar tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat tercapai yaitu pertama, promosi pendidikan, pelatihan dan dukungan publik untuk lingkungan. Kedua, melindungi dan mempromosikan kesehatan manusia yang berfokus pada akses masyarakat terhadap fasilitas medis terutama di daerah pedesaan, pengendalian penyakit menular, risiko pencemaran limbah, dan risiko ekologis. Ketiga, mengurangi tingkat kemiskinan melalui akses masyarakat miskin terhadap mata pencaharian yang berkelanjutan, mendorong pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan investasi yang mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia. Selanjutnya, meniadakan pembangunan yang mengancam demografis dimana hanya berfokus pada pertumbuhan populasi terutama di negara-negara berkembang.

Mempertahankan unsur-unsur umum, rasional dan berguna dari tiga konsepsi tentang perlindungan sumber daya alam dapat mengarah pada satu konsep umum yakni rekonsiliasi manusia dengan alam dan dengan dirinya sendiri. Konsep ini menjelaskan bahwa harus menjaga dan mengelola kondisi sumber daya alam dalam aktivitas ekonomi, keseimbangan ekologi, kesehatan bumi dan kemajuan sosial. Dengan demikian, hal tersebut melibatkan perubahan sikap yang mengarah pada pencegahan kerusakan kondisi lingkungan dalam hal keselarasan

antara produksi output dan lingkungan. Analisis komponen-komponen pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa potensi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan berubah sangat lambat, sedangkan pembangunan sosial ekonomi berubah dengan sangat cepat.

11.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu proses pembangunan. Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan atau memperluas lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya saat pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi ternyata menimbulkan dampak terhadap peningkatan jumlah lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang mengalami degradasi lingkungan sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan retensi karbon (Statistics & Indonesia, 2012).

Menurut Fauzi & Oktavianus, (2014) Kegiatan ekonomi yang semakin pesat dan bertambahnya jumlah penduduk akan berkontribusi pada peningkatan penggunaan sumber daya alam dan peningkatan limbah lebih besar yang berpengaruh pada daya dukung lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bertujuan menyejahterakan masyarakat harus dibayar dengan mahalnya ongkos perbaikan sosial dan lingkungan.

Menurut Cristian *et al.*, (2015) pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan perolehan manfaat yang sebesar-besarnya terutama pada negara-negara berkembang, menimbulkan beban yang berat terhadap lingkungan. Dari perspektif pembangunan ekonomi

berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, kondisi masyarakat, dan kelembagaan nasional yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan.

Pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satu tehnik untuk mengukur capaian pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah dengan menggunakan analisis multikriteria yang memfasilitasi agar tujuan pembangunan dapat selaras, dimana dapat memberikan alternatif keputusan untuk mencapai tujuan yang sifatnya multidimensi. Nilai ekonomi pada pemanfaatan sumber daya alam dapat diukur dalam bentuk moneter, sedangkan dampak negatif yang timbul dari pemanfaatan sumber daya alam yang ditinjau dari segi sosial dan lingkungan lebih kompleks untuk dinilai dalam bentuk moneter.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi berkelanjutan pada tahap awal yaitu diidentifikasi terlebih dahulu tiga pilar pembangunan yang berkelanjutan diantaranya capaian pembangunan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada penelitian (PPN & Bappenas, 2020) dijelaskan bahwa indikator ekonomi menggunakan PDRB per kapita, distribusi pendapatan dan persentase investasi terhadap PDRB. Selanjutnya indikator sosial yang digunakan meliputi kematian balita, jumlah anak yang mencapai wajib belajar 9 tahun yang saat ini wajib belajar menjadi 12 tahun, dan jumlah pengangguran. Pada indikator lingkungan mencakup kadar karbon dioksida, oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai zat-zat organik pencemar (COD), dan penutupan lahan (*land cover*).

Konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan perlu mengintegrasikan ketiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dimana indikator yang tepat masih terus dikembangkan. Disamping itu, agar membantu negara-negara

dalam pengambilan keputusan yang fokus terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, dalam hal ini komisi pembangunan berkelanjutan PBB menyusun indikator yang dijadikan tujuan capaian pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dikenal sebagai SDGs. SDGs berlaku secara universal sehingga bukan hanya negara-negara berkembang tetapi juga negara maju memiliki beban moral untuk mencapai target SDGs.

Dalam penyusunan indikator, terkait dengan pengembangan konsep SDGs (*Sustainable Development Goals*) pembangunan ekonomi berkelanjutan seharusnya dapat menjamin keberlanjutan baik lingkungan hidup maupun sumber daya alam terutama yang berkaitan dengan isu terkini yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Pembangunan ekonomi berkelanjutan didasarkan pada optimasi ekonomi dan efisiensi alokasi sumber daya alam yang menjadi acuan kebijakan dan pelaksanaan setiap kegiatan proyek pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cabezas, H., Pawlowski, C. W., Mayer, A. L., & Hoagland, N. T. 2003. *Sustainability: ecological , social , economic , technological, and systems perspectives*. 5, 167–180. <https://doi.org/10.1007/s10098-003-0214-y>
- Cristian, D., Maria, L., Artene, A., & Duran, V. 2015. *The components of sustainable development - a possible approach*. 26(15), 806–811. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00849-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00849-7)
- Fauzi, A., & Oktavianus, A. 2014. Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Mimbar*, 30(1), 42–52.
- Hák, T., Janou, S., Moldan, B., & Dahl, A. L. 2018. *Closing the sustainability gap 30 years after “ Our Common Future ” , society lacks meaningful stories and relevant indicators to make the right decisions and build public support*. 87(December 2017), 193–195. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.12.017>
- PPN, K., & Bappenas. 2020. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Rivai, R. S., & Anugrah, I. S. 2011. Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(1), 13. <https://doi.org/10.21082/fae.v29n1.2011.13-25>
- Sala, S., Farioli, F., & Zamagni, A. 2012. *Progress in sustainability science: lessons learnt from current methodologies for sustainability assessment: Part 1*. <https://doi.org/10.1007/s11367-012-0508-6>
- Statistics, F., & Indonesia, O. F. 2012. *Statistik kehutanan indonesia*.

BAB 12

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN GLOBALISASI

Oleh Baginda Parsaulian

12.1 Konsep Globalisasi

Selama tiga puluh lima tahun terakhir, transformasi yang sangat serius telah terjadi pada ekonomi dunia. Beberapa aspek dari transformasi ini terjadi seiring dengan meningkatnya peran pasar yang menyebabkan peran masyarakat secara fisik semakin berkurang, transaksi ekonomi antar negara meningkat pesat dan juga menyebabkan transaksi keuangan nasional serta internasional berkembang pesat. Singkatnya, prospek transformasi ini dibentuk oleh kebangkitan neoliberalisme, globalisasi dan finansialisasi (Epstein, 2005).

Smith, Ricardo dan Malthus telah menyatakan bahwa pada saat perkembangan kapitalis meluas dengan cepat maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi pusat dalam proses tersebut. Dampak bertahap dari globalisasi tersebut berasal dari Barat kemudian menjalar ke seluruh dunia menjadi bagian dari proses perubahan yang lebih luas dalam Ekonomi Dunia. Modal Eropa meningkatkan dominasinya atas perdagangan dunia melalui kebijakan komersial ekspansionis (Wallerstein, 1979). Pertumbuhan ekonomi mendorong perdagangan, kebutuhan untuk mengekspor dan perubahan teknologi lainnya merupakan bagian dari alasan penurunan peran feodalisme diseluruh dunia. Transisi dari feodalisme ke kapitalisme ini dimulai di Barat dan berdampak ke seluruh dunia.

Selama akhir 1980-an dan 1990-an, neoliberalisme dan istilah asosiasinya “globalisasi” menjadi kata yang ramai di banyak debat akademis. Terutama di antara mereka yang menggunakan konsep tersebut untuk menggambarkan tombak kapitalisme global, pasar, peran negara yang menurun dan globalisasi masyarakat sipil. (Harvey, 2005; Saad-Filho dan Johnston, 2005).

Model Keynesian menjadi kebijakan yang diterima baik oleh pemerintah maupun korporasi di dunia oleh karena negara mampu merangsang ekonomi global yang saat itu digerakkan oleh krisis kemudian dirusak oleh dua perang dan resesi besar di akhir tahun 1920-an. Model Keynesian mengalami ujian besar pada pertengahan 1970-an dengan krisis ekonomi dunia. Pada masa tersebut, intervensi negara mulai disajikan sebagai masalah. Lebih lanjut, ekonom monetaris Milton Friedman menuduh campur tangan pemerintah di pasar bebas sebagai penyebab krisis ekonomi. Dia berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat mengontrol jumlah uang beredar. Ekonom lainnya seperti Von Hayek dan Robert Lucas sangat gencar menentang intervensi negara, karena tidak efisien, tidak mampu dan menghasilkan pemborosan (Garrison, 1992). Mereka semua mengklaim bahwa ekonomi dapat menyelesaikan masalahnya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui pasar bebas dan perdagangan bebas. Ketidakmampuan negara untuk menyelesaikan krisis ekonomi memungkinkan neoliberalisme secara bertahap berhasil mengisi kesenjangan ideologis.

Konsep globalisasi pertama kali dicetuskan dalam sebuah artikel tentang distribusi dan penggunaan sumber daya oleh ekonom Inggris W. Foter pada tahun 1833, kemudian disebutkan juga pada tanggal 4 April 1959 di majalah “The Economist”. Efektivitas globalisasi kontemporer didasarkan pada studi penelitian Garrett Hardin tentang alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang ditulis pada tahun 1968 (Karabıçak, 2002). Globalisasi, yang secara historis merupakan fenomena yang lebih baru, telah

disertai dengan serangkaian perubahan dan transformasi sejak tahun 1980-an. Disintegrasi Uni Soviet, berakhirnya Perang Dingin, kemajuan teknologi dalam komunikasi dan pemrosesan data serta tuntutan dan peraturan yang dibawa oleh pihak kapitalis yang menguasai ekonomi karena akumulasi modal yang meningkat semuanya telah mempercepat globalisasi. Perekonomian dunia mengalami fase restrukturisasi sepanjang tahun 1980-an, seiring dengan proses globalisasi, negara-negara maju telah mulai menerapkan kebijakan yang akan meliberalisasi pasar keuangan untuk menciptakan area investasi yang lebih menguntungkan, sementara negara-negara berkembang telah melakukan hal yang sama untuk menyimpan dana yang mereka butuhkan untuk membiayai pertumbuhan mereka.

Konsep globalisasi diklasifikasikan dalam tiga judul: globalisasi ekonomi, globalisasi sosial dan globalisasi politik. Globalisasi ekonomi yang menjadi ruang lingkup studi ini mengacu pada integrasi ekonomi dunia sebagai akibat dari penyebaran teknologi yang cepat, arus modal internasional dan peningkatan perdagangan barang dan jasa lintas batas (Shangquan, 2000). Dengan kata lain, globalisasi ekonomi adalah pencapaian integrasi negara-negara berkat penurunan tembok pabean, tarif, kuota, dan batasan modal yang memisahkan ekonomi satu sama lain dan membuat barang, jasa, tenaga kerja, dan modal bergerak lebih cepat dan lebih mudah antar negara. (Adıgüzel, 2013). Ada tiga faktor penentu dalam peningkatan pesat globalisasi ekonomi. Unsur-unsur ini dapat disebutkan sebagai perubahan dalam struktur produksi dengan internasionalisasi produksi, perluasan perdagangan barang dan jasa internasional dan peningkatan pergerakan modal internasional (Mrak, 2000).

Globalisasi digambarkan bersama dengan proses yang bergerak maju dua arah dalam spektrum lokal-universal, menunjukkan konsepsi yang sangat dinamis dan bervariasi, jauh dari struktur statis. Globalisasi terus menyebar ke berbagai wilayah

di dunia seiring berjalannya waktu dan terus menyesuaikan strukturnya saat ini dengan memasukkan inisiatif dan gerakan baru ke dalam ruang lingkupnya (Bayar, 2008). Meskipun tidak mudah untuk menegaskan definisi yang jelas tentang globalisasi, namun dapat dinyatakan sebagai kemajuan interaksi dan saling ketergantungan antara masyarakat dan pemerintah di berbagai wilayah dunia dalam proses saling integrasi ekonomi lintas batas dan integrasi nasional ekonomi ke pasar dunia sebagai akibat dari mobilitas progresif barang, jasa dan modal.

Sebagai sebuah konsep, globalisasi menunjukkan integrasi transnasional bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya dengan beberapa nilai umum yang melampaui batas lokal dan nasional (Adigüzel, 2013). Terlihat bahwa mobilitas manusia, barang, modal, informasi dan teknologi antar perbatasan semakin meningkat seiring dengan proses globalisasi. Ada perbedaan pendapat tentang kapan globalisasi pertama kali dimulai. Alasan utamanya adalah fakta bahwa fenomena globalisasi memiliki struktur multilateral yang digunakan di berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik, ekonomi dan pemerintahan. Beberapa pendekatan dan beberapa peristiwa diambil sebagai dasar dari awal proses globalisasi. Sementara beberapa berpendapat bahwa globalisasi telah ada sejak awal sejarah, beberapa berpendapat bahwa globalisasi adalah usia yang sama dengan modernisasi dan kapitalisme. Beberapa pandangan membela bahwa globalisasi telah bersatu dalam konteks ide-ide yang berkaitan dengan pembubaran masyarakat industri dan tatanan kapitalis.

Optimisme tentang manfaat globalisasi ini tidak dimiliki oleh semua akademisi, karena globalisasi menghasilkan pertumbuhan yang buruk dan polarisasi kekayaan: apa yang disebut Collier sebagai 'Bottom one Billion' (2008). Akibatnya, ada kritik besar terhadap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional pada paruh kedua tahun 1990-an, terutama dengan krisis keuangan dan ekonomi Asia. Tanggapan dari lembaga-lembaga ini

sangat kuat. Mereka terus percaya bahwa liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi merupakan cara terbaik untuk pertumbuhan dan pembangunan.

Fenomena globalisasi tidak hanya mengandung satu dimensi dan seluruh dunia juga tidak terpengaruh dengan cara yang sama. Konsep globalisasi terdiri dari tiga elemen yang saling berhubungan; seperti perluasan pasar, perubahan struktur pemerintahan dan kelembagaan, serta munculnya tren sosial dan politik baru. Hal ini bukanlah pendekatan teoretis yang saling menggantikan, tetapi masing-masing mewakili aspek globalisasi yang berbeda. Globalisasi pada dasarnya terkait dengan isu-isu seperti perusahaan atau investasi multinasional, perdagangan internasional, regionalisme, keuangan global, pengambilan keputusan nasional, organisasi non-pemerintah global dan lembaga internasional serta memiliki kerangka kerja pemerintah dan masyarakat yang saling bergantung. (Toprak, 2001).

12.2 Pengukuran Dampak Globalisasi

Mengenai bagaimana globalisasi mempengaruhi suatu negara, perlu dipahami tidak hanya dampaknya tetapi juga untuk mengelolanya (Samimi, 2011). Selain itu, berbagai indeks mulai dikembangkan untuk menjelaskan masalah yang sering dibicarakan oleh para pendukung dan penentangannya, dampak positif dan negatifnya dan diperjelas dengan membandingkan indikator ekonomi makro.

Data Bank Dunia tentang Indikator Pembangunan Dunia juga dapat dilihat sebagai tanda globalisasi: PDB per kapita di dunia meningkat dengan rata-rata jarang tahunan sebesar 2% selama periode 1980-2005; Jika dilihat dari segi wilayah, tampaknya ada pertumbuhan pesat di Asia Timur dan Selatan, pertumbuhan lambat di Amerika Latin, dan stagnasi di Afrika. Meskipun telah terjadi penurunan angka kematian bayi yang signifikan di berbagai wilayah, diketahui bahwa rata-rata dunia turun dari 6,45%

menjadi 3,75%. Telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam harapan hidup di semua wilayah kecuali untuk ekonomi transisi dan Afrika. Diketahui juga bahwa lama pendidikan telah meningkat di hampir setiap wilayah dan rata-rata dunia telah meningkat menjadi 6 tahun dari 4,4 tahun antara tahun 1980-1999. Dalam hal demokrasi, kecuali China dan Timur Tengah, dunia telah mengambil langkah penting menuju demokratisasi (Yay, 2009; Shleifer, 2009). Globalisasi menyebabkan berbagai dampak (Held et al. 1999, Yeldan (2002), Balay, 2004) sebagai berikut :

a. Dampak Positif

1. Globalisasi menghilangkan batas waktu dan tempat serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam skala global.
2. Keadilan, kebebasan, kesetaraan menjadi milik bersama dalam skala global
3. Globalisasi berdampak positif di bidang kesehatan, dan ditemukan obat untuk beberapa penyakit kronis
4. Pergerakan bebas tenaga kerja antar Negara
5. Globalisasi mengadopsi Kebijakan pendidikan internasional

b. Dampak negatif

1. Dengan tren globalisasi, muncul negara-negara yang mengaku sebagai kekuatan global dan negara-bangsa yang harus berintegrasi dengan negara-negara itu serta terpapar pada pengaruh budaya, sosial dan ekonomi.
2. Globalisasi merupakan keuntungan bagi negara-negara yang telah melakukan industrialisasi lebih awal, sedangkan merupakan kerugian bagi negara-negara yang terlambat menyelesaikan industrialisasinya.
3. Globalisasi memampatkan negara-negara antara tradisi dan nilai-nilai global

Dimensi ekonomi, sosial dan politik dari globalisasi dan hubungan perdagangan luar negeri dianalisis membuktikan bahwa

pengaruh terbesar dari globalisasi adalah pada dimensi ekonomi. Di negara-negara berkembang, sebagian besar barang konsumsi dasar, investasi, dan barang setengah jadi diperoleh dengan cara impor. Oleh karena itu, integrasi negara-negara tersebut ke dalam ekonomi global menciptakan interaksi yang signifikan dalam struktur produksi dan konsumsi nasional. Ekonomi mengintegrasikan negara-negara dengan ekonomi dunia dan tingkat globalisasi diukur dengan membagi perdagangan luar negeri mereka dengan GNP (produk domestik bruto) mereka (Dorman, 2000). Peningkatan perdagangan global dapat didasarkan pada berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut; potongan tarif bea cukai, pengurangan atau pencabutan kuota, penurunan biaya transportasi dan komunikasi, strategi pemasaran global, adanya organisasi untuk meningkatkan perdagangan regional (Adıgüzel, 2013). Semua faktor ini dan data jangka panjang menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri memiliki andil besar dalam perekonomian nasional.

Indeks KOF digunakan untuk mengukur globalisasi. Indeks KOF pertama diperkenalkan oleh Dreher pada tahun 2002 dan diperbaharui serta dirinci tahun 2008 oleh Dreher, Gaston dan Martens. Indeks KOF meliputi dimensi ekonomi, sosial dan politik. Rasio KOF untuk ekonomi adalah (36%), sosial (37 %) dan politik (26%) . Rasio KOF untuk ekonomi mengandung 50% aliran aktual dan 50% batasan bahwa aliran aktual mencakup 21% perdagangan, 28% investasi asing, 24% dari investasi portofolio dan 27% dari pendapatan yang dibayarkan kepada warga negara asing. Batasan juga mencakup 24% hambatan impor tersembunyi, tarif rata-rata 27%, pajak perdagangan internasional 26%, pembatasan akun modal 23%. KOF sosial mencakup 34% informasi tentang orang tersebut dan 35% data terkait dengan aliran informasi dan 31% data tentang kedekatan budaya informasi tentang orang tersebut, termasuk 25% lalu lintas telepon, 3% transfer sebagai persentase dari (GDP), 26%

pariwisata internasional, 21% penduduk asing (% dari total penduduk) dan 24% surat internasional (per kapita). Data terkait kecacatan informasi juga mencakup 33% pengguna Internet (per 1.000 orang), 36% TV (per 1.000 orang) dan 31 persen perdagangan surat kabar (% dari PDB). Informasi tentang kedekatan budaya mencakup 45% restoran McDonald's (per kapita), 45% toko Ikea (per kapita) dan 10% perdagangan buku (persen dari PDB). KOF politik mencakup 25% kedutaan di dalam negeri, 28% keanggotaan dalam organisasi internasional, 22% firma dalam misi Dewan Keamanan PBB, dan 26% perjanjian internasional. Secara keseluruhan, globalisasi ekonomi memperkecil jarak peredaran barang, modal dan jasa serta informasi. Globalisasi politik menunjukkan diseminasi kebijakan pemerintah. Globalisasi sosial mewakili penyebaran ide, informasi, gambar dan orang. Semua indikator globalisasi ditempatkan dalam kisaran antara nol hingga seratus (nilai yang lebih tinggi menunjukkan globalisasi yang lebih besar).

12.3 Globalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Istilah "Globalisasi" dan "Pertumbuhan Ekonomi" merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Globalisasi dapat terdiri dari integrasi ekonomi, integrasi politik dan integrasi sosial. Setiap faktor globalisasi mungkin menjelaskan berbagai dimensi penting yang tergabung dalam ketiga sub-bagian tersebut. Yang terpenting, globalisasi dapat dimaknai sebagai integrasi pasar barang dan jasa, integrasi pasar modal, pertukaran budaya, kesepakatan migrasi dan/atau berbagai unsur-unsur yang berbeda tersebut. Menurut teori, pertumbuhan dan globalisasi memiliki hubungan dukungan yang identik di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara yang lebih tinggi mendorong jumlah arus masuk dan keluar perdagangan yang lebih besar.

Perdagangan sebagai "mesin pertumbuhan" globalisasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi (Robertson,1940).

Perdagangan merupakan alat untuk ikut dalam globalisasi (Kravis, 1970) dimana perdagangan mendorong transaksi barang dan jasa secara bebas antar negara. Dampak globalisasi pada pertumbuhan ekonomi berbeda antar Negara. Data World Bank tahun 2002 membuktikan hal itu tersebut dimana India dan China memiliki tingkat pertumbuhan PDB sekitar 6% untuk India dan 10% untuk Cina, karena kedua negara aktif dalam membuat ekonomi mereka ramah bagi perdagangan asing dan investasi antara periode waktu 1980-2000. Penting untuk ditekankan bahwa tren modern globalisasi telah terjadi umumnya didorong oleh dua komponen: pertama, menghasilkan perubahan teknologi penurunan yang terlihat dalam biaya transportasi dan informasi dan komunikasi di antara negara-negara dan kedua, keputusan kebijakan dipraktekkan lebih kuat struktur integrasi lokal dan internasional. Namun, efek globalisasi masih menjadi bahan diskusi yang luas dan intens (Fischer, 2003). itu menghasilkan pecundang dan pemenang, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar perbatasan. Jelas Globalisasi bukan hanya sebuah pendekatan untuk mendorong pertumbuhan di seluruh dunia, tetapi merupakan cara untuk mengurangi diskriminasi ekonomi dan ketidaksetaraan juga (Bhagwati, 2004; Srinivasan & Bhagwati, 1999). Mungkin memang begitu karena globalisasi dan itu terdiri dari beberapa besaran yang berbeda. itu mencakup setidaknya tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan politik (Dreher, 2006).

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan transportasi, komunikasi dan hubungan teknologi antar negara, mobilitas keuangan dan faktor produksi antar negara juga meningkat. Peningkatan ini menyebabkan globalisasi semakin cepat. Globalisasi biasanya disebut sebagai proses integrasi barang dan pasar modal dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu, globalisasi yang dipicu oleh kemajuan dalam komunikasi dan teknologi dapat didefinisikan sebagai integrasi proses pasar dunia dan peradaban. Globalisasi menyediakan proses membangun

jaringan koneksi antar aktor di jarak intra- atau multi-benua, dimediasi melalui berbagai arus termasuk orang, informasi dan ide, modal, dan barang. Globalisasi, oleh karena itu, adalah proses yang melampaui batas-batas negara, menggabungkan ekonomi nasional, budaya, teknologi dan pemerintahan, dan menghasilkan hubungan saling ketergantungan yang kompleks (Gygli et al., 2018).

Konsep bahwa dunia telah diubah menjadi komunitas universal sangat luas diterima di seluruh dunia. Globalisasi dapat diungkapkan dalam beberapa aspek misalnya, (Curry, 2000) globalisasi berarti mengikuti tren global terutama untuk mempromosikan teknologi, interaksi ekonomi, politik dan budaya antara negara, orang, masyarakat, bisnis dan pemerintah. Tren globalisasi terjadi umumnya didorong oleh perubahan teknologi yang mengakibatkan lalu lintas pertukaran informasi dan komunikasi antar negara yang semakin mudah dan cepat namun efek globalisasi masih menjadi bahan diskusi yang luas dan intens (Fischer, 2003). Globalisasi menghasilkan pihak yang mendapat keuntungan dan juga menghasilkan pihak yang dirugikan pemenang. Globalisasi secara teoritis bukan hanya sebuah pendekatan untuk mendorong pertumbuhan di seluruh dunia tetapi merupakan cara untuk mengurangi diskriminasi ekonomi dan ketidaksetaraan juga (Bhagwati, 2004; Srinivasan & Bhagwati, 1999) disebabkan globalisasi mencakup setidaknya tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan politik (Dreher, 2006).

Telah dilakukan beberapa penelitian yang membahas hubungan antara globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Dreher (2005) menyelidiki hubungan antara globalisasi dan pertumbuhan ekonomi menggunakan data dari 123 negara dari 1970 sampai 2000. Temuan menunjukkan bahwa globalisasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Pelajaran ini menunjukkan bahwa semakin banyak negara beralih ke globalisasi, semakin banyak pertumbuhan yang terjadi dalam perekonomiannya. Lebih-lebih lagi, Studi Husain (2000) menunjukkan bahwa globalisasi

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui berbagai saluran. Saluran ini adalah perdagangan internasional, integrasi keuangan, aliran tenaga kerja internasional dan perubahan teknis. Studi menunjukkan bahwa saluran bahwa globalisasi dapat mempromosikan kontribusi untuk ekonomi pertumbuhan. Namun, Chang dan Lee (2010) memeriksa hubungan antara indeks globalisasi umum termasuk komponennya yaitu ekonomi, sosial dan indeks globalisasi politik, dan ekonomi pertumbuhan 23 negara OECD. Temuan menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah antara varian dan kausalitas dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang, ada hubungan satu arah antara umum, ekonomi, dan sosial globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa keterbukaan yang lebih dalam ekonomi suatu negara mengarah ke pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Kleinert (2012) menemukan keterbukaan mendorong kegiatan ekonomi skala besar serta realokasi tenaga kerja antara ekonomi yang berpartisipasi. Hal ini membutuhkan penciptaan lapangan kerja baru. Syekh dan Syah (2008) menyelidiki dampak globalisasi dimana hasilnya memperjelas bahwa globalisasi berdampak pada kinerja makro ekonomi suatu negara secara positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa pemerintah dapat menggunakan globalisasi sebagai kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Paradigma globalisasi sebagai energi pertumbuhan ekonomi memiliki dua komponen mendasar. Terutama, diklaim bahwa globalisasi lebih mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kedua globalisasi memberikan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Dollar (2001) menjelaskan hubungan antara pertumbuhan dan globalisasi diyakini sebagai hubungan liberalisasi perdagangan dan investasi asing langsung yang mengarah ke modernisasi yang cepat dan karena itu menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat.

Globalisasi bukanlah fenomena penyebab terburuk dan krisis tetapi globalisasi membawa banyak parameter berbeda dengan faktor risiko bagi negara. Parameter ini yang memiliki relevansi khusus untuk negara-negara terbelakang dan berkembang sehingga dapat memberikan konsekuensi jika tidak dianalisis dengan benar. Meskipun globalisasi menawarkan beberapa peluang bagi negara-negara terbelakang dan berkembang, globalisasi menguntungkan negara-negara yang lebih maju. Globalisasi dengan dampak yang begitu luas diperkirakan akan memberikan peluang baru dan risiko (atau bahaya) baru kepada negara-negara seperti yang ditunjukkan oleh konsep paradoks globalisasi.

Dengan kata lain, fenomena globalisasi mengarah pada paradoks dengan memunculkan dua dinamika yang berbeda, yang satu mendukung globalisasi dan yang lain menentangnya. Pertumbuhan ekonomi, kebangkitan perdagangan luar negeri, penyediaan persaingan dan akhirnya penguatan lebih lanjut dari perusahaan multinasional adalah pandangan demi kepentingan terbaik globalisasi. Sebaliknya, menurut Giddens, globalisasi adalah proses yang dapat bersifat merusak sekaligus konstruktif. Karena alasan ini, negara-negara terbelakang dapat terkena dampak buruknya dari waktu ke waktu. Ini dapat menyebabkan ekonomi memonopoli atau mungkin membuatnya tidak berdaya. Globalisasi ekonomi harus digambarkan secara sederhana sebagai tidak baik atau buruk. Globalisasi merupakan fenomena yang sangat kompleks untuk penggambaran yang sederhana. Tidak ada ekonomi selain ekonomi pasar global yang sedang berkembang yang pernah berhasil sampai saat ini. Belum ada satu negara pun yang mampu bertahan di luar ekonomi global.

Secara umum kelemahan yang paling umum dari globalisasi adalah bahwa hal itu memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin; dimana orang kaya semakin kaya dan miskin menjadi lebih miskin. Hal ini dikarenakan globalisasi mengambil pekerjaan dari

satu negara dan menyediakannya ke negara lain, maka meninggalkan banyak orang tanpa kesempatan yang layak mereka dapatkan. Globalisasi menghubungkan perekonomian antar negara. Oleh karena itu, setiap keruntuhan pada perekonomian suatu negara akan menyebabkan keruntuhan pada perekonomian negara lain yang berhubungan. Globalisasi pada satu sisi memecahkan semua hambatan antar Negara, tetapi disisi lain sangat rentan yang berarti bahwa perekonomian dunia saling mempengaruhi. Jika ada kerugian terjadi pada suatu Negara maka negara lain akan mengalaminya terpengaruh. Ini memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat mengalami penurunan oleh karena negara lain menderita masalah-masalah ekonomi. Contoh yang jelas adalah global krisis keuangan antara 2007 dan 2008. Amerika Serikat sebagai negara yang menderita krisis ekonomi kemudian menjalar ke negara di seluruh dunia. Dunia akhirnya mengalami resesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adıgüzel, M. 2013. "Ekonomik Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisine Etkileri". Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-20
- Balay, R. 2004. "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim", *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 37(2), ss. 61-82.
- Bayar, F. 2008. "Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye". *Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi*, 32, pp. 25-34.
- Bhagwati, J. 2004. *In defense of globalization: With a new afterword*. Oxford University Press.
- Chang, C. P., & Lee, C. C. 2010. Globalization and economic growth: A political economy analysis for OECD countries. *Global Economic Review*, 39(2), 151-173.
- Curry, J. 2000. San diego/tijuana manufacturing in the information age. *San Diego Dialogue: The Global Engagement of San Diego/Baja California*. <http://www.sddialogue.org/pdfs/brpaper%20mfg.pdf>.
- Collier, P. 2008. "Bottom One Billion", Oxford: Oxford University Press.
- Dollar, D. 2001. Globalization, inequality, and poverty since 1980. *Washington, DC: World Bank*.
- Dorman, P. 2000. "Actually Existing Globalization" içinde *Rethinking Globalization (S)*, (Ed. P. S. Aulakh And M. G. Schechter). New York: Palgrave.
- Dreher, A. 2005. Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index. Department of Economics, University of Konstanz. Unpublished Manuscript (published later in 2006 in *Applied Economics*, 38, 10: 1091- 1110).
- Dreher, A. 2006. Does globalization affect growth? evidence from a new index of globalization. *Applied Economics*, 38(10), 1091{1110.

- Epstein, G. A. 2005. *Financialization and the World Economy*: Edward Elgar Publishing Limited, ISBN 1-84376-874-1
- Fischer, S. 2003. Globalization and its challenges. *American Economic Review*, 1–30.
- Garrison, R. 1992. 'Is Milton Friedman a Keynesian?', in Mark Skousen (ed), *Dissent on Keynes* (Praeger), available online: www.auburn.edu/~garrir/fm2friedman.htm.
- Gygli, S., Haelg, F., Sturm, J.E. 2018. The KOF Globalization Index–Revisited, KOF Working Paper, No. 439.
- Harvey, D. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt D. And Perraton, J. 1999. *Global Transformations: Global Transformations-Politics, Economics and Culture*. Cambridge: Polity Press
- Husain, I. 2000. Making Globalization Work For The Poor Case Study of Pakistan, EMP-CIDA Globalisation Project. Lahore University of Management Sciences, 1-28.
- Karabıçak, M. 2002. "Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde Ortaya Çıkan Yönelim ve Tepkiler". Süleyman Demirel Üniversitesi. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 7(12002).
- Kleinert, J. 2012. "Globalization: Effect on the National Rate of Unemployment"". Department of Economics, Eberhard-karls-University of Tübingen, Germany. JEL classification: F16, F12, F15.
- Kravis, I. B. 1970. Trade as a handmaiden of growth: Similarities between the nineteenth and twentieth centuries. *The Economic Journal*, 850–872.
- Mrak, M. 2000. Globalization: Trends, Challenges and Opportunities for Countries in Transition. United Nations Industrial Development Organization, 1-42. http://www.mgimo.ru/filesserver/2004/kafedry/mirec/konf_2-12-05/globaliz_countries-transition.pdf.

- Robertson, D. H. 1940. *Essays in monetary theory*. Staples Press; London.
- Saad-Filho, S. and Johnston, J. 2005. *Neoliberalism – A Critical Reader*. London: Pluto Press
- Samimi, P. & Lim, G. C. & Buang, A. A. 2011. Globalization Measurement: Notes on Common Globalization Indexes. *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, 1(7), 197-216.
- Shangquan, G. 2000. *Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention*. CDP Background Paper, No: 1: 1-8.
- Shleifer, A. 2009. The Age of Milton Friedman. *Journal of Economic Literature*, 47(1), pp. 123-135.
- Srinivasan, T. N., & Bhagwati, J. 1999. *Outward-orientation and development: Are revisionists right* (Tech. Rep.). Center Discussion Paper.
- Shaikh, F. M., & Shah, M. A. 2008. Impact of Globalization on Pakistan"s Economy by Using CGE Model. In *International Conference on Applied Economics* (pp. 839-845).
- Toprak, M. 2001. *Küreselleşme ve Kriz: Türkiye ve Dünya Deneyimi*. Siyasal Kitabevi, Ankara.
- Yay, T., 2009. "Küreselleşme Karşısında Piyasa ve Devlet", *Ekonomi Bilimleri Dergisi*, 1(1), ISSN: 1309-8020. Retrieved from <http://atif.sobiad.com/sobiadfiles/sobiadarsiv2/tbtkk/ebd/5000132434.pdf>
- Yeldan, E. 2002. "Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler", *Praksis Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(1), ss. 19-34.
- Wallerstein, E. 1979. *"The Capitalist World Economy"*, Cambridge: Cambridge University Press

BAB 13

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Tri Widayati

13.1 Pendahuluan

Setiap negara akan melakukan pembangunan ekonomi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Ada dua hal yang menjadi indikator telah tercapainya taraf hidup masyarakat yang lebih baik atau lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil (*equity*) dan makmur (*growth*). Jadi setiap masyarakat tentu menghendaki tercapainya dua hal tersebut, yaitu *growth* dan *equity* (Suparmoko, 2002)

Tercapainya dua hal tersebut secara bersamaan bukanlah hal yang mudah, karena pencapaian tujuan pertumbuhan dan kemakmuran misalnya tidak dapat secara bersamaan tercipta keadilan, begitu pula sebaliknya. Kedua tujuan ini seringkali dianggap sebagai suatu “*trade off*”, yaitu dimana jika tujuan pertumbuhan atau kemakmuran yang akan dicapai, maka yang harus dikorbankan adalah keadilan, begitu pula sebaliknya.

Dalam sistem perekonomian baik kapitalis ataupun sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis, dan sangat terbatas pada sistem perekonomian kapitalis murni, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith (Mangkoesoebroto, 2014). Adam Smith

mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
2. Menyelenggarakan peradilan
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh swasta, seperti halnya dengan jalan, bendungan. jembatan dan sebagainya.

Peran pemerintah dalam perekonomian modern, mempunyai empat fungsi utama yaitu :(Kuncoro, 2004)

1. Alokatif, adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar pemanfaatannya optimal dan mendukung efisiensi produksi.
2. Distributif, yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya dan hasil-hasil ekonomi.
3. Stabilisatif, adalah peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian
4. Dinamisatif, yaitu peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar cepat tumbuh dan berkembang.

13.2 Peran Alokatif

Dalam suatu wilayah, barang yang beredar di masyarakat tidak semuanya dapat diproduksi oleh pihak swasta. Barang yang tidak dapat diseikan oleh swasta ini disebut dengan Barang Publik. Barang Publik ini asalah barang yang tidak dapat disediakan dalam transaksi jual dan beli. Sementara, barang swasta adalah barag yang dapat disediakan dalam sistem pasar, yaitu melalui transaksi jual dan beli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya *kegagalan pasar (market failure)*. Sistem Pasar tidak dapat menyediakan barang dan jasa tertentu karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi namun dinikmati oleh orang lain.

Contoh dari barang/ jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar adalah jalan, jembatan dan pembersihan udara

Penyediaan barang dan jasa yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah merupakan peran alokatif yang sama dengan peran produsen. Barang-barang yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, sekali barang ini tersedia, tidak ada seorangpun yang bersedia membayar biaya penyediaan barang tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari total biaya. Sehingga dapat dikatakan fungsi alokatif pemerintah dalam perekonomian adalah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.

Contoh nyata dari pemberlakuan peran alokasi atau produsen adalah menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana jalan, jembatan, dan lain-lain.

Keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi untuk mengalokasikan barang swasta atau public berbeda dari pertimbangan apakah barang-barang tersebut akan dihasilkan oleh pemerintah atau oleh swasta. Dalam sistem perekonomian sosialis, sebagian besar barang swasta yang ada dihasilkan oleh pemerintah, sedangkan dalam sistem perekonomian kapitalis, sebagian besar barang-barang publik disediakan oleh pihak swasta.

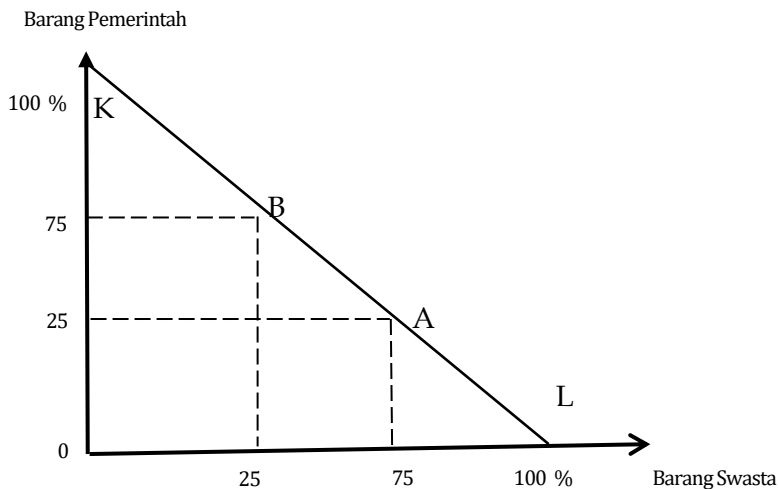
Dalam sistem perekonomian di Indonesia yang bersifat Demokratis, masyarakat melalui wakil rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat harus menetapkan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dialokasikan untuk menghasilkan barang public atau barang swasta

Pada Diagram 13.1 di bawah, dapat dilihat bahwa pada titik L, semua ekonomi digunakan untuk barang swasta, dimana alokasi sumber ekonomi sebesar 100 % digunakan oleh sektor swasta. Titik K menunjukkan semua sumber ekonomi digunakan untuk barang publik, alokasi sumber ekonomi sebesar 100 % digunakan

untuk sektor publik. Titik A dianggap sebagai titik yang optimal. Dimana titik A adalah titik yang dikehendaki oleh masyarakat (melalui wakil rakyat di DPR) dimana alokasi sumber ekonomi yang optimum adalah 75 % dari GNP dihasilkan oleh sektor swasta yang menghasilkan barang-barang swasta dan 25 % dari GNP adalah barang=barang publik.

Pada titik B, 75 % dari GNP adalah merupakan produksi barang publik, dan 25 % adalah barang swasta, maka sumber ekonomi tidak mencapai alokasi yang optimum, sehingga realokasi sumber-sumber ekonomi dari titik B ke titik A akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada diagram, titik yang menunjukkan alokasi barang dan jasa oleh pemerintah dan swasta yang paling efisien.



Gambar 13.1. Alokasi Barang Swasta dan Barang Publik
(Sumber : Mangkoesoebrata, 2014)

13.3 Peran Distributif

Pemerintah mempunyai peranan yang lain yaitu sebagai alat distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Kemampuan memperoleh pendapatan tergantung dari pendidikan, bakat dan sebagainya sedangkan warisan tergantung dari hukum yang berlaku. Pemilikan faktor produksi tergantung dari permintaan akan faktor produksi dan jumlah yang ditawarkan oleh pemilik faktor produksi.

Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Distribusi pendapatan bergantung pada kepemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan..

Pemerintah dapat mengubah distribusi pendapatan secara langsung melalui perpajakan progresif. Perpajakan progresif menunjukkan beban pajak yang relatif lebih besar bagi orang kaya dan beban pajak yang relatif lebih kecil bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi orang miskin. Pemerintah juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui kebijakan pengeluaran pemerintah, seperti perumahan murah untuk kelompok pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani, dan lain-lain.

Peran pemerintah sebagai distributor, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemerataan pelayanan barang dan jasa. Disamping pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien, pemerintah juga wajib membuat

kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:

- a. Perpajakan;
- b. Subsidi;
- c. Pengentasan kemiskinan;
- d. Transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin;
- e. Bantuan Pendidikan;
- f. Bantuan kesehatan, dan lain-lain.

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Bantuan Pendidikan yang sampai saat ini dilakukan di Indonesia adalah

- a) Program Indonesia Pintar (PIP) yang berupa bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin tau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

- b) Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, yaitu bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik, namun memiliki keterbatasan ekonomi.
- c) Tunjangan Guru ini sebenarnya pengganti dari tunjangan sertifikasi yang resmi dihapus oleh pemerintah. Selain program-program di atas, peran pemerintah terkait fungsinya sebagai distributor di Indonesia, diwujudkan dalam program-program yang lain.

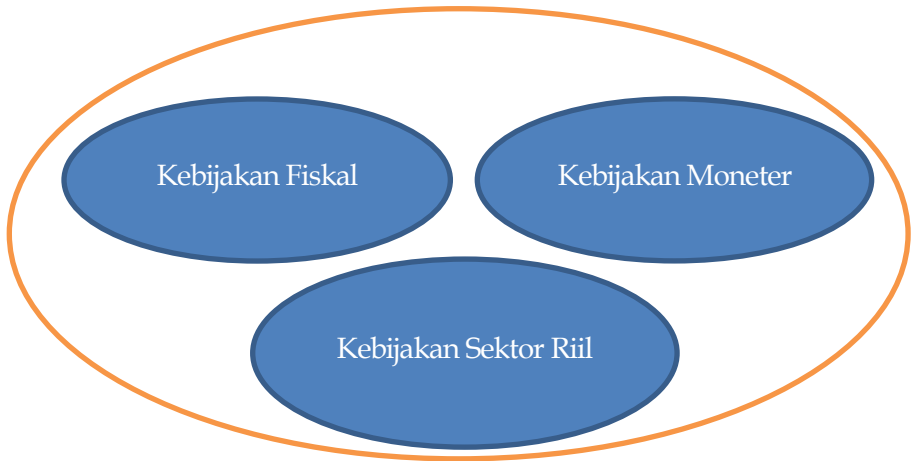
13.4 Peran Stabilisasi

Peran stabilisasi adalah fungsi pemerintah untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi. Peran stabilisasi disebut juga peran regulasi. Sebagai pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Contoh peran stabilisasi adalah:

- a. Menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara yang meliputi pendapatan dan pengeluaran negara.
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak, transfer dan pengeluaran pemerintah. (Widodo, 2006) Kebijakan fiskal berkaitan dengan keuangan pemerintah dimana pajak merupakan sumber penerimaan sedangkan transfer dan pengeluaran pemerintah merupakan sisi pengeluarannya. Kebijakan fiskal ini mempunyai tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Sederhananya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran agar tetap stabil dan terciptanya ekonomi

yang terus tumbuh. Melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap penerimaan dan pengeluaran negara demi mencapai kestabilan ekonomi dan pembangunan. Biasanya pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal akan mengubah besaran pajak yang merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dan berperan sebagai sumber pendapatan negara guna membiayai pembangunan. Jadi, pembangunan jalan, terminal, stasiun, halte, dan lainnya, semua pembangunan itu bersumber dari pendapatan pajak pemerintah. Kebijakan fiskal mempunyai 2 (dua) instrument yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak.

- b. Menetapkan kebijakan moneter yaitu mengatur jumlah uang yang beredar sebagai upaya pengendalian inflasi. Menetapkan kebijakan ekonomi internasional terkait perdagangan dan kerja sama ekonomi antarnegara. Kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Menggunakan teori ekonomi modern, dewasa ini pemerintah, dengan dibantu oleh ekonom, telah memiliki cara untuk menggunakan kebijakan ekonomi moneter dan fiskal demi mengurangi lama dan tingkat keparahan resesi. Kebijakan moneter ini akan berpengaruh pada aktivitas investasi dan pengeluaran lain yang sensitive pada perubahan suku bunga. Dengan menggunakan piranti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tersebut, pemerintah dalam batas tertentu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat output nasional, lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran dan inflasi(Widodo, 2006)



Gambar 13.2. Kebijakan Makro Ekonomi

13.5 Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Stabilitas perekonomian Negara dapat terjaga dengan adanya peran pemerintah lewat kebijakan fiskal dan moneter. Kedua kebijakan ini sama pentingnya dalam rangka menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya kedua kebijakan ini dapat dilakukan bersamaan atau salah satu saja kebijakan yang harus dilakukan, tergantung pada kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Negara.

Kedua kebijakan ini mempunyai perbedaan, dimana perbedaan pertama adalah dari pengambilan keputusannya. Kebijakan Fiskal diputuskan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan, sementara Kebijakan moneter keputusannya mutlak berada di tangan Bank Indonesia. Perbedaan kedua bisa dilihat dari tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Pada kebijakan moneter dikeluarkan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya kestabilan.

13.6 Peran Dinamisatif

Pemerintah mempunyai peran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan berbagai peraturan maupun kebijakan. Kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan untuk sekarang dan masa depan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur adalah prioritas program/proyek infrastruktur yakni melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

13.7 Kegagalan Pemerintah

Selain kegagalan pasar, terdapat juga istilah kegagalan pemerintah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sumber timbulnya kegagalan pemerintah (Mangkoesoebroto, 2014)

1. Dampak yang tidak dapat diperkirakan lebih dahulu terkadang muncul karena adanya campur tangan pemerintah, misalnya kebijakan pemerintah yang mengatur tata niaga cengkeh yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani cengkeh, ternyata menimbulkan dampak turunya permintaan tembakau, yang menyebabkan turunya pendapatan petani tembakau
2. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan campur tangan tidak murah, sehingga harus mempertimbangkan manfaat dan biaya.
3. Banyaknya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah
4. Adanya pelaku pemegang kebijakan pemerintah yang mempunyai kepentingan pribadi

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, M. 2004. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mangkoesoebroto, G. 2014. *Ekonomi Publik*. Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. 1st edn. Yogyakarta: ANDI.
- Widodo, T. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer*. Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

BIODATA PENULIS



Zul Fadli, S.E., M.A.P

Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Pattimura

Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Juni 1988. Merupakan putra kedua dari pasangan Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S dan dr. Hj. Nurhaedah Azis, M.Kes. Menikah dengan Maulidyah Yaumil pada tahun 2018 dan dikarunia 2 orang anak yang bernama Yasmin Aisyah El Meidina dan Mohamed Arkananta El Mekkah. Pada 1 Maret 2022, penulis diterima menjadi dosen PNS pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon.

Menyelesaikan S1 pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Keuangan Kampus STIE Indonesia pada tahun 2011, dan S2 pada Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur Kampus STIA-LAN Makassar pada tahun 2018.

Telah menulis buku yang berjudul "Teori Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar, Konsep, Paradigma dan Teori", "Manajemen Sistem Informasi", "Administrasi Publik", "Pengantar Ilmu Politik", "Ekonomi Kependudukan", "Dasar-dasar Manajemen Keuangan", "Statistik Ekonomi" serta melakukan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat dan menerbitkan hasilnya pada beberapa Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus dan Jurnal Nasional terakreditasi Sinta.

BIODATA PENULIS



Fitri S. Kasim, S.E., M.P.W

Dosen Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Madako Tolitoli

Penulis lahir di Luwuk tanggal 22 Maret 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (2015) dan melanjutkan S2 pada Pembangunan Wilayah konsentrasi Perencanaan Pembangunan Regional (2019) di Universitas Tadulako. Penulis memiliki kepakaran dibidang ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Dan untuk mendukung karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakaran tersebut dan telah menerbitkan beberapa jurnal. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif di dunia Pendidikan. Buku kolaborasi yang sudah diterbitkan antara lain Ekonomi pembangunan (Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah) dan mikroekonomi.

BIODATA PENULIS



Dr. E. Suharno, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Magister Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

Penulis saat ini aktif dalam Konsultan penelitian dengan kepakaran Resources & Regional Economics. Buku ini semoga bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa.

BIODATA PENULIS



Dr. Sri Nawatmi, SE. MSi.

Dosen Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan
Fakultas Vokasi Universitas Stikubank (Unisbank)

Penulis lahir di Boyolali tanggal 27 April 1967. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi D3 keuangan dan Perbankan Fakultas Vokasi, Universitas Stikubank Semarang sejak tahun 1991 sampai sekarang. Menyelesaikan pendidikan S1 (tahun 1991) dan S2 (tahun 2000) pada Jurusan Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Melanjutkan S3 di DIE (Doktor Ilmu ekonomi) Universitas Diponegoro Semarang, lulus tahun 2016.

BIODATA PENULIS



Izzah Dienillah, M.E.

Dosen Ekonomi Syariah

STIS Abu Zairi Tlogosari Bondowoso

Penulis lahir di Bondowoso, tanggal 24 Maret 1994. Menyelesaikan pendidikan S1 program studi Ekonomi Syariah di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, kemudian melanjutkan jenjang magister Ekonomi Syariah di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Sejak tahun 2021 menjadi dosen Ekonomi Syariah pada program studi Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Abu Zairi Tlogosari Bondowoso. Sebagai seorang yang mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis telah menulis buku dasar-dasar wawasan kewirausahaan (2022). Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di jurnal.

Email: izzahdienillah8780@gmail.com

BIODATA PENULIS



Anita Latuheru, SE., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi STIE Port Numbay Jayapura

Penulis lahir di Ambon tanggal 12 Juni 1976. Penulis adalah dosen LLDIKTI Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, dosen tetap STIE Port Numbay Jayapura pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) lulus tahun 1999, jurusan Ekonomi Pembangunan, dan melanjutkan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS) lulus tahun 2009, jurusan Ekonomi Pembangunan.

BIODATA PENULIS



Dr. Khusaini, S.Pd., M.S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi
Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

Penulis kelahiran Jember, 6 April 1970 ini memiliki nama lengkap **Khusaini**. Penulis alumnus Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIS Tangerang tahun 1996. Tahun 2004, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Ekonomi FEB-UI. Tahun 2021, penulis juga menyelesaikan Magister Akuntansi di FEB-Universitas Budi Luhur Jakarta. Gelar Doktor Ilmu Ekonomi diraih oleh penulis tahun 2017 dari FEB-Unpad Bandung. Saat ini penulis menjadi guru PNS di SMAN 7 Kota Tangerang dari tahun 1996 hingga sekarang. Penulis juga menjadi dosen dengan perjanjian kerja di FKIP UNIS Tangerang mulai 1997 – hingga sekarang.

Di sela-sela kesibukan mengajar, penulis aktif di beberapa organisasi diantaranya sebagai Wakil Ketua MGMP Kota Tangerang 2015 - sekarang dan aktif di organisasi Banom NU dan membantu berdirinya PMII Komisariat UNIS Tangerang. Salah satu inisiator pendirian Komunitas Dosen Santri Nusantara (KOMEN) UNIS Tangerang. Buku yang pernah dihasilkan adalah: (1) Profesi Keguruan (Konsep, Profil, Permasalahan, dan Solusinya); (2) Disparitas Mutu dan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal (dalam

Pendidikan dan *Human Capital*); (3) Pemberdayaan UMKM Melalui Program Pemberdayaan (dalam Dinamika Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi); dan (4) Pendidikan dan Kemiskinan Ekstrem di Banten. Kegiatan berbagai penelitian bidang Ekonomi Pembangunan/Daerah dan Ekonomi Pendidikan yang didanai oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Kota Tangerang, Banten, dan LPPM UNIS Tangerang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hasil karya ilmiah penulis yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional dan jurnal internasional, yang terbaru antara lain: 1) *Measuring the Inequality in Education: Educational Kuznets Curve* [Jurnal Ekonomi Malaysia/Q3, Volume 54 (3), 2020]; 2) *Academic interest determines the academic performance of undergraduate accounting students: Multinomial logit evidence* [Vol. 9 (1), 2022; Cogent Business & Management/Q2]; 3) *Does the government expenditure on education and family income boost educational expansion? Lesson from panel FMOLS* [Volume 24 (2), 2022; Review of Applied Socio- Economic Research/Q4]; 4) *Boosting the quality of life through additional general allocation funds for village infrastructure development* [, Vol. 12 (1), 2023; International Journal of Public Health Science/Sinta 1 & Q4]; dan masih banyak publikasi di Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan lain-lain. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi email: khusaini@unis.ac.id dan mobile phone: 081389821777

BIODATA PENULIS



Misbahul Munir, S.E., M.E.K

Program Studi Ekonomi

Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

Lahir di Belitang, Sumatera Selatan pada 17 Juli 1995. Adalah pengajar di Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Di saat yang sama, juga mengabdikan diri sebagai Sekjen di salah satu Non-Governmental Organization (NGO) yang berkantor pusat di Jakarta, yaitu Kaukus Aliansi Kebangsaan Indonesia. Menempuh jenjang pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2017 dan melanjutkan pada Program Magister Ilmu Ekonomi dan Keuangan, Universitas Islam Indonesia (UII) lulus tahun 2019. Pernah mengabdikan menjadi dosen tetap di STAI Ash-Shiddiqiyah OKI Sumatera Selatan tahun 2020-2022. Selain menjadi pengajar, juga aktif menulis artikel ringan di surat kabar, baik lokal maupun nasional. Beberapa kali menjadi narasumber pada pelatihan menulis, baik penulisan artikel di surat kabar maupun penulisan artikel ilmiah (jurnal). Pernah tampil menjadi pembicara di Forum Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (PerSEBI) UIN Sunan Kalijaga dan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

BIODATA PENULIS



Dr. Agung Nusantara, SE., MSi.

Dosen Program Studi S1-Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan (1989). Melanjutkan S2 pada jurusan yang sama di Universitas Gadjah Mada (1999) dan S3 Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro (2013).

BIODATA PENULIS



Luluk Fadliyanti

Dosen tetap di Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Mataram, 8 Oktober 1974. Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2021 dan pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Jawa timur pada tahun 2013.

BIODATA PENULIS



Kurnia Dwi Sari Utami, S.E., M.E.K

Dosen Universitas Bina Bangsa (FEB Uniba) dan Universitas
Terbuka

Kurnia Dwi Sari Utami, S.E., M.E.K dilahirkan di Kimaam, Papua Selatan. Program S-1 diselesaikan di Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya (FEB UB) tahun 2014. Studinya dilanjutkan di Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan, dengan tesis tentang Risiko Pembiayaan dan Kinerja BPR Syariah di Indonesia. Saat ini masih mengajar di Universitas Bina Bangsa (FEB Uniba) dan Universitas Terbuka. Selain sebagai dosen, penulis juga berkiprah dan menekuni bidang *islamic financial* dan risiko-risiko yang dihadapi dunia perbankan serta sektor keuangan.

BIODATA PENULIS



Dr.(C). Baginda Parsaulian, SE, SH, ME.

Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr.(C). Baginda Parsaulian, SE, SH, ME. Penulis lahir di Padang, 12 Maret 1984, menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Negeri Padang Sumatera Barat dan sedang menyelesaikan pendidikan S3 pada universitas yang sama, saat ini aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan kajian pada bidang Ekonomi Pembangunan. Penulis aktif mempublikasikan artikel dengan kajian pada bidang ekonomi pada jurnal nasional dan internasional.

BIODATA PENULIS



Tri Widayati

Staf Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Semarang, tanggal 28 April 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang, dan melanjutkan jenjang S2 pada Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang. Penullis melanjutkan program Doktor pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada tahun 2017. Penulis mengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Mikro, Matematika Ekonomi, Ekonomi Makro dan Ekonomi Manajerial.